

**IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan
Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2010)**



**Oleh :
Tarmidzi, S.H.I
NIM : 08913082**

TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

**IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan
Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2010)**



Oleh :
Tarmidzi, S.H.I
NIM : 08913082

Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 366/PS-MSI/Peng./X/2011

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang
Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun
2010)**

Ditulis oleh : Tarmidzi

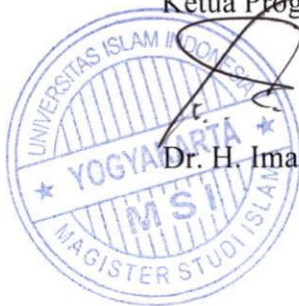
N. I. M. : 08913082

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 29 Oktober 2011

Ketua Program



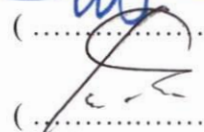
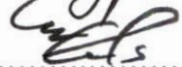
Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Tarmidzi
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 22 Februari 1979
N. I. M. : 08913082
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2010)**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. H. Imam Effendi, MA	()
Pembimbing	: Drs. YUSDANI, M.Ag.	()
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MHS	()
Penguji	: Drs. H. Asmuni, MA	()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2011

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **86,38 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 969/PS-MSI/ND/X/2011

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PNPB-MANDIRI DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang
Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun
2010)**

Ditulis oleh : Tarmidzi

NIM : 08913082

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 19 Oktober 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010)

Ditulis oleh : Tarmidzi, S.H.I

N. I. M : 08913082

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 Oktober 2011.

Pembimbing

Drs. H. Yusdani, M.Ag.

MOTTO

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

-(Q.S. al-Ma'arij, ayat 24-25)

"Kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran."

(H.R. Muttafaq "Alaih)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang merupakan buah dari perjuangan panjang dan akan menjadikan titik awal dari berbagai penghargaan.

Dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga, tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Damin (alm) dan Ibunda Warjiah (alm) serta kedua mertua saya H. Ridlwan A. Nur dan Hj. Zumaroh. Isteriku Nur Latifah, anaku Vania dan Elviana, kakak dan adikku, serta keluarga semua yang telah banyak memberikan motivasi dan telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, do'a dan mengingatkanku akan sebuah arti dari keberhasilan.
2. Seluruh keluarga besar di Pekalongan, sahabat senasib dan seperjuangan, yang selalu mendukung dan mendo'akan saya selama penyusun menimba ilmu di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penyusun sehingga tercapainya tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami AgamaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kearah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2010)”

Dengan penuh kesadaran, penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya tesis ini:

1. Allah SWT. atas segala nikmat, petunjuk dan hidayah-Nya serta ilham yang diberikan kepada penyusun dalam berekreasi.
2. Kedua orang tua penyusun yang telah menjadi guru pertama dalam kehidupan ini, Ibunda Warjiah (alm) dan Ayahanda Damin (alm) serta kedua mertua saya H. Ridlwan A. Nur dan Hj. Zumaroh. Isteriku Nur Latifah, anaku Vania dan Elviana, kakak dan adikku, serta keluarga semua

yang telah banyak memberikan motivasi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta.
8. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
9. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
10. Para staf dan karyawan PPs MSI UII yang telah banyak membantu dan melayani penulis dalam penyusunan tesis ini.
11. Kawan-kawan seperjuangan Ekonomi Islam MSI UII angkatan tahun 2008.
12. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun disebutkan satu persatu yang

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesainya tesis ini.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah semata karena kebodohan penulis. Dan bila dalam tesis ini terdapat kebenaran, semua semata karena ridho, tuntunan dan petunjuk Allah SWT, Sang Maha Pencipta nan sempurna. Demikianlah semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 22 Agustus 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a series of loops and a final flourish.

Tarmidzi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	ج	-
ح	Hā'	.h	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	/. (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	.s	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	.d	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	.z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-

ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwū	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyyā
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyyā
----------------	---------	--------------------

IV. Vokal Pendek

-----?----	Fathah	Ditulis	A
* -----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ftnmmnh		N

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fafhah + ya ' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya ' mati كريم	ditulis ditulis	Ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya ' mati يبئكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Uu Qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qu' ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>
--------	---------	------------------

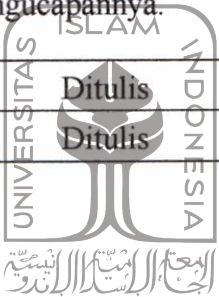
b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sam ā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفؤوس	Ditulis	<i>zawi al-fur ū d</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	 17
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu	31
2. Tindak Lanjut Penelitian	32
B. Landasan Teori	32
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	32
a. Sejarah Singkat PNPM Mandiri	32
b. Pengertian PNPM Mandiri	34
c. Tujuan PNPM Mandiri	35
d. Strategi PNPM Mandiri	36
e. Prinsip Dasar PNPM Mandiri	38
f. Pendekatan Program PNPM Mandiri	39
g. Komponen Program PNPM Mandiri	40
h. Ruang Lingkup Program PNPM Mandiri	42
i. Kategori Program PNPM	43
2. Pemberdayaan Masyarakat	43
a. Pemberdayaan	43
b. Masyarakat	48
3. Kemiskinan	51
a. Definisi Kemiskinan	51
b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	59
c. Gejala-gejala Kemiskinan	68
d. Agama dan Masalah Kemiskinan	70
e. Penanggulangan Kemiskinan dalam Islam	83

4. Karakteristik Ekonomi Islam	97
a. Ilahiyah.....	97
b. Akhlak.....	99
c. Kemanusiaan.....	100
d. Keseimbangan.....	102
BAB III METODE PENELITIAN	104
A. Jenis Penelitian	104
B. Lokasi dan Objek Penelitian	105
C. Teknik Pengumpulan Data	106
D. Triangulasi	107
E. Metode Analisis Data	108
F. Pendekatan Penelitian	109
BAB IV HASIL PENELITIAN	111
A. Gambaran Umum Kelurahan Simbang Kulon	111
1. Keadaan Geografis	111
a. Letak	111
b. Kondisi Geografis	111
2. Keadaan Demografi	112
a. Kondisi Sosial-Kependudukan	112
b. Kondisi Sosial-Kependudukan	112
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian	113
d. Penduduk Menurut Agama	115
B. Bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	116
1. Konsep dan Bentuk PNPM Mandiri Berdasarkan Teori	116
a. Akar Penyebab Kemiskinan	116
b. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan	118
c. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya)	121
2. Bentuk-bentuk PNPM Mandiri Berdasarkan Kelurahan Simbangkulon	123
a. Proses Pelaksanaan PNPM Mandiri	123
b. Program Pengentasan Kemiskinan BKM Telaga Artha - Simbang Kulon	138
c. Paguyuban Relawan	151
C. Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)	152
D. Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri	153
E. Pandangan Masyarakat Terhadap PNPM-Mandiri	159
BAB V ANALISI PNPM-MP DALAM EKONOMI ISLAM	163
A. Konsep Penanggulangan Kemiskinan dalam PNPM-MP	163
B. Implementasi PNPM-MP di Kelurahan Simbang Kulon	170
C. PNPM-Mandiri dalam Pandangan Ekonomi Islam	178
D. Refleksi	193
BAB VI PENUTUP	203
A. Kesimpulan	204

B. Saran-saran 205

DAFTAR PUSTAKA 207

LAMPIRAN-LAMPIRAN 216

CURRICULUM VITAE 220



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	010
Tabel 1.2 Implementasi BLM BKM/LKM Telaga Artha	011
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur	113
Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	114
Tabel 4.3 Struktur Organisasi BKM Telaga Artha 2007-2010	130
Tabel 4.4 Perencanaan Jangka Menengah Pronangkis Renta Th. 2010	135
Tabel 4.5 Implementasi BLM dalam Kegiatan Infrastruktur tahun 2008-2010	140
Tabel 4.6 Implementasi BLM dalam Kegiatan Sosial tahun 2008-2010	141
Tabel 4.7 Neraca UPK BKM Telaga Artha	144
Tabel 4.8 Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan	154
Tabel 4.9 Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM	155
Tabel 4.10 Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir	157

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR

Grafik. 1.1. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	002
Gambar 4.1. Pandangan P2KP tentang Akar Penyebab Kemiskinan	118
Gambar 4.2. Intervensi P2KP dalam Penangan Kemiskinan	120
Gambar 4.3. Penangan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui P2KP	120



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari fenomena gaungnya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat yang diejawantahkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). merupakan penelitian kualitatif, memaparkan tentang implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan normatif. Karena penelitian ini penelitian lapangan maka data diperoleh dengan cara mendatangi secara langsung obyek yang diteliti dengan meneliti dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan logika deduksi.

Dari hasil analisis itulah kemudian disimpulkan bahwa: *Pertama*, Penanggulangan kemiskinan harus bertitik tolak dari penanganan akar penyebab kemiskinan itu sendiri terlebih dahulu, konsepsi PNPM-Mandiri memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang keluar dari fitrah atau luntarnya nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, adil dll), sehingga perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.

Kedua, Implementasi PNPM-Mandiri mendasarkan pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, sebagai modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. (a). Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*); diejawantahkan dalam kegiatan sarana dan prasana fisik, (b) Pengembangan Masyarakat (*Social Development*); yaitu kegiatan sosial dan terakhir adalah (c) Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*); direalisasikan dengan kegiatan ekonomi perguliran.

Ketiga, bahwa PNPM-Mandiri dari sisi implementasi dalam hal ekonomi perguliran masih menggunakan skim yang menganut sistem ekonomi konvensional yang masih mengandung *riba* dan *gharar*, baik dilihat dari praktek UPK maupun fakta dana BLM yang merupakan dana *Loan Bank Dunia*, sehingga mungkin kemiskinan dapat ditanggulangi dengan PNPM-Mandiri pada masa sekarang namun dimasa yang akan mendatang akan menciptakan kemiskinan yang baru dan lebih massive.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.

Semenjak kemerdekaan diproklamlirkan hingga saat ini, ternyata Indonesia selalu dilanda krisis ekonomi dan sosial. Pemerintah demi pemerintah yang silih berganti ternyata tidak mampu membangun sebuah perekonomian yang kokoh, memakmurkan, mensejahterakan dan adil bagi seluruh rakyat. Sebelum mencapai kemerdekaannya, dalam waktu yang tidak sebentar masyarakat Indonesia juga menderita dalam genggaman kolonialisme. Ketika negara penjajah hengkang dari bumi nusantara, mereka membawa berbagai kekayaan serta tidak meninggalkan apapun, kecuali penderitaan yang tak akan terlupakan sepanjang masa.¹

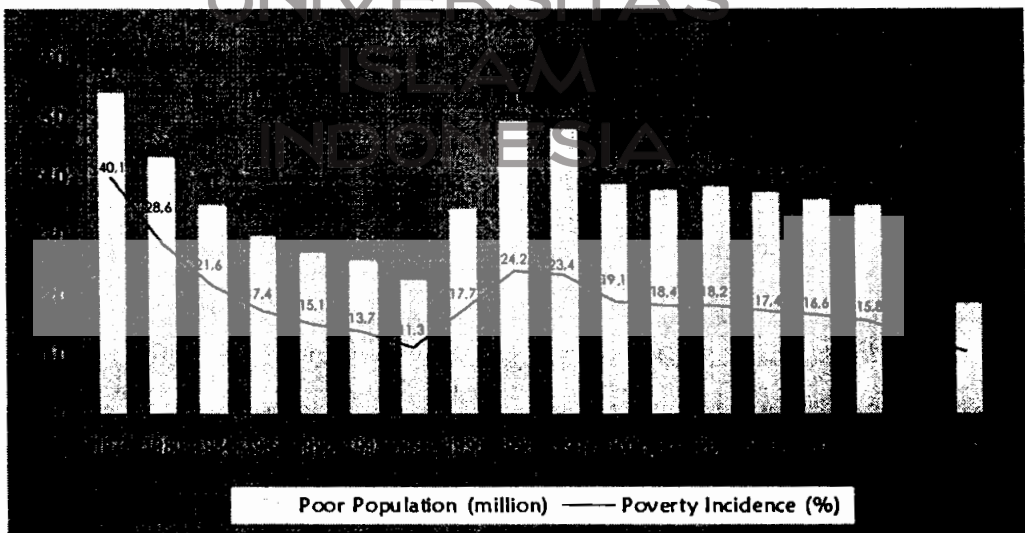
Krisis ekonomi yang berawal dari depresiasi rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan 1997 benar-benar menjadi pembenar atas berbagai kritik terhadap prestasi pembangunan ekonomi selama pemerintah Orde Baru. Meskipun semula krisis ini merupakan *contagion effect* dari depresiasi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS, tetapi karena fundamental perekonomian Indonesia rapuh maka dampak krisis ini lebih dahsyat sementara proses *economic recovery*-nya berjalan amat lamban. Krisis ini telah mengoyak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bahkan tidak hanya pada sendi perekonomian, tetapi jauh menyentuh berbagai aspek. Indonesia kini

¹ Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. ix.

terjerumus kepada kondisi krisis yang lebih parah daripada krisis pada dekade 1960-an.²

Statistik kemiskinan di masa krisis moneter dan ekonomi yang waktu itu melanda Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan “nyaris miskin” relatif masih besar. Pada tahun 1996 sekitar 11 % penduduk Indonesia atau sejumlah kira-kira 22 juta jiwa dalam situasi “miskin” dan “nyaris miskin” ini hanya sekitar 10 % saja dari jumlah penduduk waktu itu. Di masa puncak krisis moneter dan ekonomi waktu itu (tahun 1998), sekitar 90 juta jiwa rakyat Indonesia berada dalam situasi “nyaris miskin” dan sekitar 25,5 juta jiwa atau sekitar 13 % nya berada dalam situasi “miskin”. Sensitivitas meningkat; laju penurunan jumlah penduduk miskin melambat, Gini Rasio melebar; terutama situasi ini terjadi di wilayah perkotaan.³

Grafik.1.1. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan



Sumber: Modul Pelatihan Dasar Fasilitator Kelurahan PNPM-P2KP, KMW SWK-VI Jawa Tengah 2004.

² *Ibid.*, hal. xiii.

³ Modul Pelatihan Dasar Fasilitator Kelurahan PNPM-P2KP, *Konsep PNPM-P2KP*, KMW SWK-VI Jawa Tengah, 2004. hal. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup kepada umat manusia baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun kehidupan kemasyarakatan. Sumber ajaran Islam adalah al-Qur' ān dan Sunnah Rasul. Islam menyediakan mekanisme ijtihad untuk mendalami pemahaman menuju penerapan ajaran-ajarannya dalam realitas sosial dan untuk memecahkan masalah-masalah baru yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hal tersebut diungkapkan oleh Zubaedi dalam bukunya yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren".

Sebab bila dilihat dari kajian *maqāsid al-syari'ah* dalam wacana fiqh Indonesia kontemporer asy-Syatibi. Bahwa bertitik tolak dari pandangan beliau bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.² Tak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mala yutaq* (membebani sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Tujuan Allah dalam pembuatan hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia

¹ Zubaedi., *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 7

² Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, tt, I), hal. 195

dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka.³ Kemaslahatan yang ingin direalisasikan Islam adalah kemaslahatan hakiki yang rujukannya adalah menjaga lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan yang menjadi pilar penting bagi kehidupan manusia.⁴ Dalam rumusan asy-Syatibi, *maqāsid al-syari'ah* dirinci dalam tiga varian yang disebut *kulliyat al-syari'ah* yaitu *darūriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.⁵ Di dalam *darūriyyah* ditunjukkan tujuan syari'ah adalah menjaga lima hal (*darūriyyah al-khams*) yakni *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta) dan *al-'aql* (akal pikiran).⁶ Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsure pokok secara sempurna maka ketiga tingkat *maqāsid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, tingkat *tahsiniyyah* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajjiyah*. Sedangkan *darūriyyah* menjadi pokok *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.⁷

Hal yang bersifat primer (*darūriyyah*) adalah sesuatu yang wajib adanya dan menjadi dasar dalam menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya sesuatu itu, maka keharmonisan hidup manusia akan terganggu, tidak terealisasi kemaslahatan hidup dan membuat kerusakan-kehancuran bagi manusia. Hal yang bersifat sekunder (*hajjiyah*) adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk memuat ringan, mudah dan nyaman manusia

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dakwah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1986), hal. 197

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-fikr al-'Araby, 1958), hal. 367

⁵ Asy-Syatibi, *ibid*, II, hal. 8

⁶ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Selangor, Pelanduk Publication, 1989, hal. 344. Menurut Hasim Kamali, *The masalih in general are divided into three types, namely the essentials (daruriyyat), the complementary (hajjiyat) and embellishment (tahsiniyyat)* The Shari'ah in all of its parts aim at the realization of one or other of these *masalih*.

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 72.

dalam menanggulangi beban dan kesulitan hidupnya.⁸ Adapun kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*) adalah sesuatu yang berupa norma, tatanan hidup dan aturan berperilaku baik yang berlaku dalam kehidupan manusia sesuai akal sehat dan kesucian naluri. Hal-hal *tahsiniyyah* berpangkal dari akhlak mulia, tradisi yang lebih baik dan segala tujuan kehidupan manusia yang baik, sehingga Islam sangatlah konsen terhadap semua permasalahan kehidupan kemasyarakatan, seperti masalah ketidakadilan, ketertindasan, dan kemiskinan.

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendunginya, serta mengawasi kemungkinannya, guna menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk memujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.⁹ Hal tersebut diutaraka oleh Muhammad Yusuf Al-Qardawy dalam bukunya yang berjudul *Musykilatul Fakri Wa-Kaifa 'Alajahal Islam*.

Kemudian M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”, mengatakan ajaran Islam memiliki komitmen yang sistemik terhadap penghapusan kemiskinan. Kebebasan dari kelaparan (*amana min ju'i*) dan kebebasan dari rasa takut (*amana min khauf*) adalah dua hak azasi manusia yang selalu disebut dalam Al-Qur'ān. Pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu zakat. Di antara sasaran zakat yang peting adalah, (1). Orang fakir (*the*

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul*, hal. 199

⁹ Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, penerjemah Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hal. 51.

distitute), (2). Orang miskin (*the poor*), (3). Mereka yang dibelenggu dalam perbudakan (ditindas), dan (4). Mereka yang dililit hutang.¹⁰

Menurut Budi Soeradji dan Mubyarto mengatakan bahwa “Penanggulangan kemiskinan yang bertumpu kepada peran serta aktif dan produktifitas rakyat, diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Masyarakat miskin dapat dipercaya penuh untuk merumuskan kebutuhan mereka yang mendesak dan mendasar. Ini berarti mendorong penduduk miskin yang pada umumnya hidup di daerah perdesaan maupun perkotaan, agar semakin memahami dan semakin mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya”.

Beliua juga mengatakan “Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguatan penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatannya sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan”.¹¹

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, merupakan estafet dari Program Penanggulangan Kesiskinan di Perkotaan

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.445.

¹¹ BAPPENAS, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan; Laporan Penelitian di Daerah-daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1998), hal. 1-3.

(P2KP) yang telah dirintis mulai tahun 2007, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencaapaian sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)* sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.¹²

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.¹³

Penelitian tentang program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan model pemberdayaan masyarakat secara umum telah banyak dilakukan. Namun secara spesifik yang berkaitan dengan judul yang penulis kaji belum ada, apalagi bila dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini antara lain adalah:

Pertama, Angga Harahap, 2010. Skripsi yang berjudul: Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

¹² Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, edisi revisi, Jakarta, 2009, hal. 3.

¹³ *Ibid.*, hal. 1.

Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), ia menyimpulkan bahwa: (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat pedesaan. (2) PNPM-MD sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat kompleksitasnya masalah kemiskinan yang ada, yaitu sebagai alat memperoleh informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap program pembangunan, dan sebagai wadah penyaluran hak demokrasi.¹⁴

Setelah melakukan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan baik pada tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasannya cukup baik. Program ini juga

¹⁴ Angga Harahap, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), Sekripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. x

dapat dikatakan membawa perubahan yang positif baik dari segi lingkungan, pembangunan manusia, dan perihal pemberdayaan masyarakat. Namun, ada sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kelompok. Artinya, tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan tujuan kesejahteraan kelompok melainkan karena upah atau imbalan.¹⁵

Kedua, Igit Suyanto, 2007, skripsi berjudul: Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang. Ia menyimpulkan: (1) Penyebab kurang maksimalnya implementasi program antara lain prosedur penyaluran pinjaman yang berjalan terlalu bersifat formal. Terbatasnya fasilitas yang tersedia turut memberikan kontribusi bagi kelancaran distribusi program, jauhnya jarak antara tempat pengajuan kredit dengan desa tempat tinggal, belum tersedia tempat-tempat disekitar desa yang memungkinkan mereka untuk mengakses pinjaman dengan lebih mudah. Kondisi rendahnya tingkat pendapatan merupakan faktor utama keterlambatan pengembalian pinjaman. Kaum nelayan dalam sekali melaut terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali, sementara harga bahan bakar melambung tinggi sehingga sulit untuk membayar tepat waktu. Penekanan pada kepentingan lembaga yang dilakukan koperasi LEPPM3 menjadikan distribusi program bias terhadap sasaran dan tujuan utama program.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Igit Suyanto, "Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang", skripsi UNDIP Semarang, 2007. hal. 17

(2) Walaupun secara umum telah ada kemauan dari petugas untuk melakukan tugas sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program namun pemahaman tersebut hanya dibatasi pada kepentingan institusional. Benturan kepentingan pengembangan lembaga menyebabkan segmen nelayan yang termiskin umumnya tidak menerima bantuan apapun dari program PEMP. Benturan kepentingan antara petugas dalam pengembangan lembaga koperasi penyalur dana PEMP secara tidak langsung menumbuhkan jarak dengan masyarakat sasaran program. Jarang sekali ada pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Petugas hanya mementingkan pada aspek finansial semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat. Petugas yang ada dirasa sangat kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat pesisir yang membutuhkan, petugas enggan terjun langsung kepada masyarakat dengan akses transportasi jauh dari tempat kantor koperasi nelayan berada sehingga terkesan mobilisasi petugas rendah.¹⁷

Dalam hal pinjaman, sikap petugas cenderung selektif terhadap warga masyarakat pesisir terlebih kepada yang dinilai tidak mampu, padahal sebagian masyarakat pesisir nelayan tidak menentu penghasilannya. Aspek keadilan dalam pemberian pinjaman maupun pemberian sanksi tidak merata, konsekuensi yang harus diterima petugas adalah pengabaian pada peraturan menjadi fleksibilitas yang kurang pro terhadap kaum pesisir miskin. Berbagai variasi masalah lokal seperti yang tercermin dalam pelaksanaan program di

¹⁷ *Ibid.*,

kelurahan Tanjungmas menuntut adanya langkah proaktif pemerintah bagi tercapainya keberdayaan dan geliat aktifitas ekonomi masyarakat pesisir.¹⁸

(3) Tingkat komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjungmas dapat dikatakan kurang baik. Akses pada sumber-sumber informasi bersifat terbatas hanya pada golongan tertentu yang dinilai memiliki kelayakan usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman. Bahwa memang belum ada penyuluhan secara terbuka yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan yang pernah mereka alami. Kemampuan petugas melakukan pendekatan hanya sebatas konseptual namun tidak dibarengi dengan aplikasi yang nyata kepada para responden. Dilihat dari intensitas sosialisasi program yang masih rendah dan jarang sekali dilakukan, informasi menurut para responden hanya diberikan pada saat adanya pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan kehadiran para pejabat tinggi namun setelahnya hampir tidak ada sama sekali. Proses interaksi dan keteranganketerangan yang diberikan oleh petugas, hanya mengedepankan informasi tentang batas waktu atau jatuh tempo pembayaran pinjaman sehingga keterlibatan masyarakat secara langsung didalam program PEMP terkesan terbatas. Metode komunikasi yang dilakukan pada masyarakat pesisir Tanjungmas dinilai kurang tepat sehingga perlu dilakukan metode yang lebih efektif sehingga harmonisasi antara tujuan dan implementasi dapat tercipta dengan baik.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 18.

¹⁹ *Ibid.*,

Ketiga, Bayu Trianggara Permana, 2008, skripsi berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo. Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat keberdayaan masyarakat dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari partisipasi atau peran serta masyarakat pegetasan kemiskinan. Kemudian jika dilihat dari implementasi programnya maka ada tiga aspek peningkatan yaitu pertama, dari sudut pandang sarana dan prasarana, kedua, dari sudut pandang ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi perguliran di masyarakat, dan ketiga, adalah kegiatan sosial.²⁰

Keempat, Gregorius Sahdan, dalam penelitiannya yang berjudul “Menanggulangi Kemiskinan Desa”. Dijelaskan dalam penelitian ini, untuk membuat sebuah strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama kemiskinan masyarakat desa. Dari serangkaian penyebab kemiskinan masyarakat desa yang telah disebutkan, maka strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan dalam penelitian ini adalah: (1) Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, secara gratis dan cuma-cuma. (2) Reditribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. (3) Mendorong perkembangan investasi pertanian dan

²⁰ Bayu Trianggara Permana, 2008, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, hal. ix

pertambangan ke daerah pedesaan. (4) Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah. (5) Memenuhi kebutuhan sandang. (6) Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai. (7) Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kepada masyarakat desa yang miskin dan terbelakang. (8) Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. (9) Memperkuat komitmen eksekutif dan legislative untuk memperbaiki tatanan pemerintah. (10) Mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas.²¹

Kelima, Ginadjar Kartasasmita, 1996, dalam penelitiannya yang berjudul: *Power dan Empowerment: Sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan masyarakat*, menyimpulkan bahwa: (1) Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada program-program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. (2) Melalui pemberdayaan, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya. Ia tidak lagi harus menyerah kepada nasib, bahwa kemiskinan adalah bukan takdir yang

²¹ Gregorius Sahdan, "Menanggulangi Kemiskinan Desa", di kutip dari [http://www.ekonomirakyat.org/Jurnal Ekonomi Rakyat/](http://www.ekonomirakyat.org/Jurnal%20Ekonomi%20Rakyat/) accessed Agustus 2011.

tidak dapat diatasi. Pemberdayaan masyarakat akan membawa masyarakat ke dalam zaman baru memasuki kehidupan modern. Ia akan meninggalkan kebiasaan dan nilai-nilai lama (nilai-nilai tradisional) yang tidak relevan dan menghambat kemajuan kehidupannya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, disiplin, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok upaya pemberdayaan ini.²²

Keenam, Drs. Bakhtiar Khobir UII Yogyakarta tahun 2002, dalam tesisnya yang berjudul *.(Petani Dan Kemiskinan) studi Mengenai Upaya Petani dalam meningkatkan Kesejahteraan keluarga di kecamatan Singaparna, kabupaten tasikmalaya)*, mengatakan bahwa, Petani dan Kemiskinan merupakan dua sisi yang berbeda, namun keduanya senantiasa melekat. Petani selalu identik dengan kemiskinan. Akan tetapi tidak semua petani itu miskin. Oleh karena itu, persepsi mereka tentang kemiskinan sangatlah berbeda satu sama lainnya.

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya petani dalam meningkatkan kesejahteraannya guna mengentaskan kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. pemikiran dari penelitian ini berangkat dari sabda Rasulullah saw., yang mengatakan bahwa kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran.²³

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa persepsi petani di kecamatan Singaparna mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan termasuk

²² Ginadjar Kartasmita, "Power dan Empowerment" dikutip [www.ginadjar.com/public/Power dan Empowerment](http://www.ginadjar.com/public/Power%20dan%20Empowerment). accessed Juli 2011.

²³ Bakhtiar Khobir, "Petani Dan Kemiskinan; studi Mengenai Upaya Petani dalam meningkatkan Kesejahteraan keluarga di kecamatan Singaparna, kabupaten Tasikmalaya)", *Tesis Magister Studi Islam*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2002, hal. 12.

kategori rendah. Adapun upaya yang dilakukan oleh petani di kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mengentaskan kemiskinan yaitu melalui pendapatan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan kendala petani dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya meliputi; keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha, kurangnya peranan pemerintah, rendahnya potensi alam.

Pemberdayaan masyarakat membuka pintu pada proses akulturasi, yaitu perpaduan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang menggambarkan jati diri. Nilai lama yang relevan dapat tetap dipertahankan, karena diyakini tidak perlu mengganggu proses modernisasi yang berlangsung dalam dirinya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu warga masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya. Melalui proses budaya itu pula keberdayaan masyarakat akan diperkuat dan diperkaya, dan dengan demikian akan makin kuat pula aksesnya kepada sumber *power*. Melalui proses spiral itu, maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, karena konstelasi kekuasaan sudah dibangun di atas landasan pemerataan.²⁴

Ketujuh, Supriyadi, ST UII Yogyakarta tahun 2002, dalam tesisnya yang berjudul, Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan upaya pengetasannya dalam perspektif Islam (Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta). Dia

²⁴ *Ibid.*,

mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi bukan karena factor tidak adanya produksi atau pembuatan barang-barang yang dibutuhkan, namun lebih dikarenakan distribusi pendapatan yang timpang antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Demikina juga bukan karena masyarakat miskin tersebut malas bekerja, namun hal yang lebih mendasar adalah karena kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak adil, demikian juga struktur sosial, politik masyarakat yang tidak kondusif terhadap upaya agar masyarakat terlepas dari kemiskinan. Namun kesimpulan dari peneliti kemiskinan yang terjadi di daerah penelitiannya adalah factor struktural, yaitu kondisi sosial-ekonomi-politik yang tidak kondusif, dan juga budaya kemiskinan masyarakat.²⁵

Kedelapan, Miftakhul Choiri UII Yogyakarta tahun 2008, dalam tesisnya yang berjudul *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Aset*. Dia mengatakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis asset membutuhkan tidak hanya sebuah cara berpikir tentang kebijakan, tetapi juga cara baru berfikir tentang struktur kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis asset tidak hanya masalah program sosial, tetapi sebuah kerangka kebijakan yang menggabungkan usaha kebijakan yang begitu banyak kedalam satu sistem.

Sistem ini diharapkan dapat didesain sehingga usaha kesejahteraan berbasis aset yang dilakukan oleh pemerintah, dunia bisnis, organisasi non-profit, dan keluarga bersatu dan saling melengkapi. Sistem ini diharapkan

²⁵ Supriyadi, "Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Upaya Pngetasannya dalam Pespektif Islam (Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta)" *Tesis Magister Studi Islam*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2002, hal. 7.

dapat tumbuh dan beradaptasi, memfasilitasi terobosan, melewati kegagalan dan mengembangkan usaha yang sukses dalam program pengentasan kemiskinan.²⁶

Dari semua penelitian yang telah penulis telusuri dan telaah, ternyata dengan berbagai pendekatan dalam penelitiannya khususnya mengenai penanggulangan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan, belum ada yang membahas akar masalah dari kemiskinan itu sendiri yang paling mendasar serta belum ada satu pun yang membahas dari sudut pandang ekonomi Islam terlebih lagi yang membahas secara khusus konsep dan implementasi PNPM-Mandiri dalam ekonomi Islam.



2. Tindak Lanjut Penelitian

Untuk tindak lanjut penelitian yang hendak dilakukan peneliti yakni mengkaji implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri dalam pengentasan kemiskinan dari sudut prespektif ekonomi Islam, secara deskriptif eksploratif.

Penelitian ini akan dikembangkan dengan mengeksplorasi konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNMP-MP) atau yang semula dinamai dengan Program Penanggulaangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu “proyek” merupakan sutau upaya pemerintah yang bermuara kepada “program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai

²⁶ Miftakhul Choiri, “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Aset”, UII Yogyakarta tahun 2008, *Tesis Magister Studi Islam*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2002, hal. 87.

investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta implementasinya dilapangan yang telah berjalan, kemudian melalui pendekatan fenomenologi dan pendekatan normatif diformulasikan dengan konsep serta karakteristik ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

Secara umum, kaitanya dengan penelitian ini penulis berpijak pada beberapa teori khususnya yang berkaitan dengan teori pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

a. Sejarah Singkat PNPM Mandiri

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut (*secara generic disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM*) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemnafaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perncaanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakasa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakrasa masyarakat, BKM-BKM ini mulai mejalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari

masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun tersebut PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Maka semenjak tahun 2008 secara keseluruhan penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).²⁷

b. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam

²⁷ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman*. hal. 3.

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.²⁸

c. Tujuan PNPM Mandiri

1) Tujuan Umum

Tujuan program PNPM ini secara umum adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Kemudian untuk tujuan khususnya di bawah ini.

2) Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari PNPM yaitu:

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,

²⁸ Tim Pengendali PNPM Mandiri, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, (Jakarta: 2008). hal.11

program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok setempat dalam menaggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial budaya serta melestarikan kearifan local.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.²⁹

d. Strategi PNPM Mandiri

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

1) Strategi Dasar

- a) Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

²⁹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman*., hal. 59.

- b) Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersamasama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c) Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2) Strategi Operasional

- a) Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b) Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
- c) Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d) Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- e) Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
- f) Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.³⁰

³⁰ Tim Pengendali PNPM Mandiri, *Pedoman Umum*, hal. 12

e. Prinsip Dasar PNPM Mandiri

PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- *Bertumpu pada pembangunan manusia.* Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- *Otonomi.* Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- *Desentralisasi.* Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- *Berorientasi pada masyarakat miskin.* Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- *Partisipasi.* Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- *Kesetaraan dan keadilan gender.* Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- *Demokratis.* Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

- *Transparansi dan Akuntabel.* Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- *Prioritas.* Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- *Kolaborasi.* Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- *Keberlanjutan.* Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- *Sederhana.* Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.³¹

f. Pendekatan Program PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

³¹ *Ibid*, hal. 13.

- 1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- 2) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- 3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- 5) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.³²

g. Komponen Program PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

³² *Ibid*, hal. 14.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.³³

h. Ruang Lingkup Program PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- 1) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan
- 2) ekonomi secara padat karya;
- 3) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
- 4) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;

³³ *Ibid*, hal. 16-17.

- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.³⁴

i. Kategori Program PNPM

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
- 2) PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.³⁵

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan

Sebelum menerangkan teori atau landasan penelitian, akan diterangkan beberapa model pemberdayaan masyarakat :³⁶

1. Pengembangan masyarakat lokal

³⁴ *Ibid*, hal. 17.

³⁵ *Ibid*, hal. 16.

³⁶ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hal. 42.

2. Perencanaan Sosial

3. Aksi sosial

Selain itu, ada beberapa model pemberdayaan yang digunakan dalam pemberdayaan semisal untuk masyarakat miskin perkotaan. Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, meliputi :³⁷

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pembentukan unit Pembinaan Keluarga Miskin
3. Pengembangan Usaha Kecil Menengah
4. Perbaiki Rumah
5. Perbaiki Prasarana Lingkungan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang termasuk pada model pengembangan sumber daya manusia, karena pelaksanaannya berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini ada teori yang dijadikan landasan penelitian ini yaitu : Teori Sumber Daya Manusia, karena pemberdayaan yang dilakukan oleh program PNPM terkait dengan masalah sumber daya manusia yang ada di masyarakat khususnya yang di motori oleh lembaga yang generic dari masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat.

Teori sumber daya manusia menyediakan bermacam-macam *Tools* yang dapat digunakan untuk, antara lain :³⁸

³⁷ Rr. Suharatini, dkk. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), hal. 12.

1. Mengidentifikasi masalah sumber daya manusia, mengetahui masalah sumber daya manusia yang terjadi di masyarakat sebelum di laksanakannya aksi social yaitu aksi pendampingan.
2. Menerangkan gejala sumber daya manusia , menjelaskan tentang gejalagejala yang terjadi di masyarakat tersebut.
3. Meramalkan hal-hal yang dapat atau akan terjadi dibidang sumber daya manusia, membuat kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi di masyarakat tersebut.
4. Memberikan solusi terhadap masalah sumber daya manusia , mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada di masyarakat tadi. Sehingga dari kegiatan aksi tadi membuahkan hasil.

Setiap unit teori merupakan konstruk beberapa konsep tentang sumber daya manusia yang relevan, temuan dan aplikasi berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Teori sumber daya manusia dikonstruksikan dari sejumlah konsep yang disumbangkan oleh berbagai disiplin ilmu yang berlangsung mempengaruhi sumber daya manusia.

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berfikir, sikap, tindakan, yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah

³⁸ Taliziduhu Ndraha. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 5.

pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *Interchangeable* atau dapat dipertukarkan.³⁹ Kartasasmita mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Selain itu, Kartasasmita juga menyimpulkan bahwa upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti : modal, teknologi, informasi dan pasar. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektifis dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main) dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

³⁹ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)., hal. 41.

Proses pemberdayaan yang dilakukan harus memuat dua unsur, meningkatkan kesadaran kritis dan upaya menstranformasikan struktur sosial yang menindas. Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendamping sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.⁴⁰

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

⁴⁰ Edi Suharto. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. http://www.policy.hu/suharto/modul/_a/makindo

Dimana indikator pemberdayaan telah dijelaskan sebelumnya. Dan pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dijadikan salah satu tolehan solusi. Dalam bahasa yang lebih gamblang pengembangan *civil society* merupakan kondisi niscaya yang perlu dibumikan secara kukuh di negeri ini.⁴¹

b. Masyarakat

Ada yang menerangkan tentang pengertian masyarakat, yaitu kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan atau lingkungan sosial. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁴² Selo Soemardjan, menyatakan : masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Pada hakikatnya pengertian masyarakat mencakup ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya sejumlah orang (manusia)
- b. Mendiami daerah tertentu (ada batas batas wilayah)
- c. Mempunyai warisan sosial (*social heritage*)
- d. Mempunyai rasa kesatuan

⁴¹ Abd A'la. *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006),. hal. 43.

⁴² S. Imam Asy'ari. *Pengatntar Sosiolog* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hal. 46.

Masyarakat dapat menunjukkan pengertian lingkungan kecil, dan dapat pula menunjukkan pengertian lingkungan besar. Suatu desa adalah satu masyarakat, demikian juga satu kecamatan, satu kabupaten, satu propinsi, negara, bahkan dunia juga merupakan satu masyarakat (masyarakat dunia). Dengan demikian batas pengertian masyarakat tergantung kepada unit kesatuan lingkungan yang tercakup dalam kerangka acuan (*reference*) seseorang. Dalam bahasa Inggris kata masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam *community* n *society*. Perbedaan terletak didalam penggunaannya. *Community* mencakup pengertian masyarakat yang lebih kecil, sedangkan *society* mencakup pengertian masyarakat yang luas (besar).

Tumpuhan pokok dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat yang mengandung arti upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.⁴³

Berangkat dari pemahaman PNMP Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan

⁴³ Tim Pengendali PNPM Mandiri, *Pedoman*, hal, 11.

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, maka dengan penelitian ini ada dua aspek yang akan menjadi konsep bidikan, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia, menawarkan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dan tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Dan meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Menurut Soerjono Soekanto,⁴⁴ yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan yang disebut disini adalah dalam arti ekonomi. Yaitu keadaan "serba kekurangan"⁴⁵ dalam hal material.

Merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan, nampaknya bukanlah suatu hal yang mudah. Karena selain kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks, juga karena masing-masing pembuat definisi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kerangka pemikiran dan fokus perhatiannya dalam melihat masalah kemiskinan.

Diantara definisi tentang kemiskinan, menurut Nabil Subhi Ath-Thawali adalah "tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan itu dianggap pokok, karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang laik dengan tingkat kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya."⁴⁶

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Xviii, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 167.

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 652.

⁴⁶ Nabil Subhi Ath-Thawali, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Terjemahan Muhammad Bagir, cet. I. (Bandung: Mizan, 1985), hal. 36.

Definisi lainnya yang senada diberikan F. Magnis Suseno, S.J. Yaitu "dalam arti, bahwa orang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi."⁴⁷

Kedua definisi tersebut menitik beratkan pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok yang minimal untuk dapat hidup secara layak atau manusiawi. Yang masih belum terumuskan dalam definisi tersebut adalah mengenai tingkat ukuran kebutuhan dasar dan tingkat kehidupan yang layak atau manusiawi.

Karena adanya permasalahan ukuran tingkat kebutuhan tersebut, Neils Mulder membuat definisi tentang kemiskinan: "yang tidak sampai pada suatu tingkatan kehidupan yang minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengukap taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukup dan wajar".⁴⁸ Tapi rumusan definisi tersebut oleh Mulder segera disusul dengan keterangan bahwa "konsep mengenai garis kemiskinan tersebut sukar didefinisikan".⁴⁹

Suatu definisi yang mencoba membuat ukuran batasa minimal standar tingkat kehidupan, diruuskan oleh Parsudi Suparlan sebagai berikut:

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu suatu tingkatan kekurangan materi pada

⁴⁷ F. Magnis Suseno, S.J. "Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis", dalam J.B. Banawiratman, S.J. (ed.) *Kemiskinan dan Pembebasan*, cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 37.

⁴⁸ Neils Murdel, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, cet. V (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), hal. 76.

⁴⁹ *Ibid.*

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam pandangan Masfuk Zuhdi⁵¹ kategori orang miskin terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. orang miskin adalah orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ia kekurangan modal usaha/bekerja.
2. orang miskin adalah orang yang tidak/belum mampu bekerja/berusaha, seperti orang yang lanjut usia, anak yatim, janda, penyandang cacat fisik atau mental.

Selanjutnya, dalam literatur hukum Islam, istilah "miskin" dibedakan dengan "fakir".⁵² Mengenai perbedaan kedua istilah tersebut, dari hasil telaah kitab fiqh, Ali Yafie membuat rumusan definisi miskin, ialah "yang memiliki harta benda atau mata pencaharian atau keduanya, hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokok".⁵³ Sedangkan yang disebut fakir ialah "mereka yang tidak memiliki sesuatu harta benda atau tidak mempunyai mata pencaharian tetap, atau mempunyai harta benda tetapi hanya menutupi kurang dari seperdua kebutuhan pokoknya".⁵⁴

Mengenai ukuran dan tingkatan pemilik harta dalam definisi miskin dan fakir tersebut, Ali Yafie menerangkan, umpamanya sebagai indek ditetapkan

⁵⁰ Parsudi Suparlan (ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, cet. I (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 12.

⁵¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet. IV (Jakarta: Haji Mas Agung), 1993, hal. 257.

⁵² Diantaranya seperti disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 103, yang menerangkan tentang *mustahiq* (yang berhak menerima) zakat.

⁵³ Ali Yafie, "Islam dan Problem Kemiskinan", *Pesantren*, (Jakarta: P3M, No.2/vol.III/1986), hal. 6.

⁵⁴ *Ibid.*

angka 10. Maka yang memiliki atau memperoleh penghasilan 5 sampai 9, dapat digolongkan miskin. Dan jika hanya memiliki atau hanya berpenghasilan 4 ke bawah, digolongkan sebagai fakir.⁵⁵

Sahri Muhammad mendefinisikan fakir sebagai berikut:

Orang fakir yaitu yang tidak memiliki alat produksi dengan pendapatan perharinya sangat rendah dan sengsara, tidak punya harta untuk memenuhi penghidupannya, termasuk pengangguran yang tidak memiliki modal kecuali tenaganya, yang berarti memerlukan lapangan kerja.⁵⁶

Di antara ulama madzhab sendiri terdapat perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai definisi miskin dan fakir tersebut. Menurut Syafi'i orang fakir ialah yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian. Dan orang miskin ialah yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, orang miskin ialah orang yang menurut Syafi'i disebut fakir. Dan orang fakir menurut Abu Hanifah ialah orang yang disebut miskin oleh Syafi'i.⁵⁷

Kemudian untuk memahami makna kemiskinan, minimal ada tiga konsep kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur berdasarkan ukuran pada orientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Sahri Muhammad, *Pengembangan zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi" Avicenna", 1982), hal. 27.

⁵⁷ Lihat: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur' ān, Departemen Agama R.I., *Al-Qur' ān dan Tafsirnya*, jilid IV (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1983/1984), , hal.168.

2. kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang didasarkan atas gagasan standar relatif kehidupan manusia dilihat dari dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Ukurannya adalah pertimbangan anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.
3. kemiskinan subyektif, yaitu kemiskinan yang dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Artinya, bisa saja orang yang tidak layak kehidupan ekonominya tidak mau dianggap miskin.⁵⁸

Dari beberapa definisi tentang kemiskinan tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang disebut dengan kemiskinan ialah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok bagi suatu tingkatan kehidupan yang layak menurut ukuran yang umum (biasa) berlaku pada masyarakat setempat.

Persoalan mengenai ukuran untuk menentukan batas kemiskinan, dalam ilmu-ilmu sosial dipergunakan tolok ukur tertentu. Ada beberapa tolok ukur yang digunakan, masing-masing bertolak dari fokus perhatian sudut permasalahan yang menjadi objek kajiannya. Dan dari kajiannya mengenai tolok ukur ini, muncul beberapa kategori atau klasifikasi tentang tingkat kemiskinan.

⁵⁸ Suyanto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 125-126.

Ada yang mengukur dengan income per-kapita atau pendapatan rata-rata per kepala. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan bahwa suatu masyarakat yang pendapatannya rata-rata per orang setahun kurang dari US\$ 300 digolongkan sebagai masyarakat yang miskin.

Tolok ukur lainnya yang biasa digunakan adalah melalui gizi. Kalau jumlah protein dan kalori seseorang atau masyarakat kurang jumlah tertentu maka dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin. Ada juga yang mengukurnya dengan tingkat rata-rata kematian (*deathrate*). Suatu masyarakat dikatakan miskin, jika angka rata-rata kematiannya cukup tinggi. Hal ini bertolak dari anggapan bahwa jika banyak orang yang meninggal, kemungkinan mereka kurang makan.⁵⁹

”Tolok ukur yang umum dipakai adalah berdasarkan atas tingkat pendapatan per waktu kerja. Tolok ukur lain adalah tolak ukur relatif perkeluarga...berdasarkan atas kebutuhan minimal yang seharusnya dipenuhi.”⁶⁰

Sayogjo memberikan tolak ukur untuk menentukan garis kemiskinan berdasarkan atas batas minimal jumlah kalori yang dikonsumsi per-orang yang diambil persamaannya dalam beras, dengan membedakan untuk desa dan kota. Atas dasar standar ukuran tersebut Sayogjo membagi tingkat

⁵⁹ Selo Sumarjan, “Kemiskinan Struktural dan Pembangunan”, dalam Alfian, *et.al.* (eds), *Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), hal. 6-7.

⁶⁰ Parsudi Suparlan (ed.), *Kemiskinan*, hal. 15

kemiskinan menjadi tiga tingkatan: "miskin", "miskin sekali" dan "paling miskin".⁶¹

Klasifikasi kemiskinan menurut Sayogjo tersebut dirumuskan dalam bentuk tabel oleh Sahri Muhammad sebagai berikut:⁶²

No	Klasifikasi tingkat kemiskinan	Tingkat konsumsi (beras) per kapita per tahun		Nilai Rupiah (ribuan) Rp. 150,-/kg. Beras
		Desa	Kota	
1.	Miskin	320 kg.	480 kg.	48 – 72
2.	Miskin Sekali	240 kg.	360 kg.	36 – 54
3.	Paling Miskin	180 kg.	270 kg.	27 – 40

Sedangkan menurut ukuran yang ditetapkan Bank Dunia/IMF tentang garis kemiskinan adalah berdasarkan tingkat pendapatan penduduk per kapita setahun sebesar US\$ 75 untuk daerah perkotaan dan US\$ 50 untuk daerah pedesaan menurut nilai dollar tahun 1973.⁶³

Demikian beberapa contoh tolok ukur yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk menentukan batas kemiskinan. Namun jika dihubungkan dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan serta patokan kebutuhan dasar bagi kehidupan, tampaknya tolok ukur tersebut masih jauh dari cukup untuk menggambarkan realitas permasalahan kemiskinan.

⁶¹ Sayogjo, "Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan", *Prisma*, LP3ES, No.3/VI/Maret 1977, hal. 10-11. Jakarta

⁶² Sahri Muhammad, *Pengembangan*., hal. 27..

⁶³ Lihat: S. Sunato Ndaru Mursito, "Meningkatkan Pendapatan Sektor Pertanian di Indonesia", dalam *Analisis*, CSIS, No.7/VII/Juli, hal. 586. Jakarta

Suatu kritik yang dilontarkan mengenai tolok ukur tentang garis kemiskinan dalam ilmu-ilmu sosial tersebut dikemukakan Neils Mulder, sebagai berikut:

Namun konsep mengenai garis kemiskinan tersebut sukar didefinisikan, dan kebanyakan usaha terpaksa berhenti pada definisi-definisi yang berkisar pada kecukupan makanan seperti diungkapkan oleh sejumlah kalori. Tetapi patokan-patokan mengenai kualitas makanan, pakian, perumahan, pendidikan, kesempatan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum (listrik, air minum, bus, sekolah, dokter dan seterusnya), jauh lebih sukar untuk didefinisikan ke definisi mengenai kemiskinan dan rencana-rencana pembangunan yang tepat.⁶⁴

Kesulitan lainnya dalam hal menentukan ukuran kemiskinan adalah karena pada tiap lingkungan tertentu dan pada tiap kurun waktu tertentu, masalah kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat berbeda-beda. Seseorang yang pada suatu masyarakat digolongkan miskin, mungkin pada masyarakat lainnya digolongkan tidak miskin.⁶⁵

Selanjutnya dapat dibedakan antara kemiskinan individual atau yang menimpa segelincir orang, dengan kemiskinan massal (*mass poverty*), yang menimpa suatu bangsa atau masyarakat dalam skala massive, seperti yang terjadi di Ethiopia dalam jumlah jutaan.⁶⁶

Dari gambaran mengenai pengertian dan ruang lingkup permasalahan kemiskinan seperti yang telah diuraikan, tampak bahwa permasalahan

⁶⁴ Neils Murdel, *Kepribadian*, hal. 76.

⁶⁵ Ahmad Sanusi, *Agama di tengah Kemiskinan; Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Prespektif Kerjasama Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 19.

⁶⁶ Lihat: John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*, terjemahan Tom Anwar, penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 11. Dan Toeti Heraty Noerhadi, "Agama dan Masalah Kemiskinan", paper dalam *Kollokium Agama dan Pembangunan IV*, tentang "Agama Menangani Masalah Kemiskinan", Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama, 11 Maret 1981. Toeti menggunakan istilah "kemiskinan per kasus" untuk membedakan dengan jenis "kemiskinan massal". Lihat juga, Sritua Arief, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, cet. II (Jakarta: LSP, 1987).

kemiskinan sangat kompleks, karena "dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dipunyai manusia dalam kehidupan".⁶⁷ Karena itu bukan hal mudah untuk merumuskan dalam suatu definisi dan diukur untuk menetapkan batasannya.

b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kompleksitas masalah kemiskinan terkait erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, maka analisis atau kajian mengenai penyebab terjadinya kemiskinan akan meliputi berbagai segi: sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, juga lingkungan alam dan sebagainya. Karena itu, kajian tentang penyebab kemiskinan, selain akan sangat dipengaruhi oleh bidang atau disiplin ilmu seseorang, juga akan dipengantung pada bentuk atau jenis kemiskinan itu sendiri.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dari segi sebabnya, kemiskinan dapat dibedakan antara kemiskinan temporer atau aksidental dan kemiskinan struktural. Atau antara kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

Kemiskinan temporal adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh cacat jasmani atau jiwa, atau akibat malapetaka yang menimpa seseorang.⁶⁸ Cacat jasmani atau mental dapat membuat seseorang tidak bisa bekerja, hingga dia

⁶⁷ Persudi Suparlan (ed.), *Kemiskinan.*, hal. 13.

⁶⁸ Lihat: Hidayat Nataatmaja, "Masalah Kemiskinan Ditinjau dari Ajaran Islam", dalam Amrullah Ahmad *et.al.* (eds), *Islamisasi Ekonomi*, PLP2M, Yogyakarta, 1985, hal. 109. Jenis Kemiskinan ini adalah seperti apa yang dimaksud dengan istilah "kemiskinan individu" dari Selo Sumardjan, atau "kemiskinan alamiah" dari Sinaga dan Benyamin, juga bagian dari istilah "kemiskinan per casus" dari Toety Heraty.

tidak produktif dan menjadi miskin. Demikian juga bencana alam dalam bentuk gunung meletus, atau serangan hama dan kemarau panjang yang menimpa kaum petani dapat menyebabkan kemiskinan. Tapi jenis kemiskinan semacam ini biasanya bersifat individual atau hanya menimpa pada sekelompok orang saja, dan terjadinya bersifat temporer. Karenanya, akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis kemiskinan struktural yang biasanya bersifat massal dan telah berkembang sedemikian kompleks.

Sebelum membahas kemiskinan struktural lebih lanjut, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan serta beberapa akibatnya.

Suatu masyarakat atau bangsa terkadang dipandang mengalami kemiskinan karena keadaan alamnya yang kurang subur, seperti tanahnya berbatu-batu, kering, tidak cukup luas, tidak mengandung mineral atau kekayaan alam lainnya. Dengan demikian, negara tersebut dipandang tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Pandangan semacam ini mendapat kritik dengan mengajukan contoh beberapa negara yang sempit (kecil) atau keadaan alamnya yang tidak subur, tapi mampu menjadi negara maju. Di antaranya adalah Jepang, Belanda, Singapura atau Taiwan.⁶⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena "sikap mental atau budaya" seseorang atau masyarakat yang tidak memiliki

⁶⁹ John Kenneth Galbraith, *Hakikat t.*, hal.12.

sikap mental yang positif untuk membangun; seperti tidak memiliki sikap wiraswasta, apatis, pasrah, tidak percaya diri dan sebagainya.

Salah satu uraian lengkap mengenai sikap yang dinilai cocok untuk pembangunan diberikan oleh Gunnar Myrdal dalam bukunya "Asian Drama", yaitu: efisiensi, kerajinan, kerapian, sikap mengikuti rasio dalam mengambil tindakan dan keputusan, kesediaan untuk berubah, kegesitan dalam mempergunakan kesempatan yang muncul, sikap bekerja secara energetis, sikap bersandar pada kekuatan sendiri, sikap mau bekerja sama, kesediaan untuk memandang jauh ke depan.⁷⁰

Pendekatan senada dengan pendapat itu, dilontarkan David C. McClelland yang mengatakan bahwa penyebab suatu bangsa tidak maju adalah karena tidak memiliki "*nAch*" (singkatan dari *need for Achievement*) yaitu kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. *nAch* ini semacam virus mental yang apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung akan menyebabkan orang itu bertindak laku secara giat.

Menurut David C. McClelland salah satu penyebab tidak adanya *nAch* ini dapat dekemukakan pada cerita anak-anak atau cerita rakyat yang kebanyakan bersifat fatalistik. Dan virus *nAch* ini bisa ditularkan, untuk mengubah sikap mental masyarakat yang kurang atau tidak memilikinya.⁷¹

⁷⁰ Franz von Magnis, "Menuju Etos Pekerjaan yang Bagaimana", *Prisma*, LP3ES, Jakarta, No.11/VII/Desember 1978, hal. 26. Uraian mengenai sikap mental membangun sering dilontarkan lewat perbandingan sikap hidup tradisional dan modern, di antaranya oleh Koentjoroningrat. Lihat: Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1977. Juga oleh tokoh lembaga wiraswasta, Dr. Suparman.

⁷¹ David C. McClelland, "Dorongan Hati Menuju Modernisasi", dalam Myron Weiner (ed.), *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hal. 2-13.

Masalah ledakan penduduk, juga dipandang oleh para ahli sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Salah seorang tokoh dari pendapat ini adalah Malthus yang sejak tahun 1798 telah sampai pada kesimpulan bahwa kesentosaan manusia senantiasa diganggu oleh kenyataan penambahan manusia yang lebih cepat dari pada penambahan bahan makanan. Manusia berkembang biak menurut "deret ukur" sedangkan bahan makanan berkembang menurut "deret hitung".⁷² Salah satu upaya kearah penanggulangan masalah tersebut adalah lewat penurunan angka kelahiran dengan pemakaian alat kontrasepsi yang di Indonesia dikenal dengan program "Keluarga Berencana".

Pemahaman mengenai kemiskinan bila dilihat dari segi faktor penyebab, maka ada beberapa pendekatan, diantaranya adalah "kemiskinan struktural" dan "kemiskinan struktural atau aksidental".

Pemahaman tentang kemiskinan juga dapat didekati dalam dua perspektif, yaitu perspektif kultural dan perspektif struktural atau situasional. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tingkat analisis, yaitu: individual, keluarga dan masyarakat. Sependapat dengan Michael Sherraden⁷³, teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu; merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi, dan kapital manusia (*human capital*). Secara keseluruhan, teori

⁷² Lihat: Paul R. Ehrlich, *Ledakan Penduduk*, terjemahan Inyo Fernandez dan Paul Soge, PT Gramedia, Jakarta, 1981. Masalah yang timbul dari ledakan penduduk tidak terbatas pada keprihatinan tentang kemiskinan, tapi juga pada masalah pemukiman, kerusakan lingkungan, kesehatan, migrasi dan sebagainya.

⁷³ Michael Sherraden, *Aset untuk Orang Miskin; Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 46-53.

dalam kategori ini tersajikan bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan. Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsionalis⁷⁴, yang menyarankan bahwa sejumlah lebih penting dan tentu saja lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat parokial, apatisme, fatalisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif.

Kemudian menurut perspektif situasional atau struktural, teori strukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas diawali oleh teori kelompok Marxis, yaitu bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistemik telah menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan, dan berkelanjutannya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis.⁷⁵ Masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern.⁷⁶

Sedangkan bila dilihat dari sebab kemiskinan Ahmad Sanusi,⁷⁷ mengelompokkan menjadi dua yaitu;

⁷⁴ Kingsley Davis and Wilbert Moore, "Some Principles of Stratification," *American Sociological Review* 10 (2), 1945; Talcott Parson, *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press, 1951.

⁷⁵ Michael Sherraden, *Aset.*, hal. 47.

⁷⁶ Suyanto Usman, *Pembangunan.*, hal. 128.

⁷⁷ Ahmad Sanusi, *Agama di tengah Kemiskinan; Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 20-21.

1. kemiskinan temporer atau aksidental yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh cacat jasmani atau jiwa, atau akibat malapetaka yang menimpa seseorang.⁷⁸ Cacat jasmani atau cacat mental dapat membuat seseorang tidak bisa bekerja, hingga dia tidak produktif dan menjadi miskin.
2. kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan struktural sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi pada institusi- institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya dan sebagainya.⁷⁹ Maka "kemiskinan yang timbul dalam suatu masyarakat, bukan semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada dirinya sendiri, misalnya kurangnya pendidikan atau kurangnya kalori, melainkan sebagai akibat dari eksploitasi."⁸⁰

Beberapa sebab lain yang dianggap penyebab timbulnya kemiskinan adalah: pendidikan, kekurangan gizi, pola asuh dalam keluarga, atau karena kesalahan dalam sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara dalam proses pembangunan atau modernisasi beserta sistem politik dan ideologinya. Bahkan agama sering dipandang sebagai turut andil beserta sistem budaya yang terkadang menjurus pada sikap fatalis dan menerima

⁷⁸ Hidayat Nataatmaja, *Masalah Kemiskinan Ditinjau dari Ajaran Islam*, dalam Amrullah Ahmad et. Al. I(eds), *Islamisasi Ekonomi*, PLP2M, Yogyakarta, 1985, hal. 109. Jenis kemiskinan ini adalah seperti apa yang dimaksud dengan istilah "kemiskinan individual" dari Selo Sumardjan, atau "kemiskinan alamiah" dari Sinaga dan Benyamin, juga bagian dari istilah "kemiskinan per casus" dari Toety Herarty.

⁷⁹ A. Suryawasita, SJ. "Analisis Sosial", dalam J.B. Banarwiratma, SJ. (ed.), *op. cip.*, hal. 12-13. Dan Frans Seda, "Kemiskinan Struktural dan Demokrasi Pancasila", dalam M. Sastrapratedja, et.al. (eds), *Menguak Mitos-mitos Pembangunan, Telaah Etis dan Kritis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 132-134.

⁸⁰ M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 196.

kemiskinan sebagai suatu takdir dan mendapat tempat terhormat untuk mendekatkan diri pada Tuhan bagi kesempurnaan diri.⁸¹

Kesalingterkaitan berbagai sebab kemiskinan dalam hampir semua aspek kehidupan oleh Gunnar Myrdal dikatakan sebagai "vicious circle". Suatu lingkaran tak terjungkal pangkal. Sulit dibedakan antara faktor penyebab dan akibat dari kemiskinan.

Contoh dari lingkaran tak berujung pangkal itu dikemukakan Myrdal dengan mengutip profesor Ragnar Nurske yang mengatakan bahwa seseorang kurang makan, maka kesehatan menjadi lemah; karena tubuhnya lemah maka kemampuan kerjanya pun rendah, hal mana mengakibatkan miskin, dan keadaan ini selanjutnya mengakibatkan kurang makan. Demikian selanjutnya.

Selanjutnya Myrdal mengatakan bahwa masalah tersebut adalah proses sirkuler dan komulatif yang terus menerus menurun ke tingkat yang lebih rendah, dimana suatu faktor negatif memainkan dua peranan sekaligus; menjadi penyebab dan akibat dari faktor negatif lainnya.⁸²

Adapun dalam masalah kemiskinan struktural, analisa mengenai faktor penyebab timbul kemiskinan bertolak dari keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi pada institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya, dan sebagainya.⁸³ Maka

⁸¹ Ahmad Sanusi, *Agama.*, hal. 26.

⁸² Gunnar Myrdal, *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, terjemahan Paul Sihotang, cet. II (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hal. 35-37.

⁸³ Lihat: A. Suryawasita, SJ. "Analisis Sosial", dalam J.B. Banawiratma, SJ. (ed.), *op. Cit.*, hal. 12-13. dan Frans Seda, "Kemiskinan Struktural dan Demokrasi Pancasila", dalam M.

”kemiskinan yang timbul dalam suatu masyarakat, bukan semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada dirinya sendiri, misalnya kurang pendidikan atau kurangnya kalori, melainkan sebagai akibat dari eksploitasi.”⁸⁴

Dipihak lain, Jalaludin Rahmat mengutip beberapa pendapat yang sampai pada kesimpulan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi; karena adanya sekelompok kecil orang-orang elit yang hidup mewah di atas penderitaan banyak orang. Baik elit dalam negeri ataupun pada peranan negara-negara maju yang menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elit lokal. Bahkan Susan George mengatakan kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk. Di antara bukti yang diungkapkan Susan, adalah kelaparan yang terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk lima orang perkilometer persegi, di India dengan kepadatan 172 orang, tetapi tidak terjadi di Negeri Belanda dengan kepadatan 362 orang per kilometer persegi.⁸⁵

Dari beberapa pendapat dan analisa mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan, tampak bahwa pendapat masing-masing mengenai penyebab kemiskinan selain tergantung pada jenis kemiskinan, juga sangat tergantung pada kerangka berfikir atau cara memandang masalah kemiskinan serta

Sastrapratedja, *et. al.* (eds), *Menguak Mitos-mitos Pembangunan, Telaah Etis dan Kritis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 132-134.

⁸⁴ M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 196.

⁸⁵ Jalaluddin Rahmat, “Kunci Surga yang Terbuang”, Kata Pengantar, dalam, Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakngan di Negara-negara Muslim*, terjemahan Muhammad Bagir, (Bandung: Mizan, 1985), hal. 12.

kedudukan dan kepentingannya. Kerangka berfikir tersebut menurut A. Suryawasita, SJ, disebut sebagai 'model', yang secara garis besar terbagi pada: model konsensus dan model konflik.⁸⁶

Model konsensus tersebut terbagi pada ideologi konservatif dan liberal yang melatarbelakangi pemikirannya. Menurut ideologi konservatif, masalah kemiskinan adalah kesalahan pada orang miskin sendiri. Mereka dinilai bodoh, malas, tidak punya motivasi berprestasi yang tinggi, tidak punya ketrampilan dan sebagainya. Maka kaum konservatif percaya bahwa masalah kemiskinan akan terselesaikan dengan sendirinya. Sedangkan menurut pemikiran ideologi liberal, masalah

kemiskinan harus dipecahkan lewat struktur politik, ekonomi yang ada dengan menciptakan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Orang miskin pasti dapat mengatasi kemiskinan mereka asal mendapat kesempatan berusaha yang memadai.

Baik ideologi konservatif maupun ideologi liberal, keduanya mempertahankan struktur sosial yang sudah ada beserta perbedaan tingkat sosial, sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi politik. Perbedaannya dalam melihat masalah kemiskinan, kaum konservatif cenderung menyalahkan orang miskin yang dinilai tidak cukup berusaha menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada yang disediakan oleh masyarakat; sedangkan kaum liberal memandang bahwa kesempatan yang ada belum cukup memadai sehingga orang miskin tidak bisa hidup sebagaimana diharapkan. Maka bagi

⁸⁶ A. Suryawasita, "Analisis Sosial", dalam J.B. Banawiratma, S.J., *op. Cit.*, hal. 15-33.

kaum liberal usaha yang harus dilakukan ialah bagaimana memungkinkan orang miskin hidup dalam struktur sosial yang sudah ada, sedang kaum konservatif lebih cenderung membiarkannya.⁸⁷

Selanjutnya model konflik berbeda dengan model konservatif dalam melihat kemiskinan. Model ini memandang bahwa struktur sosial yang ada sebagai penyebab kemiskinan. Sebab, struktur sosial adalah dominasi sekelompok kecil dan kepatuhan serta ketundukkan sebagai warga masyarakat atas dominasi kelompok kecil tersebut. Bahkan masalah kultur dan mentalitas orang miskin yang dinilai sebagai penyebab kemiskinan oleh kaum konservatif, dipandang menurut model konflik sebagai akibat dari struktur sosial itu sendiri yang sengaja ditanamkan dan dipertahankan. Oleh karena itu, bagi model konflik, untuk mengatasi kemiskinan harus melalui perombakan struktur sosial yang ke arah yang lebih baik demokrasi dan partisipatif.

c. Gejala-gejala Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu.

⁸⁷ Ahmad Sanusi, *Agama*, hal. 39

Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

- 1) *Dimensi politik*, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah/organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
- 2) *Dimensi sosial*, sering muncul dalam bentuk tidak terintergrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
- 3) *Dimensi lingkungan*, sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman;
- 4) *Dimensi ekonomi*, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka samapai batas yang layak; dan
- 5) *Dimensi aset*, hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kepemilikan masyarakat miskin dalam berbagai hal yang mampu menjdai model hidup

mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capita*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan dan sebagainya.⁸⁸

d. Agama dan Masalah Kemiskinan

Untuk melihat peran atau fungsi agama dalam menghadapi masalah kemiskinan, tidak bisa dipisahkan dari peran agama dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Selain kemiskinan itu sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari permasalahan kemanusiaan dalam kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya, agama itu sendiri tidak bisa dilihat secara terpisah dari perannya yang mengatur seluruh gerak aktivitas kehidupan manusia (pemeluknya).

Pada dasarnya, agama berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menghantarkannya ke jalan “keselamatan” di dunia kini dan di akhirat kelak. Karena itu agama merupakan suatu sistem yang total, meliputi seluruh sektor kehidupan manusia. Karena itu pula maka agama akan senantiasa mempertautkan dirinya dengan semua persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Dengan demikian, setiap tantangan masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia, adalah juga merupakan tantangan bagi agama untuk mengahadapinya. Hingga tantangan tersebut bersifat permanen dan tidak pernah agama untuk tidak terpanggil dan dituntut aktif dalam menghadapi masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia.

⁸⁸ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.*, hal. 110.

Selanjutnya, jika “keselamatan” merupakan tujuan dari agama, maka agama mendorong dan membenarkan pada usaha-usaha yang dijalankan untuk mempertahankan, mencapai dan mengembangkan keselamatan. Di antara upaya ke arah keselamatan tersebut adalah juga berarti membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan, dan lain sebagainya. Adanya tujuan ke arah pemecahan masalah kemanusiaan itu merupakan kekuatan serta kontribusi agama seperti tercantum dalam nilai-nilai ajaran yang dikandungnya, sebagai amanat yang bersifat mutlak dari Sang Pencipta untuk diwujudkan dalam kehidupan.⁸⁹ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Soedjatmoko, agama lebih daripada ideologi sekuler, karena agama merupakan suatu sistem total dari perpaduan, yang mengandung otoritas dan kemampuan pengarahan guna penataan kembali nilai dan tujuan, pengaturan kembali fungsi dan norma, dan guna memberi pedoman mengenai pandangan tentang struktur dan makna yang dibutuhkan manusia untuk hidup sebagai manusia di dunia ini.⁹⁰

Selanjutnya, peran agama dalam menghadapi kemiskinan juga dapat dilihat dari perannya dalam proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berarti menanggulangi masalah kemiskinan. Di antara peran agama dalam pembangunan, menurut Mukti Ali adalah sebagai: faktor motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif.⁹¹ Faktor motivatif adalah yang mendorong, mendasari, dan melandasi cita-cita serta

⁸⁹ Ignas Kleden, “Dialog Antara Agama: Kemungkinan dan Batas-batasnya”, dalam *Prisma*, LP3ES, No. 5/VII/Juni, 1978, hal 7-8. Jakarta

⁹⁰ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 7-9.

⁹¹ *Ulama dan Pembangunan*, Panitia Musyawara Nasional I, Majelis Ulama Seluruh Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 85-86.

amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia merupakan syarat mutlak untuk tiap usaha yang ingin dilakukan secara bertanggung jawab. Tanpa motivasi yang jelas orang akan bekerja untung-untungan, asal jadi dan tak bergairah serta akan mudah menjadi oportunis. Dan faktor kreatif adalah yang mendorong dan menghasung manusia, bukan hanya untuk melakukan kerja produktif saja, melainkan juga karya kreatif dan baru.

Sedangkan fungsi agama sebagai faktor sublimatif adalah mengkoduskan segala perbuatan manusia, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduniaan. Dengan dasar dan sikap batin itu kehidupan manusia mempunyai makna dan nilai luhur sebagai ibadat kepada Tuhan. Kemudian dengan fungsi sebagai faktor integratif, agama dapat memadukan segenap kegiatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga terhindar dari bencana “kepribadian yang pecah” dan mampu menghadapi tantangan serta resiko kehidupan.

Peranan agama dalam pembangunan juga dapat dilihat dari sudut pandang, bahwa titik sentral pembangunan adalah manusia, dan karena itu tujuan pembangunan adalah manusia, dan karena itu tujuan pembangunan adalah pengembangan potensi dan hidup manusia sehingga manusia secara individual maupun kolektif menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat yang luhur. Agama bisa dan seharusnya berperan sebagai pemberi makna pada kehidupan manusia, cita-cita dan kegiatannya. Di antara inspirasi yang dapat dipetik dari agama bagi pembangunan manusia adalah melalui sejarah dan kehidupan para Nabi pembawa agama-agama besar.

Dengan penuh kesungguhan, mereka berusaha mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agamawi dalam kehidupan para pengikutnya, dengan penuh ketabahan menghadapi kejailan dan kezaliman. Tanpa ragu-ragu mereka di pihak yang teraniaya dan menderita.⁹²

Tumbuhnya sikap yang tegar dalam membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan yang sangat diperlukan dalam pembangunan tersebut, dikatakan oleh J.Riberu adalah karena diilhami oleh paham-paham agamanya mengenai persaudaraan, pengabdian dan pengorbanan, berdasarkan akan pentingnya dimensi horizontal iman, hingga para penganut agama akan mengabdikan di pelbagai bidang kehidupan dengan motivasi yang lebih mendalam. Ia menjalankan tugas dan pelayanan menurut posisinya bukan saja karena tanggung jawab sebagai seorang warga, tetapi juga karena yakin bahwa dengan berbuat baik di dalam kedudukannya ia menunaikan kewajiban agamanya, maka pengabdianannya akan lebih intensif.⁹³

Lebih lanjut, pengaruh agama bagi kehidupan manusia diuraikan Murtadha Mutahhari adalah dalam bentuk menciptakan sikap optimisme, pencerahan hati, ketenteraman hati dan kenikmatan ruhaniah serta tumbuhnya harapan akan terjadinya akibat-akibat baik dari amal perbuatan yang baik. Dan tak ada yang melebihi agama dalam hal menghargai kebajikan; menganggap suci keadilan; melunakkan hati seseorang pada sesamanya; menciptakan rasa saling percaya satu sama lain antara individu; menyebabkan kebajikan dan

⁹² Djohan Effendi, "Agama dan Pembangunan", dalam M. Sastrapratedja, *et.al.*, *Menguak Mitos-mitos Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 76-77.

⁹³ J. Riberu, "Agama dan Pembangunan Masyarakat Pancasila", dalam, TB, Simatupang, *et.al.*, *Peranan Agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Negara Pancasila yang Membangun*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hal.86-91.

kerajinan yang lebih mengakar dalam kesadaran manusia; menghargai nilai-nilai moral dan menciptakan dorongan untuk melangkah melawan kejahatan dan menyatukan setiap orang bagai anggota dari satu tubuh.⁹⁴

Selama berabad-abad agama telah memberikan kepada manusia bukan saja ritus-ritus yang memberikan kelegaan emosi dan cara-cara untuk memperkokoh kepercayaan sehingga karenanya dia mampu melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga mengembangkan interpretasi-interpretasi intelektual yang membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Agama telah membantu manusia untuk menjawab persoalan tentang mengapa hal yang tidak menguntungkan terjadi.⁹⁵

Tinjauan lebih jauh mengenai fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat, menurut teori fungsional peranan agama adalah: mengidentifikasi individu dengan kelompok; menolong individu dalam ketidakpastian; menghibur ketika dilanda kecewa; mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat; memperkuat moral dan menyediakan unsur-unsur identitas. Agama bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan saran untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan.⁹⁶

⁹⁴ Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.86-96.

⁹⁵ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.108.

⁹⁶ Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 29-30. Teori fungsional ini memandang agama dalam kaitannya dengan aspek pengalaman yang mentransendensikan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari, yakni dengan melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Dari sudut teori ini, pentingnya peran agama adalah dalam hubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Ibid., hal 25. Di antara kritik terhadap teori fungsional adalah karena kecenderungannya mengabaikan sifat kreatif dan revolusioner agama

Dari beberapa pandangan mengenai fungsi atau peran agama bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, tampak jelas urgensinya bagi upaya pembangunan ke arah pembebasan manusia dari masalah-masalah kemiskinan. Pembudayaan nilai-nilai agama ini akan merupakan proses penciptaan etik sosial dan etos kerja yang membangun. Dan pada gilirannya akan menyediakan sarana yang hidup dan dasar yang kokoh bagi jalannya pembangunan. Dalam konteks ini, Soedjatmoko mengatakan bahwa dalam usaha pembangunan, yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada, tetapi juga kemampuan untuk menilai kenyataan sosial berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistem nilai. Agama dapat memberikan sumbangannya dan berperan dalam menciptakan sistem nilai itu serta akan menghasilkan manusia pembangunan yang berani mengambil resikonya sebagai ikhtiar manusia yang diamanatkan dan difirmankan Tuhan.⁹⁷

Usaha pembangunan pada hakikatnya merupakan perluasan amal untuk menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat. Maka karena imannya, manusia beragama terdorong untuk turut melaksanakan pembangunan. Dan karena imanlah yang dapat memberikan kepada manusia keberanian hidup, bersedia dan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mencari

yang potensial. Ibid., hal 32. Karena pada dasarnya setiap agama tidak selalu menekankan segi-segi harmoni dan integratif dalam kehidupan masyarakat, tetapi sering kali justru menimbulkan konflik-konflik baru karena di antara watak dan misi agama yang transformatif sering menimbulkan pertentangan. Lihat, Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, LEPPENAS, Jakarta, 1981, hal. 60.

⁹⁷ Soedjatmoko, *Etika*, hal. 273.

bahwa kehidupan ekonomi merupakan daerah yang sudah dibebaskan dari agama dan merupakan sektor sekuler. Usaha-usaha dari pihak agama untuk menaklukkan kembali sektor itu atas nama tradisionalisme keagamaan akan selalu dianggap bahaya terhadap kelangsungan tata ekonomi itu sendiri. Telah terjadi krisis kredibilitas terhadap agama. Definisi agama terhadap realitas tidak mendapat tempat lagi, sehingga agama berhenti sebagai kekuatan sejarah, sebagai sebuah variabel yang merdeka.¹⁰⁰

Keraguan terhadap peranan agama dalam masyarakat modern dan proses modernisasi di antaranya adalah karena melihat kedudukan agama dewasa ini mengalami marginalisasi peranan dan reduksi pengertiannya, di mana agama dilihat dalam peranan legitimasi dan instrumental. Peranan agama telah digantikan ilmu pengetahuan dan ideologi. Agama bersifat defensif dan hanya dipakai sepanjang agama mendukung tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan dan ideologi. Selain itu, kadang agama juga dilihat dari trauma sejarahnya di mana agama tidak hanya membawa rahmat, tapi juga bencana, seperti dalam bentuk peran agama di Eropa, perang Salib, dan beberapa perang atau konflik agama lainnya.¹⁰¹

Demikian juga, kritik dan keraguan terhadap agama dalam menanggulangi masalah kemiskinan bertolak dari pandangan bahwa agama adalah sebagai faktor penyebab dan ikut bertanggung jawab karena kadang “membuat manusia lebih mudah menerima kemiskinan sebagai nasib yang tak

¹⁰⁰ Lihat, Kuntowidjojo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985), hal. 51.

¹⁰¹ M. Dawam Rahardjo, “Kekerasan, Agama dan Gerakan Perdamaian”, Pengantar dalam, *Kelompok Studi Proklamasi, Agama dan Kekerasan, KSP*, 1985, hal. XVII.

terelakkan”.¹⁰² Kecenderungan paham fatalis dalam pemikiran para penganut agama ini dalam agama Islam, di antaranya seperti yang disinyalir oleh Abdurrahman Wahid.

Besar kecil kecenderungan untuk memperlakukan masalah kemiskinan sebagai sesuatu yang telah menjadi suratan nasib dan kepastian yang tidak dapat ditolak lagi. Ayat Al-Qur’ ān “Telah Ku bagi-bagikan antara mereka (bagian) hidup mereka di dunia, dan Ku tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain”¹⁰³ dijadikan pegangan tentang langgengnya kemiskinan sebagai nasib manusia. Hiburan dan dorongan yang diberikan, agar manusia menerima nasibnya itu dengan tabah dan sabar. Disediakan janji muluk di akhirat kelak bagi kepedihan hidup di dunia...¹⁰⁴

Sedangkan dalam agama Kristen, pandangan fatalis dan sikap yang dapat melestarikan kemiskinan di antaranya bersumber dari sabda Yesus dalam Perjanjian Baru, “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Syurga” (Mat, 5:3). Sabda Yesus tersebut ditafsirkan seolah-olah Yesus mengatakan, “Untunglah kamu orang-orang miskin, berduka cita, lapar dan haus dan seterusnya, karena kamu dicintai Allah. Maka tetaplah demikian. Terimalah nasibmu dan pada suatu hari kamu

¹⁰² Toety Herarti Noerhadi, “Agama dan Masalah Kemiskinan”, paper dalam Kollokium Agama dan Pembangunan VI, tentang “Agama Menangani Masalah Kemiskinan”, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama, 11 Maret 1981.

¹⁰³ Q.S. al-Zukhruf, ayat 32, (pen).

¹⁰⁴ Abdurrahman Wahid, *op.cit.*, hal.76-77.

akan berbagai di syurga.” Seolah-olah kemiskinan adalah suatu kebajikan yang harus dikembangkan atau sekurang-kurangnya dipertahankan.¹⁰⁵

Demikian juga sikap fatalis tersebut dapat ditemukan dalam agama Hindu dengan sistem kasta dan pandangannya yang menolak kehidupan dunia sebagai maya atau hayalan. Pandangan keagamaan yang berkembang terutama di India ini telah menumbuhkan pola kehidupan di mana “pertapa yang papa didukung dan dipuji, tetapi eksploitasi ekonomi terhadap rakyat dan penghisapan oleh para lintas darat berlangsung tanpa kendali.”¹⁰⁶ Selain sikap fatalis dalam agama tentang kemiskinan, juga kadang kala muncul sikap ambivalen agama dalam melihat kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai peluang membekunya hati pada Tuhan. Kemiskinan dipandang sebagai sesuatu yang memang negatif, tapi justru dilihat sebagai alat untuk bertobat. Dan kemiskinan juga kadang dilihat sebagai yang negatif dan harus diberantas.¹⁰⁷

Adanya pandangan yang fatalis atau ambivalen terhadap masalah kemiskinan dalam pandangan agama, dapat bersumber dari ajaran agama itu sendiri yang memang berpaham demikian atau karena pengaruh sistem sosial budaya dari para penganut ajaran agama yang menangkap pesan ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial budaya atau keadaan pribadinya. Karena pada dasarnya keberagamaan seseorang atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam menghayati pesan-pesan ajaran agama yang

¹⁰⁵ Suharyo, Pr., “Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga” (Mat 5:3) dalam J.B. Banawiratma, (ed.), *kemiskinan dan Pembebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hal. 75.

¹⁰⁶ Elizabeth K. Nottingham, *Agama*, hal. 130.

¹⁰⁷ M. Sastrapratedja, “Agama dan Kemiskinan”, makalah dalam Kollokium Agama dan Pembangunan VI, *loc. Cit.*

dipeluknya.¹⁰⁸ Hingga dalam hubungannya dengan kemiskinan, maka pandangan fatalis atau ambivalen agama tentang kemiskinan dapat “dipakai untuk legitimasi kemiskinannya, atau oleh orang yang mau supaya yang miskin tetap miskin.”¹⁰⁹

Mengenai keragaman pandangan agama tentang kemiskinan tersebut, dijelaskan oleh Soedjatmoko sebagai berikut,

Kemiskinan dan ketidakadilan tidak sama tempatnya di dalam pandangan agama-agama, biarpun di dalam semua agama perbuatan amal dan penegakan keadilan dianjurkan. Ada agama yang memandang kemiskinan dan ketidakadilan sebagai kondisi yang memang sudah melekat pada kehidupan manusia di dunia ini. Manusia dapat mengatasi keterikatannya dari kedua kondisi ini dengan memperkembangkan sikap batiniahnya serta usaha-usaha yang meningkatkan kemampuan spiritualnya. Mirip dengan pandangan ini adalah pandangan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan bagi seseorang adalah akibat karmanya yang harus diatasi dengan kelakuan yang baik dan disiplin spiritual. Lain halnya dengan pandangan di mana komitmen agamanya menuntut pembuktian dengan usaha-usaha yang secara langsung menghadapi dan mencoba mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Di sini amal pribadi bahkan amal institusional pun tidak mencukupi, karena bukan saja gejala-gejala kedua permasalahan yang perlu dihadapi, melainkan sebab-musabab kemiskinan dan ketidakadilan, artinya akar-akar strukturalnya.¹¹⁰

Lebih tegas lagi dikatakan oleh John Kenneth Galbraith mengenai pengaruh doktrin agama terhadap sikap fatalitas dalam menghadapi kemiskinan, bahwa sikap menerima nasib dan menyesuaikan diri dengan kemiskinan adalah berasal, setidaknya sebagian, dari ajaran-ajaran pokok agama-agama penting di dunia. Dalam agama Kristen ada pandangan yang mengatakan bahwa kepedihan kemiskinan tidak disangkal, tetapi ganjaran imbalan keagamaan sangat besar. Si miskin melalui lubang jarum akan sampai

¹⁰⁸ Moeslim Abdurrahman (ed), *Agama Budaya dan Masyarakat*, Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Litbang Depag RI, 1979/1980, hal. 2.

¹⁰⁹ M. Sastrapratedja, *Agama*, hal.21.

¹¹⁰ Soedjatmoko, op.cit., hal. 211.

di surga, si kaya tetap berada di luar menjaga unta. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan yang kemudian ditingkatkan oleh Marx, bahwa kenikmatan yang dijanjikan agama adalah suatu pola yang dibuat untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan-kenyataan adanya kelas dan pemerasan, agama menjadi candu bagi manusia. Ini merupakan resep untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam keadaan keputusan.¹¹¹

Sedangkan mengenai kemungkinan adanya pengaruh kondisi sosial budaya yang berakibat munculnya pandangan fatalis atau ambivalen dalam melihat kemiskinan, hal ini di antaranya dapat dilihat dari pengaruh kemiskinan itu sendiri yang menyebabkan munculnya “kebudayaan kemiskinan” atau “kebudayaan bisu”, yang di antaranya bercirikan sikap fatalistik.¹¹² Kondisi ini akan sangat menentukan pada pandangan keberagamaannya dalam melihat masalah kemiskinan. Karena itu, maka “bagaimana penganut suatu agama bersikap terhadap kemiskinan sangat tergantung dari caranya memandang kemiskinan tersebut.”¹¹³

Dari uraian mengenai fungsi atau peran agama dalam menghadapi masalah kemiskinan tersebut tampak bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang menuntut peran aktif agama untuk menghadapinya.

¹¹¹ John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Masa*, terjemahan Tom Anwar, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal 47.

¹¹² Kebudayaan kemiskinan (*poverty culture*) menurut Oscar Lewis, antara lain telah mendorong terwujudnya sikap menerima nasib, meminta-minta atau mengharapkan bantuan dan sedekah. Sikap ini sebenarnya merupakan suatu bentuk adaptasi yang rasional dan cukup pandai dalam usaha mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Lihat, Parsudi Suparlan (ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 21. Sedangkan di antara ciri “kebudayaan bisu” menurut M. Sastrapratedja adalah: dicengkram oleh perasaan menyerah; tunduk pada permainan kekuatan yang ditangkap sebagai irrasional dan migas; penyesuaian dengan tertib sosial dan bukannya partisipasi aktif. M. Sastrapratedja, *loc.cit.*

¹¹³ Ignas Kleden, “Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan”, pengantar dalam, Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, *op.cit.*, hal. Xxxvi.

Hal itu bertolak dari misi utama agama itu sendiri yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, termasuk membebaskannya dari cengkeraman kemiskinan.

Meskipun nilai-nilai ajaran agama dapat berperan dalam upaya menangani masalah kemiskinan dan masalah kemanusiaan lainnya, tapi agama bukanlah satu-satunya sumber nilai dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia dalam kehidupan ini. Bahkan sumber nilai lain di luar agama, seperti ideologi, kadang dinilai bersifat sakral dan dipercayai sebagaimana halnya agama. Hal ini biasa disebut sebagai “pseudo religi” (agama palsu) yang muncul dari fitrah manusia itu sendiri yang membutuhkan agama. Seperti apa yang dikatakan Erich Fromm dalam bukunya, *Psycoanalysis and Religion*, bahwa manusia itu tidak bisa menghindarkan diri dari satu atau lain bentuk agama, karena kebutuhan akan agama itu merupakan bagian yang instrinsik dalam eksistensi kemanusiaan. Kalau mereka tidak percaya pada agama wahyu, maka mereka akan cenderung menciptakan agamanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang tanpa kebutuhan religius, yaitu suatu kebutuhan akan suatu kerangka orientasi dan obyek pengabdian.¹¹⁴

Bertolak dari pemikiran di atas, maka suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemampuan agama untuk menemukan wawasan keagamaan yang menantang dan menarik serta mempunyai relevansi untuk memecahkan persoalan hidup yang nyata. Karena suatu dalil sosiologi mengatakan bahwa penganutan suatu jenis kepercayaan terkait erat dengan

¹¹⁴ Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hal. xi-xii.

pilihan-pilihan yang tersedia. Maka seseorang atau masyarakat akan menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu yang bersesuaian dengan alternatif yang ada pada mereka melalui apa pun caranya.¹¹⁵ Dan apabila agama tidak meresponi dengan cara dan pendekatan yang menarik serta relevan dengan masalah kemiskinan sebagai salah satu masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini, maka di antara konsekuensinya, agama akan semakin tidak mendapat peran dan tersisih dari kehidupan manusia.

Dalam hubungan ini, Soedjatmoko¹¹⁶ mengingatkan bahwa peran agama tidak cukup hanya berupa jawaban-jawaban yang sudah menjadi kebiasaan dan hanya refleksi moral semata-mata. Yang diperlukan ialah suatu refleksi moral yang pada suatu pihak disinari kesadaran sejarah dan yang juga mampu untuk mencakup pengetahuan modern dan akan seluk beluk situasi historis manusia masa kini serta sanggup memberi pegangan yang relevan untuk pilihan-pilihan yang dihadapi umat manusia.

e. Penanggulangan Kemiskinan dalam Islam

Pandangan ajaran Islam mengenai kemiskinan terjalin erat dalam suatu sistem ajaran dengan berbagai aspeknya tentang tatanan kehidupan Islami yang digariskan dalam Al-Qur' ān dan Hadits serta inspirasi atau tauladan dari sejarah kehidupan para Nabi dan Rasul serta para Khulafaur Rasyidin dan penerusnya. Dalam beberapa literatur, pada umumnya uraian kemiskinan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu kajian mengenai "sistem

¹¹⁵ Nurcholish Madjid, "Pembinaan Generasi Muda Melalui Pendekatan Agama", dalam, *Dialog*, Badan Litbang Agama, Departemen Agama, No. 20/X/Maret, 1986, hal. 15.

¹¹⁶ Soedjatmoko, *op.cit.*, hal. 205.

ekonomi” dalam Islam yang meliputi uraian tentang harta, perdagangan, jual beli, keadilan, kekayaan dan kemiskinan beserta sebab dan akibatnya serta cara-cara penanggulangannya. Oleh karena itu, uraian berikut ini mengenai kemiskinan, hanya merupakan garis besarnya saja, tidak sampai pada suatu uraian yang lengkap dan komprehensif.

Doktrin paling utama dan sentral serta esensial dalam ajaran Islam adalah “tauhid”, yaitu mengesakan Tuhan Allah yang diformulasikan dalam *kalimah thoyyibah* “Lailaha illa Allah”, artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan dasar kepercayaan itu, maka seorang manusia tauhid memutlakkan Allah Yang Maha Esa sebagai Pencipta, Pemilik, Pengatur, dan Pengurus alam semesta yang bersifat nisbi. Dengan dasar kepercayaan itu pula manusia hanya kepada Allah menghamba dengan segala kepasrahan dan ketaatan. Tauhid membebaskan manusia dari sikap perhambaan, selain hanya kepada Allah. Ia membebaskan manusia untuk memperbudak dan diperbudak, mengeksploitasi atau dieksploitasi dan ditindas sesama manusia. Karena setiap manusia adalah hamba Allah dengan status yang sama, “tidak ada manusia yang lebih superior atau inferior terhadap manusia lainnya,”¹¹⁷ yang membedakan antara satu dengan lainnya hanyalah dalam tingkat ketakwaannya pada Allah SWT, (Q.S. 49:13). Oleh karena itu seperti dikatakan oleh Iqbal, “Esensi Tauhid sebagai pikiran yang bekerja ialah persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan.”¹¹⁸

¹¹⁷ M. Amin Rais, “Arti Fungsi Tauhid”, dalam, *Menelan Cakrawala*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985), hal. 9-10.

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1966), hal. 151.

Allah menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya dan mengaturnya dengan pasti (Q.S. 6:73;25:2), dan menyerahkannya kepada manusia sebagai makhluk yang tertinggi dan terbaik dari semua ciptaan Allah (Q.S. 95:4;17:70) sesuai dengan statusnya sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi (Q.S.6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan disertai untuk memakmurkannya (Q.S.11:61), serta mencari penghidupan sesuai dengan keahlian dan profesinya yang beraneka ragam (Q.S.92:4;39:39).

Menurut Islam adanya perbedaan dalam perolehan hasil kerja yang tercermin dalam kehidupan kaya dan miskin diakui sebagai salah satu ketentuan dan rahmat dari Allah. Sebagaimana firman-Nya:

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (al-Zukhruf, ayat 32).

“Karena harta benda itu merupakan alat (perantara) untuk menuju kepada kebaikan dan guna mempermudah kemanfaatan seluruh manusia, maka manusia diwajibkan berusaha dengan giat dalam mencari dan menghasilkan harta”¹¹⁹ seperti dikatakan oleh Muhammad al-Buraey bahwa beberapa ayat al-Qur’ ān mendorong kerja keras dan mengatasi fatalisme serta kemandekan (Q.S.9:105;23;15;18:30,110). Kata amal, yang diartikan bekerja, muncul

¹¹⁹ Musthafa Husni Assiba’i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: Diponegoro, 1981), hal. 155.

(dalam berbagai bentuk) lebih dari 350 kata dalam Al-Qur' ān. Demikian juga kitab-kitab Hadits penuh dengan ucapan dan perbuatan Rasul yang berkaitan dengan kerja produktif. Di antaranya seperti: “Allah mencintai hamba-Nya yang mempunyai pekerjaan (profesi) sehingga tidak merepotkan orang lain,” dan “Allah mencintai pekerjaan yang beriman yang berkecukupan hidupnya.”¹²⁰ Dan oleh karena itu “Islam melarang pemeluknya untuk berusaha sendiri mencari nafkah. Seperti sabda Nabi, bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah (H.R. Bukhori).”¹²¹

Dari uraian di atas maka jelas bahwa pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus menjadi salah satu tujuan ekonomi masyarakat Islam, karena hal itu merupakan manifestasi dari usaha yang terus menerus, untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang disediakan Allah untuk kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Dengan demikian akan menunjang usaha untuk mencapai tujuan diciptakannya manusia.¹²² Sebaliknya, kemiskinan dalam pandangan Islam dilihat sebagai suatu kelemahan, ketidakberdayaan yang dapat menurunkan martabat kehormatan manusia yang harus diatasi. Bahkan Assiba'i menyebutkan sebagai “penyakit masyarakat”,¹²³ karena kemiskinan dapat mendekatkan orang kepada kekufuran, sebagaimana sabda Rasulullah:

عن انس رضى الله قال : قال رسول الله : كاد الفكر ان يكون كفرا (متفق عليه)

¹²⁰ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam, Landasan Alternatif, Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 181.

¹²¹ Khurshid Ahmad, *Pesan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 215.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan.*, hal.156.

Dari Anas,ra. telah bersabda Rasulullah Saw., "Kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran." (HR. Muttafaq 'Alaih).¹²⁴

Dalam hubungan ini Muhammad Hatta mengatakan sebagai berikut:

Hanya orang yang merasakan keadilan dan makmur yang bisa dididik percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang sehari-harinya bergulat dengan penghidupannya, meminta-minta. Jangan diharapkan mereka itu akan percaya kepada Tuhan. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk berpikir soal agama. Untuk memikirkan soal agama, hendaklah manusia itu hidup dalam rasa keadilan dan makmur.¹²⁵

Karena kemiskinan merupakan suatu penderitaan dalam serba kekurangan, maka Allah mengingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu cobaan dari Allah.

Sebagaimana Firman-Nya:

وَلَنبَلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(Al-Baqarah, 155).

Mengenai sebab-sebab timbulnya kemiskinan, Ali Yafie menguraikan dari kesimpulan Hadits Nabi, berupa doa, "...Aku mohon supaya Engkau

¹²⁴ Jamaluddin Abdurrahman bin Abi Basar Ash-Shuyuti, *Al-Jamiush shaghir*, Jilid II (Beirut: Darul Qutub, 1976), hal. 231.

¹²⁵ Muhammad Hatta, *Ilmu dan Agama*, (Jakarta; Yayasan Idayu, 1983), hal. 16.

(Tuhan) melindungi aku dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, setindihan hutang dan diperas atau dikuasai semua manusia.”¹²⁶

Penyebab kemiskinan juga dapat disimpulkan dari beberapa anjuran, peringatan dan larangan Allah dalam al-Qur’ ān dan sabda Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah seperti disimpulkan Jalaluddin Rahmat,¹²⁷ bahwa Allah menyebutkan penyebab kemiskinan adalah karena kecenderungan untuk tidak memuliakan anak yatim, tidak adanya usaha bersama untuk membela orang miskin, kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber daya (*al—taurats*) secara rakus dan kecintaan yang berlebihan kepada harta benda. Lebih tegas Jalaluddin mengatakan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai akibat dari sistem sosial yang timpang, dari kekurangan solidaritas sosial dan dari *sunnah sayyiah* (kebiasaan buruk) di masyarakat. *Sunnah hasanah* ialah memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang pemecahannya harus dilakukan lewat aksi sosial. *Sunnah sayyiah* ialah memperlakukan kemiskinan sebagai masalah individu-individu yang bersangkutan.

Islam mengakui hak milik atas harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara-cara yang sah, tetapi itupun bukan dengan tidak bersyarat. Seseorang dapat membelanjakan harta kekayaan yang sah hanya dalam saluran-saluran

¹²⁶ Ali Yafie, “Islam dan Problema Kemiskinan”, dalam *Pesantren*, P3M, Jakarta, No.2/III/1986, hal.7.

¹²⁷ Jalaluddin Rahmat, “Kunci Surga yang terbuang”, Pengantar dalam, Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1983), hal. 15.

yang sah dan dengan cara-cara yang sah pula.¹²⁸ Di antara aturan-aturan dalam Islam yang berhubungan dengan masalah harta dan hak milik tersebut adalah sikap tidak adil terhadap diri sendiri maupun masyarakat dalam bentuk menumpuk-numpuk kekayaan (Q.S. 104:2-3), menimbun emas dan perak, dan tidak membelanjakannya demi Allah dan kebaikan (Q.S.9:34). Demikian juga dalam hal penggunaan atau pembelanjaan harta dilarang secara berlebihan dan bersikap boros (Q.S 17:26-29; 25:67) dan dianjurkan untuk mengambil jalan tengah dalam membelanjakan harta, yaitu tidak boros dan tidak pula kikir (Q.S. 30:67). Di antara ungkapan lain tentang cara membelanjakan harta tersebut, Al-Qur'ān mengatakan untuk tidak mengikatkan tangannya ke lehernya (kikir), tetapi juga tidak merentangkan selebar-lebarnya sedemikian rupa sehingga menjadi tercela dan miskin (Q.S. 17:29).

Demikian juga dalam hal cara memperoleh harta, Islam telah menetapkan aturan untuk melakukan semua itu dengan cara yang hak dan sah serta adil. Di antara larangan dalam cara mendapatkan harta, dijelaskan oleh Abul A'la Maududi, yaitu: mengambil milik orang lain tanpa seizinnya atau tanpa memberikan imbalan atau dengan cara memaksa; menyuap; menggelapkan; pencurian; menyelewengkan milik anak yatim; menimbang atau menakar dengan cara curang; jual beli yang membantu kemungkaran; pelacuran dan

¹²⁸ Abul A'la Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 83.

upahnya; judi dan sejenisnya yang hanya berdasarkan untung-untungan; riba dan dalam bentuk jual beli minuman keras.¹²⁹

Dalam masyarakat yang adil, mungkin masih terdapat golongan kaya dan miskin, tetapi hal itu harus dalam batas-batas yang wajar, dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Usaha ke arah perbaikan dalam pembagian rezeki ke arah yang lebih merata harus dijalankan. Dalam hal ini Al-Qur' ān mengingatkan bahwa jika timbul jurang pemisah yang semakin dalam antara golongan kaya dan miskin, maka pada gilirannya akan terjadi pertentangan yang akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan serta peradabannya.¹³⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur' ān, Surat Al-Isra, ayat 16:

وَاِذَا ارٰدْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مَتَرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَمَدَّمْ نَاَهَا تَدْمِيْرًا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah) tetapi mereka melakukan sedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Demikian juga dalam hal sikap hidup yang mewah akan berakibat sebagai bentuk provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat yang berakibat destruktif. Dan karena “perbedaan kaya dengan miskin selalu membawa kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal inilah maka ayat-ayat Al-Qur' ān mementingkan soal hubungan kaya dan miskin.”¹³¹ Di

¹²⁹ Abul A'la Maududi, “Ajaran-ajaran Al-Qur' ān Tentang Ekonomi dan Politik”, dalam Esensi Al-Qur' ān, (Bandung: Mizan, 1984), hal. 74.

¹³⁰ Nilai Identitas Kader, PB HMI, 1986, al. 25.

¹³¹ Harus Hasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, , 1979), hal. 8-9.

antara ayat-ayat tersebut adalah dalam hal upaya untuk mengatasi akibat negatif dan destruktif yang ditimbulkannya serta sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam Islam terdapat beberapa aturan yang berfungsi sebagai sumber penyediaan dana yang berfungsi sosial. Di antara aturan-aturan tersebut diterangkan oleh Ali Yafie,¹³² yaitu dalam bentuk: zakat (dana yang diambil dari mereka yang mempunyai harta melebihi kecukupan rata-rata tiap tahun); *waqaf*; *wasiat*; *ghanimah* (harta rampasan perang); *Rika* (hasil harta terpendam di perut bumi); *nuzur* (harta benda yang dinadzarkan); *kaffarat* (denda-denda tertentu dari akibat pelanggaran tertentu dalam beberapa ibadah); *udhiyah* (penyediaan daging hewan ternak yang disembelih untuk kurban dalam ibadah haji); *baitulmal* (tempat penampungan dana yang bersifat umum bagi kepentingan umum); *shadaqah* (sifatnya suka rela dari setiap orang yang ingin berbuat kebajikan dengan harta bendanya kepada sesama) dan *nafaqah* (untuk membiayai kebutuhan hidup bagi isteri, anak-anak, keluarga dekat yang lemah).

Dalam masalah penyantunan fakir miskin ini, al-Qur' ān mengingatkan bahwa pada hakikatnya seluruh harta kekayaan tersebut adalah milik Tuhan (Q.S. 10:55), dan pemilikan oleh seseorang hanyalah bersifat relatif sebagai amanah dari Tuhan dan penggunaan harta itu harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk kepentingan umum, sebagaimana firman-Nya:

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذ ين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu

¹³² Ali Yafie, *Islam.*, hal. 8-9.

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadid, ayat 7).

Juga dalam ayat lain Allah berfirman:

واتوهم من مال الله الذي اتاكم

...berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...(al-Nur, ayat 33).

Oleh karena itu, jika terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, karena sebenarnya dalam harta orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin. Firman Allah dalam Al-Qur' ān menegaskan:



والذين في اموالهم حق معلوم. للسا ئل والمجترؤ م

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. al-Ma'arij, ayat 24-25).¹³³

Mengenai hak orang miskin pada harta orang-orang yang kaya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa Ali mengatakan, “Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di suatu negeri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang miskin di negeri tersebut. Yang berwenang di negeri tersebut harus memaksa orang-orang kaya jika dana-dana yang diperoleh melalui zakat ternyata tidak mencukupi.”¹³⁴

Selanjutnya, juga tercatat dalam sejarah Khalifah Abu Bakar, bahwa dia pernah memerangi orang-orang murtad dalam permulaan memegang tampuk

¹³³ Lihat juga, Q.S. 51:19.

¹³⁴ Mauloud Kassim Nait-Belkacem, “Konsep Keadilan Sosial di dalam Islam”, dalam Altaf Gauhar, *Tantangan Islam*, (Bandung,: Pustaka, 1983), hal. 161.

kekhalifahan, sehingga mereka menunaikan zakat.¹³⁵ Begitu pentingnya peran zakat dalam ajaran Islam, hingga kata zakat dalam Al-Qur' ān selalu dirangkaikan dengan shalat dan disebut sebanyak 83 kali.¹³⁶ Dalam Islam, perintah untuk bersikap dermawan dengan melakukan kebajikan dalam bidang ekonomi kepada orang yang membutuhkan didasarkan pada pemikiran bahwa tindakan itu untuk memenuhi hak orang lain, dan bukan hanya sebagai kedermawanan terhadap pengemis.¹³⁷ Hal ini juga termasuk bagian dari ibadah, dan Al-Qur' ān menyuruh untuk bersedekah dengan menyebut dalam lebih dari 73 ayat.¹³⁸

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pandangan Islam mengenai kemiskinan merupakan refleksi dan konsekuensi dari sistem kepercayaan ajaran Islam tentang tauhid, yang memutlakkan Allah sebagai Pemilik dan Pencipta alam semesta. Kepemilikan harta oleh seseorang hanya bersifat relatif dan titipan dari Allah untuk dipergunakan sesuai dengan aturan yang dikehendaki-Nya. Karena kemiskinan adalah merupakan kondisi yang dapat menurunkan dan menghalangi kemungkinan seseorang untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai khalifah di dunia ini, maka Islam memandang kemiskinan sebagai hal yang harus ditanggulangi dalam suatu hubungan persaudaraan. Gambaran hubungan persaudaraan dalam Islam dikatakan dalam sebuah hadits:

¹³⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, cet. II, (Jakarta, :LSIK, 1978), hal. 79.

¹³⁶ Ahmad A. Saifuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1984), hal. 68.

¹³⁷ Muhammad Fazlur Rahman Anshari, *Konsep Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1983), hal. 177-178.

¹³⁸ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam.*, hal. 181.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. (متفق عليه)¹³⁹

Dari Nu'man bin Basyir, ra. bahwa Rasulullah telah bersabda, "Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta, kasih, dan kelembutan hati mereka adalah bagaikan satu badan. Apabila satu anggota menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak dapat tidur dan panas. (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

Karena itu, maka pembagian ekonomi secara tidak benar hanya dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab jika Tuhan tidak dijadikan satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudak, antara lain oleh harta benda dan nafsunya (Q.S. 25:43-44). Upaya kearah penanggulangan masalah kemiskinan ini pun berkaitan dengan sistem peribadatan dalam ajaran Islam, seperti dalam shalat sebagai suatu bentuk pendidikan dan komunikasi dengan Tuhan yang pada gilirannya akan membentuk pribadi yang tercegah dari perbuatan keji dan munkar (Q.S. 29:45).

Karena sedemikian luas dan jelasnya uraian Al-Qur' ān dan Hadits mengenai kemiskinan tersebut, Jalaluddin Rahmat¹⁴⁰ mengatakan bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Qur' ān dan Sunnah akan segera menemukan perhatian yang besar dari ajaran Islam terhadap masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Tidak perlu dirumuskan lagi teologi

¹³⁹ Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Risyadush Shalihin*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hal. 129

¹⁴⁰ Jalaludin Rahmat, *op.cit.*, hal. 18.

pembebasan. Kemiskinan adalah bencana sosial yang dapat mengancam tatanan kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara.

Terlepas dari hal itu semua, maka kemiskinan merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa dunia ketiga atau bangsa modern, terutama di Indonesia. Persoalan ini tentu saja perlu ditanggulangi secara simultan menyeluruh dengan melihat akar persoalan.

Penanggulangan masalah kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan mencanangkan dua kebijakan pokok pembangunan yaitu:

- (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; dan
- (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemertaaan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.¹⁴¹

Namun demikian, upaya-upaya menangulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan masalaha semakin deras mencuat ke permukaan.

¹⁴¹ Suyanto Usman, *ibid.*, hal. 130.

Dalam ajaran Islam, masalah kemiskinan memang diakui. Menurut ajaran Islam¹⁴² yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya.

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendungnya, serta mengawasinya kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketemtraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.¹⁴³

Karena kemiskinan merupakan musuh besarnya maka penanggulangannya adalah menjadi kewajiban bagi umatnya, sehingga Muhammad Yusuf al-Qardawy¹⁴⁴ menawarkan beberapa konsep penanggulangan kemiskinan, yaitu;

1. Bekerja
2. Mencukupi keluarga yang lemah
3. Zakat
4. Dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumbernya
5. Keharusan memenuhi hak-hak selain zakat, dan
6. Sedekah sukarela dan kebajikan individu.

Secara umum masalah penaggulangan kemiskinan dalam Islam selama ini memang masih bertumpu pada zakat, sebab bisa menjadi sumber dana tetap

¹⁴² Zainal Abidin Ahmad, *dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 128.

¹⁴³ Muhammad Yusuf al-Qardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, judul asli (*Muskilatul Wa-Kaifa 'Alajahal Islam*) penerjemah: Umar Fanany (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1996), hal. 51.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 52-209.

yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, terutama fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa mengantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.¹⁴⁵ Jadi inti upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan kaum miskin.

4. Karakteristik Ekonomi Islam

Perekonomian Islami, sesungguhnya, dapat meningkatkan keseimbangan diantara aspek sosial dan ekonomi masyarakat, kepentingan pribadi dan sosial serta juga di antara individual, keluarga, masyarakat, dan negara. Ia dapat efektif menangani persoalan-persoalan seperti distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yang tidak dapat ditangani oleh kapitalis.¹⁴⁶ Sehingga ada beberapa, karakteristik yang terdapat dalam ekonomi Islam itu yaitu; ilahiyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan.¹⁴⁷

a. Ilahiyah

Islam sebagai *the holistic way of life*, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian pada aspek humanis (kemanusiaan). Manusia diberi otonomi untuk menentukan pilihan dalam upaya batas-batas yang jelas, sesuai dengan aturan Tuhan untuk tujuan dan kepentingan manusia sendiri. Dengan tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan

¹⁴⁵ Masfuk Zuhdi. *Op. Cit.*, hal. 235.

¹⁴⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 14.

¹⁴⁷ Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan Didin Hafidhudiin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hal. 57.

dan perintah Tuhan manusia akan merasakan kedamaian dalam jiwanya. Bahkan dalam hal yang menyangkut urusan-urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberikan otonomi untuk membuat keputusan yang memihak pada kesejahteraan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini bisa dinisbatkan pada pernyataan Nabi bahwa *“kamu lebih mengetahui urusan duniamu”*.¹⁴⁸

Ekonomi Islam adalah ekonomi *ilahiyah*, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya juga tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiyah dan pada tujuan ilahi. Seorang muslim melakukan kegiatan produksi, di samping memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan masyarakatnya, juga karena melaksanakan perintah Allah SWT (QS 67:15). Ketika seorang muslim mengkonsumsi dan memakan dari sebaik-baiknya rezeki dan yang halal, ia merasa sedang melaksanakan perintah Allah (QS 2: 168). Ia menikmatinya dalam batasan kewajaran dan kesehajaan, sebagai bukti tunduknya kepada perintah Allah (QS 7: 31-32). Ketika ia melakukan kegiatan usaha, ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak melakukan kegiatan riba dan menimbun barang, tidak akan berlaku zhalim, tidak akan menipu, mencuri, korupsi, dan kolusi, dan tidak akan pula praktik suap-menyuap (QS 2:188). Ketika memiliki harta, seorang muslim

¹⁴⁸ Muhammad, *Paradigma, metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 64.

tidak akan menahannya karena kikir, tidak akan membelanjakannya dengan boros, dan merasa bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT.¹⁴⁹

Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan tujuan, melainkan semata-mata sarana yang lazim baginya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan sarana penunjang dan pelayan bagi realisasi akidah dan syariat.

b. Akhlak

Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Akhlak adalah landasan sekaligus bingkai bagi setiap aktivitas ekonomi. Jack Aster, pakar ekonomi prancis dalam bukunya, *Islam dan Perkembangan Ekonomi*, menyatakan bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan mengandung nilai-nilai akhlak yang tinggi. Kedua hal ini berkaitan erat, tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya.

Dari sini bisa dipastikan bahwa kaum muslimin tidak akan menerima sistem ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan material dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat moral. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mengambil kekuatan wahyu al-Qur'ān, dan karena itu pasti berakhlak. Akhlak ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai,

¹⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 233.

dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat era industrialisasi (Yusuf Qardhawi, 1997).¹⁵⁰

Titik sentral akhlak atau etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap kemaha kuasa Tuhan. Setiap orang menggabungkan pada dirinya baik sebagai manusia individual maupun manusia kolektif, dan terdapat pertukaran yang mendasar antara dua segi personalitas manusia ini.

c. Kemanusiaan

Ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan, artinya ekonomi yang memungkinkan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat kejiwaan. Manusia merupakan tujuan-antara kegiatan ekonomi dalam Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dengan memnafaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah SWT kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Di antara nilai kemanusiaan yang sangat menonjol dalam segala aktivitas yang diperintahkan ajaran Islam- termasuk kegiatan ekonomi-adalah keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling membantu, dan tolong menolong. Karena itu harta tidak boleh hanya dimiliki oleh sekelompok orang kaya saja (QS 59:7).¹⁵¹

Sedangkan menurut Syed Nawab Haedar Naqvi, dalam bukunya *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, bahwa pandangan Islam terhadap manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 232.

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 233.

direpresentasikan dengan empat aksioma etik-Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan/Kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak bebas (*Free Will*), serta Tanggung-jawab (*Responsibility*)- yang bersama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi. Meskipun, masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim.¹⁵²

Konsepsi tanggung-jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan.¹⁵³ Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal. *Pertama*, tanggung-jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia-keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, status kekhalifahan ini lebih merupakan sebutan (keadaan yang bersifat potensial) daripada suatu fakta (keadaan yang sudah terwujud). Ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh pada diri manusia untuk bisa naik ke tingkat yang agung ini, yang umumnya harus berbuat baik seperti memberi kepada orang yang miskin dan yang membutuhkan, dengan merelakan harta yang paling dicintai, untuk itu manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri dari ketamakan dan kerakusan.¹⁵⁴ *Kedua*, konsep tanggung-jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukan dengan pemaksaan, yang ditolak sepenuhnya oleh Islam.

¹⁵² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, judul asli *Islam, Economics, and Society*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 37.

¹⁵³ Misalnya, sebagai konsep ekonomi, tanggung-jawab tidak semata-mata direpresentasikan dengan 'interdependensi fungsi kesejahteraan individu'- yakni, di mana kesejahteraan individu secara langsung dipengaruhi oleh kesejahteraan individu lain- melainkan jauh lebih lama.

¹⁵⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas.*, hal. 47.

Ketiga, tanggung-jawab manusia adalah seukuran dengan kemampuan fisik dan finansialnya untuk memikulnya. Dan *Keempat*, tanggung-jawab seorang manusia berakhir manakala kebebasan seorang manusia lain bermula.¹⁵⁵

Dengan demikian, dalam menunaikan tanggung-jawabnya, orang harus berhati-hati dalam melaksanakannya secara moderat dan dengan keputusan yang baik. Bukan individu yang memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang terbaik buat orang lain dan masyarakatnya. Dia harus mematuhi norma-norma masyarakat tentang perilaku yang baik; dan harus menghormati hak-hak individu lain dalam melaksanakan tanggung-jawab sosialnya sendiri.¹⁵⁶

d. Pertengahan/Keseimbangan

Keseimbangan merupakan ruh dari ajaran Islam, sekaligus merupakan ruh pula bagi kegiatan perekonomian Islam. Misalnya keseimbangan dalam pemilikan antara individu dan masyarakat (negara).¹⁵⁷ Berkenaan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-'adl* dan *al-Ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. *al-Qur'ān* menyatakan; “*Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan.*” (QS. 16:90).¹⁵⁸ Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan atau kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial: hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 47-49.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 49.

¹⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah.*, hal. 233.

¹⁵⁸ Untuk menghindari kerancuan perlu pembaca catat bahwa kata “kesejajaran” dalam makalah ini digunakan untuk menjelaskan makna *al-'adl* dan *al-ihsan*. Sadr (1982) menggunakan keseimbangan sosial untuk kata *al-'adl*; tetapi konotasinya lebih cocok pada konsep terkait dalam *al-Qur'ān* yakni, *mizan*.

menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang baik.

Sebagaimana kesatuan, sifat kesejajaran juga terbentuk sejak semula pada diri Tuhan sendiri, yang juga Maha Adil, Pemberi Kesejajaran. Inilah alasan mengapa prinsip keseimbangan atau kesejajaran merupakan nilai etika fundamental, yang terangkum sebagai besar ajaran etik Islam- yakni, diinginkan pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spektrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.¹⁵⁹

Ini juga menjelaskan mengapa nilai-nilai ini menentukan bukan hanya kekayaan yang dapat diinginkan dari institusi-institusi manusia, tetapi juga anjuran yang tegas bahwa seluruh institusi-institusi manusia harus ditata-ulang jika tidak sesuai dengan nilai-nilai ini; dan mengapa, dalam kebanyakan konteks masyarakat, tuntutan untuk mempertahankan *status-quo* yang tidak berkeadilan, khususnya yang berkenaan dengan struktur kepemilikan kekayaan (pribadi), bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas.*, hal. 41.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu bertujuan untuk mengungkap apa yang ada di lapangan sebagaimana apa adanya. Studi dilakukan dengan memilih BKM Telaga Artha kelurahan Simbangkulon kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. BKM ini dipilih secara *purposive* yang tujuannya adalah karena adanya corak yang berbeda dari BKM yang berada di kelurahan ini; yaitu ada yang relegius, responsif, mayoritas penduduknya pedagang batik dan home industri batik, terbuka, penuh pergulatan pemikiran tidak seperti kebanyakan kelurahan lain yang masih kurang religius, dan swadaya masyarakat kurang.

Dengan metode *field research*, peneliti terjun langsung menggali data dilapangan dengan cara observasi partisipasi aktif (*participation action research*), di samping dengan menggunakan metode wawancara. Tujuan utamanya adalah medeskripsikan kondisi di lapangan, sehingga dapat dipelajari masalah-masalah dan program kerja yang telah dilakukan oleh BKM Telaga Artha. Terutama yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. Lebih dari itu, juga mengungkap paradigma masyarakat mengenai pembangunan, perilaku, situasi-situasi tertentu, pengaruh dari suatu

fenomena.¹ Wawancara kepada para anggota BKM, perangkat BKM, kelurahan, pemuka masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait dengan masyarakat dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan dari mereka tentang fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.² Sebagai pendukung dalam memaknai penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Karena penelitian ini sifatnya kualitatif, maka proses penentuan sampel diambil langsung dari sumber primer, yaitu BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon kabupaten Pekalongan. Sebagai obyek penelitian BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bekerja sama dengan memberi informasi secukupnya sesuai kebutuhan. Terkait dengan penelitian ini, penulis menganggap obyek bahasan yang ada cukup mampu mewakili keakuratan data yang diperoleh di lapangan.

Mengingat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian, maka pengambilan obyek hanya dikhususkan pada BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan yang telah ada program penanggulangan kemiskinannya.

¹ Robert Bogdan & Stevan J Taylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomological Approach to Social Science* (New York: Jonh Willey & Son, 1975), hal. 33

² L. Adam, *Methods and Forms of Investigation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* (Oxford: Oxford University Press, 1952), hal. 5

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara interaktif. Pada observasi akan dipandu memakai data-data penelitian yang diperlukan misal kondisi, situasi, proses atau perilaku³ yang dibutuhkan peneliti. Dokumentasi penelitian akan memakai *form pencatatan dokumen* yang berupa tulisan maupun catatan objek yang sah.⁴ Sedang pada wawancara yang dipakai tidak menggunakan sistem angket tetapi memakai sistem wawancara interaktif, hal ini agar data interaktif tersebut bebas dari spekulatif.⁵ Lebih dari itu, metode angket sendiri lebih tepat digunakan dalam penelitian kuantitatif. Bukan kualitatif. Para informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah BKM/LKM yang terdiri dari 9 orang namun hanya diambil beberapa orang saja, kemudian perangkat BKM seperti Unit Pengelola Lingkungan 1 orang, Unit Pengelola Sosial 1 orang dan Unit Pengelola Ekonomi 2 orang, kemudian pihak pemerintah kelurahan 2 orang, dari pihak konsultan atau fasilitator 2 orang, dan KSM yang merupakan kumpulan dari warga miskin sekaligus selaku penerima manfaat 5 orang. Serta masyarakat bukan penerima manfaat langsung 3 orang.

Beberapa bahan-bahan data yang bersifat teoritis diambil dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik dari literatur primer maupun sekunder. Dan untuk mengumpulkan data, penulis sebelumnya

³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 53.

⁴ *Ibid*, hal. 52

⁵ *Ibid* hal.

telah menghubungi pihak BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan untuk dimintai kesediaanya dalam studi penelitian ini.

D. Triangulasi

Data yang telah terkumpul diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang mendukung atau bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar representatif.⁶ Untuk itu dapat digunakan beberapa metode, yakni dengan menggunakan banyak metode atau banyak sumber untuk satu data, dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dengan ucapannya di kala sendiri, antara hasil wawancara dengan dokumen, antara kata orang dengan implementasi atau Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) PNPM-Mandiri, antara keadaan dengan prospektif.

Wawancara mendalam dengan sumber data dengan sumber data digunakan pedoman perspektif-emik yaitu perspektif atau sudut pandang yang datang dari kalangan pelaku PNPM-Mandiri seperti, BKM, unit pengelola (UPK, UPS, dan UPL), para warga miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), juga masyarakat umum yang tidak menerima manfaat langsung. Triangulasi data juga dilakukan *check-recheck*, *cross check*,

⁶ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 34.

konsultasi dengan konsultan atau fasilitator kelurahan yang ahli dengan cara *expert judgement*.

Catatan lapangan yang begitu banyak dari hasil pengumpulan data begitu banyak selanjutnya diringkas, ditelusuri tema sentralnya, dikelompokkan ke dalam gugus-gugus, dikoding (kodifikasi). Miles dan Huberman menyatakan bahwa kode adalah peralatan yang mengorganisasikan data sesuai dengan permasalahan atau tema.⁷ Kode membuat data menjadi mudah dimengerti, mengarahkan jalinan hubungan dan mempermudah untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi bermakna.⁸ Dalam penelitian ini, kodifikasi dilakukan dengan sistem catatan pinggir yaitu memberikan kode-kode deskriptif sebagai pertanda suatu kategori gejala, perilaku atau sifat tertentu di sebelah margin kiri penggalan teks serta mencantumkan catatan praanalitik disebelah margin kanan dari penggalan teks. Untuk itu, catatan lapangan yang dihasilkan dari pengamatan dan wawancara kemudian diringkas. Kalimat-kalimat ringkas ini diidentifikasi tema sentralnya yaitu konsep PNPM-Mandiri dalam pengentasan kemiskinan, implemntasi di lapangan dan pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi PNPM-Mandiri dalam pengentasan kemiskinan.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan teknik analisa interaktif. Dengan cara data-data yang diperoleh dari lapangan akan

⁷ Miles dan Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*, (Sage Publication, 1994), hal. 88.

⁸ Zubaedi, *Pemberdayaan* ., hal. 35.

dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa. Berdasarkan analisa yang mendalam, barulah kemudian peneliti menyimpulkan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Dengan begitu, saran dan rekomendasi sebagai hasil dari penelitian ini dapat diramu.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini dapat digolongkan dalam dua pendekatan, yakni: pendekatan fenomenologi dan pendekatan normatif. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* yang berarti menunjukkan (makna) dirinya sendiri atau apa yang tampak. Jadi fenomenologi berarti ilmu yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Pendekatan fenomenologi ini, diilhami oleh cara pendekatan filosofis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, seorang keturunan Yahudi yang lahir di Prosznitz, Moravia pada tahun 1859.⁹ Dalam pandangan fenomenologik, penelitian bermakna memahami peristiwa-peristiwa dalam kaitanya dengan orang dalam situasi tertentu.¹⁰

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Jadi yang diteliti ialah aspek subjektif

⁹ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 115.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rpsdakarya, 1995), hal. 23.

dari perilaku orang. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang sedang diteliti sedemikian rupa sehingga mengetahui dan mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh peneliti di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang memandang masalah dari legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.¹² Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat fakta yang diimplementasikan PNPM-MP di lapangan kemudian dilihat dari sudut pandang legal-formalnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹ *Ibid.*, hal. 9

¹² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010), hal. 189.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Simbang Kulon

1. Keadaan Geografis

a. Letak

Kelurahan Simbang Kulon merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kelurahan / kelurahan di Kecamatan Buaran. Dan salah satu dari 272 Kelurahan di kabupaten Pekalongan. Kelurahan Simbang Kulon merupakan wilayah dataran rendah atau perkotaan. Dan jarak antar ibu kota Kajen dengan Kecamatan Karangdadap adalah sejauh 20 km.

b. Kondisi Geografis

Kelurahan Simbang Kulon termasuk kelurahan dataran rendah terletak di wilayah pantura tepatnya di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Pekalongan. Dengan batas – batas wilayah Kelurahan Simbang Kulon sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kradenan Kota Pekalongan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Banyurip Alit Kota Pekalongan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kertijayan dan Kelurahan Wonoyoso Kecamatan Buaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Simbang Wetan Kecamatan Buaran

2. Keadaan Demografi

a. Kondisi Sosial-Kependudukan

Di Kelurahan Simbang Kulon , wilayahnya terbagi menjadi 10 (sepuluh) RW dengan jumlah RT 28 (dua puluh delapan). Adapun ketua RW di Kelurahan Simbang Kulon adalah sebagai berikut:

1. H. Chaeron Ikhsan : Ketua RW I
2. Tachroni : Ketua RW II
3. Fairi : Ketua RW III
4. Subkhi, S.Pdi : Ketua RW IV
5. H. Ridwan : Ketua RW V
6. Kasnawi : Ketua RW VI
7. Nuryasin : Ketua RW VII
8. H. Jaelan : Ketua RW VIII
9. Mohc. Halim : Ketua RW IX
10. Munadi : Ketua RW X



b. Kondisi Sosial-Kependudukan

Berdasarkan data "Monografi Kelurahan Tahun 2010", penduduk di Kelurahan Simbang Kulon sejumlah 8.461 jiwa dengan laki-laki sebanyak 4.247 jiwa dan perempuan sebanyak 4.213 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi kependudukan dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk Kelurahan Simbang Kulon berdasarkan kelompok umur:

Tabel 4.1. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (th)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	383	404	787
2	5-9	438	445	880
3	10-14	437	454	891
4	15-19	495	511	1.005
5	20-24	439	408	847
6	25-29	395	353	748
7	30-34	313	323	636
8	35-39	325	305	630
9	40-44	258	279	547
10	45-49	246	209	454
11	50-54	195	188	383
12	55-59	145	149	294
13	60 +	181	185	363
TOTAL		4.247	4.213	8.461

Sumber: Data Monografi Kelurahan Simbang Kulon, Tahun 2010

Berdasarkan data struktur penduduk tahun 2010 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 0-14 tahun dan usia 55 tahun ke atas (usia nonproduktif) adalah sebesar 3215 jiwa atau 38 % pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penduduk usia 15-54 tahun (usia produktif) sebesar 5246 jiwa atau 62 % pada tahun 2010.

Dari data komposisi penduduk menurut usia tersebut dapat terlihat bahwa penduduk usia produktif lebih besar jumlahnya daripada penduduk usia nonproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Kelurahan Simbang Kulon cukup besar, karena usia produktif yang merupakan usia kerja cukup besar.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Simbang Kulon sebagian besar mempunyai mata pencaharian adalah sebagai buruh industri. Sedangkan mata pencaharian

penduduk Kelurahan Simbang Kulon (Bagi umur 15 tahun ke atas) yang lain, meliputi:

Tabel 4.2. Banyaknya Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah (orang)
1	Petani sendiri	18
2	Buruh Tani	69
3	Nelayan	0
4	Pengusaha	35
5	Buruh industri (batik)	1.663
6	Buruh bangunan	39
7	Pedagang	261
8	Pengangkutan	
No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah (orang)
9	PNS/ABRI/TNI	65
10	Pensiunan	257
11	Lain-lain	679
Jumlah		3.881

Sumber: Data Monografi Kelurahan Simbang Kulon, Tahun 2010

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kelurahan Simbang Kulon pada tahun 2010 menurut jenis mata pencapaian, terlihat bahwa mata pencapaian penduduk di Kelurahan Simbang Kulon didominasi oleh mata pencapaian di luar sebagai petani, pengusaha, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, pegawai negeri, pensiunan, buruh industri ataupun sebagai petani sebanyak 1.663 orang atau sekitar 43 %.

Berikut ini banyaknya rumah tangga menurut usaha sektor ekonomi di Simbang Kulon:

Pertanian	: 42
Industri	: 216
Perdagangan	: 420
Angkutan	: 36

Jasa : 872

Sedangkan banyaknya perusahaan di Simbang Kulon:

Industri sedang : 8

Industri kecil : 98

Kerajinan rumah tangga : 67

Melihat dominasi mata pencaharian penduduk di atas dapat diketahui bahwa pola kehidupan masyarakat sudah berciri kehidupan perkotaan yang bergerak aktivitas dominan di Kelurahan Simbang Kulon adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perindustrian. Sebagian besar Industri rumah tangga. Baik batik maupun makanan ringan

Aktivitas penduduk yang berbasis industri tersebut umumnya berada di bagian pinggir perbatasan Kelurahan Simbang Kulon. Melihat letak Kelurahan Simbang Kulon yang dilalui jalur bis umum (dalam kota), dimungkinkan berkembangnya aktivitas industri yang didukung oleh aktivitas jasa dan perdagangan sebagai aktivitas penunjang kegiatan industri.

d. Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama Kelurahan Simbang Kulon dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Simbang Kulon beragama Islam, yaitu sebesar 8.461 orang atau mencapai 100 %. Mayoritas penduduk yang beragama Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kelurahan Simbang Kulon, terlihat bahwa nuansa religius yang masih kental.

B. Bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Konsep dan Bentuk PNPM Mandiri Berdasarkan Teori

a. Akar Penyebab Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan charity dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyarakat, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai capital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi capital sosial serta perilaku masyarakat yang melemahkan serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggungjawab (*tidak pro poor dan good governance oriented*). Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotype dan skeptisme di masyarakat.¹

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi *kelembagaan masyarakat* yang belum berdaya, yang tidak dikelola dengan jujur dan ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, (Jakarta: 2008), hal.111.

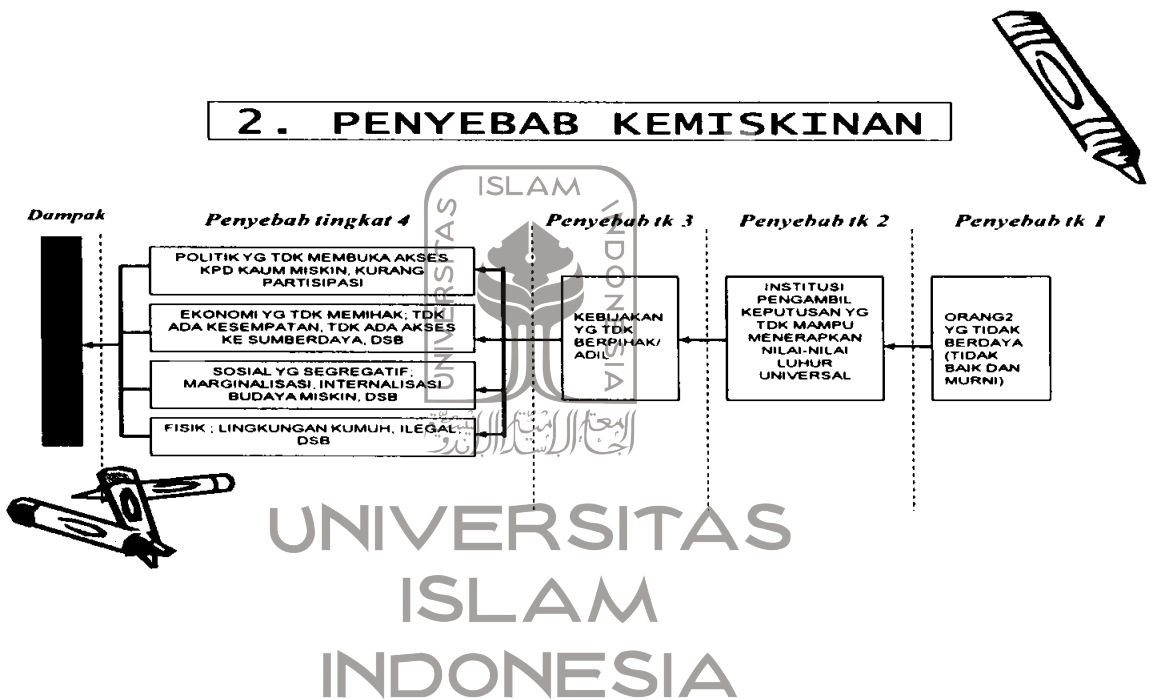
Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representative. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representative dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Tidak keberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasa, keadilan dan kejujuran.

Oleh karena itu, PNPM-MP atau P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai

universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ihlkas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemsyarakatan (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi, dll).²

Gambar 4.1. Pandangan P2KP tentang Akar Penyebab Kemiskinan



b. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan

Pemahaman mengenai akar penyebab dari persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip-prinsip kemsyarakatan (*good governance*) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

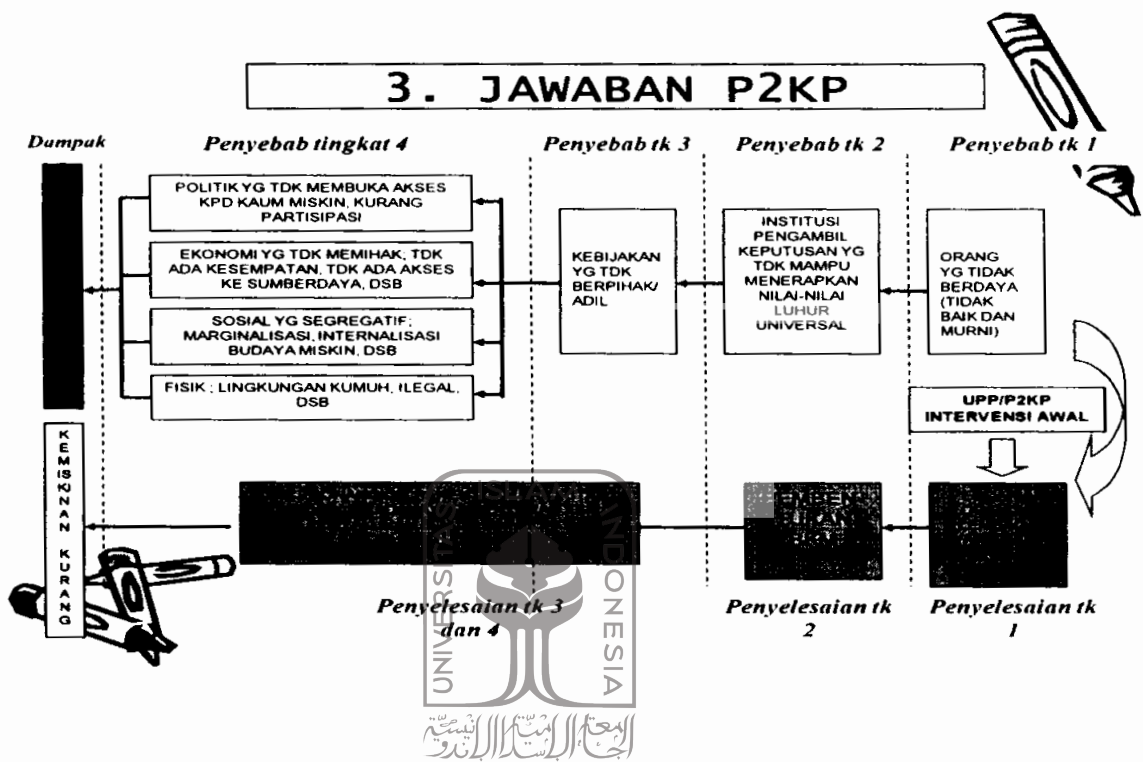
² *Ibid.*, hal.. 111

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.³

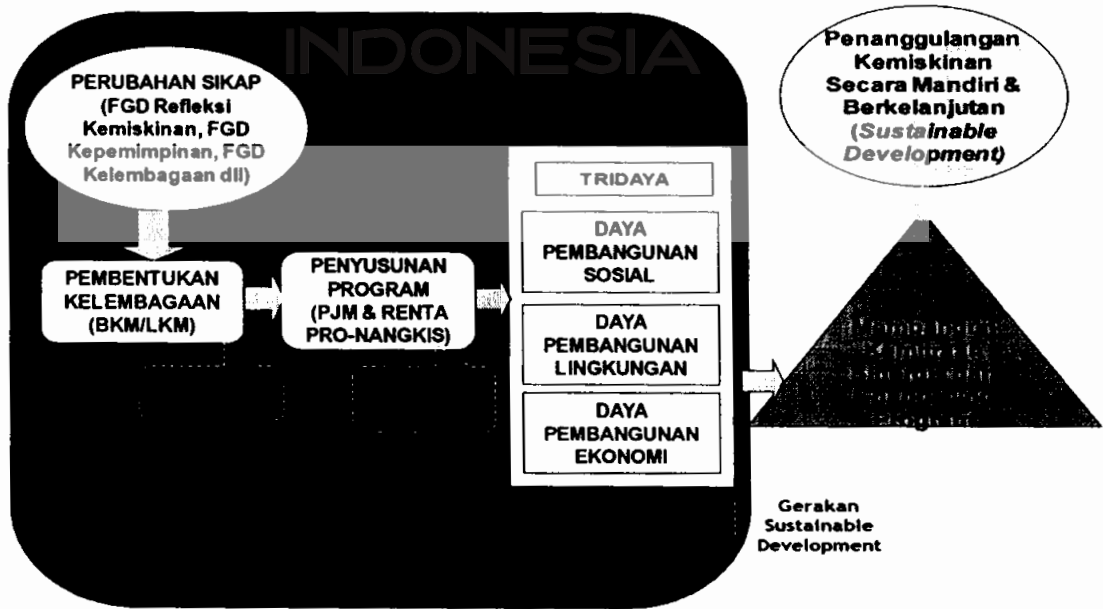
Kemandirian kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan public di tingkat local agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintah yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan pemukiman, maupun sosial.

³ *Ibid*, hal.. 114.

Gambar 4.2. Intervensi P2KP dalam Penangan Kemiskinan



Gambar 4.3. Penangan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui P2KP



c. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya)

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep *Tridaya*. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan P2KP adalah melalui penerapan konsep *Tridaya* sebagai berikut.⁴

1) *Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection)*;

Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan pemukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar

⁴*Ibid.*, hal.. 118.

perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.⁵

2) *Pengembangan Masyarakat (Social Development);*

Tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya meningkatkan potensi segenap unsure masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang atau akses dalam program/kegiatan setempat.

3) *Pengembangan Ekonomi (Economic Development);*

Dalam upaya menyasrakan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan ketrampilan masyarakat miskin dan atau pengangguran perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk peningktan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.⁶

⁵ *Ibid.*, hal., 118

⁶ *Ibid.*, hal.. 119.

2. Bentuk-bentuk PNPM Mandiri Berdasarkan Kelurahan Simbangkulon

a. Proses Pelaksanaan PNPM Mandiri

1) Pembentukan BKM

Badan Keswadayan Masyarakat(BKM)/LKM merupakan nama '*generic*' dari suatu lembaga pimpinan kolektif *masyarakat warga* di tingkat kelurahan/desa, yang diprakrasi serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat warga dalam upaya memenuhi kebutuhan/kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama, dengan berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan (ikhlas, jujur, dan adil).

BKM/LKM bermakna sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat yang menjadi wadah masyarakat bersinergi dalam memenuhi kebutuhan bersama dan wadah menggalang segenap potensi kekuatan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama maupun mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar.⁷

Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu memperthankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsure/perwakilan atau pihak-pihak di luar masyarakat.

⁷ Depertemen Pekerja Umum, Idem: *Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Membangun BKM/LKM*, (Jakarta: 2007), hal. i

Pembangunan BKM/LKM didasari atas kebutuhan warga masyarakat, melalui refleksi-refleksi, yaitu;

- Refleksi Kemiskinan, untuk menemukan penyebab kemiskinan termasuk pola-pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.
- Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga-lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi organisasi masyarakat warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategi, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna substansi organisasi masyarakat warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penelian warga masyarakat sendiri, tidak di atas namakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsure/perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalan dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.

- Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap criteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.
- Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsure dengan mentasnamakan seluruh masyarakat.
- Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.⁸

2) Pemilihan Anggota BKM/LKM

Anggota BKM/LKM dipilih dari dan oleh warga masyarakat di kelurahan bersangkutan yang memenuhi kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama (jujur, rendah hati, tanpa pamrih, misalnya) yang ditunjukkannya dalam hidupnya sehari-hari. Kriteria dasar ini harus disepakati terlebih dahulu oleh para calon pemilih (warga) dan ditetapkan sebagai aturan main dalam membentuk BKM/LKM. Konsep dasar yang dianut dalam memilih

⁸ Departemen Pekerja Umum, Idem: *Mengenal BKM/LKM*, (Jakarta: 2007), hal. 9

pemimpin adalah : *"Lebih baik mendapat pilihan pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik dari pada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari dari kumpulan orang-orang buruk"*. Dengan dasar pemikiran ini maka pemilihan anggota BKM/LKM sejak awal dilakukan melalui proses penjaringan (menyaring) orang-orang baik atau orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat kemanusiaan, yang biasanya orang tersebut rendah hati, tidak suka menyombongkan diri dan tidak suka mengumbar janji-janji.

Sehingga menyaring orang-orang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE, tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu proses pemilihan dilakukan secara khusus sebagai diuraikan di bawah.

Pemilihan dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih harus menulis 3 sampai dengan nama (sesuai kesepakatan warga) yang dianggap memenuhi kriteria tersebut di atas secara rahasia, dikumpulkan dan dihitung. Kemudian dipilih 9 s/d 13 nama yang mendapat perolehan suara terbanyak sebagai anggota BKMLKM/. Para anggota BKM/LKM tersebut kemudian memilih siapa diantara mereka yang akan menjabat koordinator, wakil, sekretaris. Sesuai dengan kemampuan mereka dsb.

Pemilihan atau penjaringan utusan dilakukan berjenjang dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan seterusnya. Yang penting pemilihan utusan harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal (komunitas terkecil

seperti RT misalnya) karena pemilihan didasarkan atas rekam jejak (track record). Bila jumlah RT sedikit maka semua utusan yang terpilih di tingkat RT, yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya misalnya 3 s/d 5 orang, kemudian pada hari yang telah ditentukan langsung berkumpul di kelurahan/Kelurahan untuk memilih anggota BKM/LKM yang jumlahnya 9 s/d 13 orang dari antara utusan. Jadi para utusan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bila jumlah RTnya terlalu banyak maka para utusan RT dapat melakukan pemilihan di tingkat RW untuk menetapkan utusan RW yang jumlahnya juga telah disepakati sebelumnya di tingkat kelurahan/desa, baru kemudian utusan RW, pada hari yang telah ditetapkan berkumpul di kelurahan/Kelurahan untuk memilih anggota BKM/LKM dari antara mereka.

Tidak adanya pencalonan memungkinkan anggota masyarakat memilih tanpa paksaan siapapun yang mereka anggap bisa mewakili sifat-sifat baik kemanusiaan tersebut, sesuai pengalaman interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya kampanye, karena yang dipilih adalah orang yang perbuatan sehari-harinya saat ini sesuai dengan kriteria tersebut di atas (rekam jejak), bukan perkataan (janji) tentang masa depan yang belum pasti. Jadi konsepnya adalah membandingkan dan mengkonfirmasi perbuatan/perilaku sehari-hari orang yang akan dipilih (rekam jejak) dan bukan perkataan (janji).⁹

BKM Telaga Arta dibentuk melalui Rembug Pembentukan BKM pada tanggal 20 November tahun 2007 yang dihadiri oleh 102 orang. Dalam

⁹ Departemen Pekerja Umum, Idem: *Modul Tugas dan Fungsi BKM* (Jakarta: 2007), hal. 25-27.

rembug tersebut dibahas dan disepakati Visi, Misi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM. Visi BKM Telaga Arta adalah Terciptanya organisasi masyarakat (civil society organization) di tingkat lokal (kelurahan) yang memiliki kemampuan strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.¹⁰

Sedangkan Misinya membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan agar menjadi penggerak motivator dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan. Dalam rembug tersebut juga terpilih sembilan orang sebagai anggota Pimpinan Kolektif BKM yang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita dengan profesi dan latar belakang antara lain karyawan.

Koordinator BKM dipilih melalui voting tertutup oleh para anggota BKM terpilih secara periodic (bergantian) karena setiap anggota BKM memiliki peluang yang sama sebagai Koordinator BKM. Saat ini Koordinator BKM dipegang oleh H. Ma'mun BKM ini diaknotariskan pada tanggal Desember 2007, tahun 2007, dengan nomor Akta 17

Selanjutnya BKM memfasilitasi Rembug Penyepakatan dan Penetapan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk masa berlaku 3 tahun dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk jangka waktu satu tahunan. Adapun PJM Pronangkis disepakati pada tanggal 27 bulan November tahun 2007.¹¹

¹⁰ Media Warga Simbang Kulon Edisi Perdana, 2008.

¹¹ *Ibid.*, 2008.

3) Struktur Organisasi BKM Telaga Artha

BKM Telaga Arta memiliki visi: mewujudkan kebersamaan dalam membangun kelurahan Simbang Kulon di segala bidang dengan bergotong royong dan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara maupun swasta. Sedangkan Misinya adalah:

1. Memberdayakan masyarakat, peningkatan peran BKM untuk menanggulangi kemiskinan.
2. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kelurahan.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat membangun lingkungan yang sehat.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat membangun social kemasyarakatan.
5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan ekonomi.
6. Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan.¹²

Sedangkan keanggotaan BKM Telaga Arta terdiri dari sembilan anggota sebagai berikut:

¹² PJM Pronangkis Simbang Kulon BKM Telaga Artha Tahun 2008-2010, hal.. 27

Tabel 4.3. Struktur Organisasi BKM Telaga Artha 2007-2010

	BKM	UP-UP	
1	H.M Ma'mun	Sekretariat	: Choiron Cs
2	Midkhol Huda	UPK	: Fdholi
3	Nur Khamid		: Ziad Faroh
4	Fani Walidi		: Maisur Adib
5	Tatik Suprapti	UPS	: H. Fzuzi S
6	Na'isah		: Rizkiyah
7	Dewi Khamdanah		: Hasyim Dahlan
8	Indah R.	UPL	: Irianto Kaliri
9	Istiqomah		: Halimi HA
			: Sodikun

Sumber: Data Sekretariat BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon, Tahun 2010

4) Perencanaan Program PNPM Mandiri

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BKM/LKM Telaga Artha dalam penanggulangan kemiskinan selalu mendasarkan pada Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis yang telah disusun oleh Tim Perencana Partisipatif, Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas oleh tim penyusun Renta Pronangkis dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah disusun, usulan tata ruang wilayah serta PJM Pronangkis tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, telah disepakati Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) periode tahun 2010 di kelurahan Simbangkulon.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai salah satu pilar program Penanggulangan Kemiskinan yang ada di struktural tingkatan pemerintahan dari pusat sampai Kelurahan selalu mensyaratkan adanya Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) Kelurahan sebagai pedoman penanggulangan kemiskinan masyarakat di tingkat kelurahan. PJM Pronangkis ini merupakan

salah satu bagian dari proses daur program pembangunan partisipatif yang ada di tingkat desa. Yang mana PJM Pronangkis ini memiliki dimensi waktu rencana yang perlu dievaluasi dan direview secara berkala untuk penyempurnaannya kedepan minimal satu kali dalam satu tahun. Dalam proses penyusunan PJM Pronangkis sepenuhnya melibatkan partisipatif masyarakat secara aktif dan mandiri mulai dari tahap identifikasi permasalahan kemiskinan hingga perumusan programnya. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan konsisten yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, khususnya penanggulangan kemiskinan yang dirintis melalui Program Penanggulangan Kemiskinan dan kini telah menjadi motor penggerak dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).¹³

Orientasi kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia telah tertuang dalam konsensus Millenium Development Goals (MDG's) sebagai pijakan orientasi pencapaian berdasarkan tujuannya yang antara lain meliputi : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian balita; (5) Meningkatkan kesehatan ibu melahirkan; (6) Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) Meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup; serta (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan

¹³ *Ibid.*, hal.. 1

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) melalui peningkatan indeks parameter didalamnya yang meliputi (1) Indeks pendidikan; (2) Indeks kesehatan; dan (3) Indeks daya beli sehingga klasifikasi negara Indonesia mampu meningkat dari negara berkembang menjadi negara maju. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, serta mengakomodasi perkembangan dinamika kebutuhan penduduk miskin di Kelurahan Simbang Kulon, maka PJM Pronangkis Kelurahan yang sudah ada menjadi mutlak diperlukan agar PJM tersebut memiliki nilai maksimal untuk direalisasikan dengan tetap dalam koridor pendekatan Tri Daya. Melalui review dan penyusunan PJM Pronangkis ini peluang untuk mewujudkan sinergi program dengan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten Pekalongan maupun tingkat pusat menjadi lebih terbuka dengan pencapaian sasaran kegiatan yang direncanakan dalam PJM Pronangkis menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Proses Penyusunan PJM Pronangkis Desa

Penyusunan PJM Pronangkis kelurahan Simbang Kulon dilakukan sesuai dengan tahapan yang digariskan dalam Program PNPM-MP. Kelurahan Simbang Kulon secara siklus masuk pada tahaun ke empat sehingga dalam penyusunan PJM Pronangkis melakukan Resiklus/pelaksanaan Siklus PNPM kembali dari seluruh tahapan mulai dari Sosialisasi Resuklus sampai melakukan Review Pemetaan Swadaya yang dilakukan dengan proses yang cukup panjang yang telah di dilaksanakan sebelumnya, dimana pelaksanaan

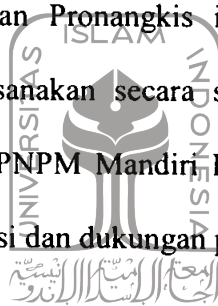
penyusunan PJM Pronangkis ini merupakan tanggungjawab BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu oleh tim relawan.

Proses penyusunan Proses penyusunan PJM Pronangkis Kelurahan Simbang Kulon ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan mekanisme resiklus perencanaan partisipatif. Adapun langkah atau tahapan inti dalam menyusun PJM Pronangkis adalah sebagai berikut :

- 1) Diawali dengan sosialisasi Siklus ditingkat Kelurahan
- 2) Melakukan FGD Refleksi Kemiskinan dari tingkat Basis sampai tingkat Kelurahan.
- 3) Penyempurnaan/Pelaksanaan Ulang PS berorientasi IPM-MDG's
- 4) Pelatihan kepada BKM dan relawan sebagai langkah awal untuk pelaksanaan lokakarya PJM Pronangkis.
- 5) Lokakarya PJM Pronangkis Kelurahan Simbang Kulon dan pembentukan tim perencanaan partisipatif (tim PP) serta pembekalan kepada tim PP.
- 6) Proses penggalan data dan informasi melalui pengkajian ulang Pemetaan Swadaya terutama diskusi kajian permasalahan, hambatan & potensi serta kegiatan sensus per KK atau jiwa miskin.
- 7) Perumusan visi, misi, tujuan yang hendak dicapai dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- 8) Pendataan KK Miskin melalui WST (Wawancara Semi Terstruktur) di seluruh RT dan RW
- 9) Lokakarya Tingkat Kelurahan PJM-Pronangkis.

- 10) Penyusunan draft PJM Pronangkis yang diawali dengan lokakarya tingkat desa, penyusunan draft PJM serta diakhiri dengan sosialisasi dan konsultasi melalui media warga/pertemuan warga/pameran & bazar
- 11) Melakukan revisi PJM Pronangkis serta pengesahan dokumen PJM Pronangkis sebagai keputusan Kelurahan oleh Kelurahan dan LPM
- 12) Mengakomodasikan Rencana Kegiatan PJM Pronangkis Kelurahan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan sumber potensi lainnya (channeling).

Dalam Rencana tahunan Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan, serta rencana kegiatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan pihak pemerintah daerah:



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 4.4. Perencanaan Jangka Menengah Pronangkis Renta Th. 2010

Program	Rincian Kegiatan	Lokasi	Volume	Peninggung Jawab	Sumber Daya	Sumber Dana			Penerima Manfaat		Bulan	
						Total (Rp)	Tersedia (swadaya yang ada)	APBN	Bisa diakses (APBD)	Swasta (Lainnya)		L
PERMASALAHAN SARANA DAN PRASARAN												
Masalah : Sarana ruas jalan perkampungan yang becek, berlumpur ketika hujan dan berdebu jika kemarau												
Target : Sarana jalan perkampungan sudah baik dan layak 90% pada tahun 2010 sehingga memperancar perekonomian sehingga menambah penghasilan warga												
	Peningkatan mutu sarana prasarana jalan di perkampungan	Pelaksanaan Paving Jalan	RW. 1-10		- Tenaga ahli / tukang batu dan bangunan di Kelurahan Simbangkulon - Motivasi dan kemauan yang tinggi warga dalam hal gotong royong - Swadaya masyarakat dan donatur - Dana APBN melalui PNPM - Lahan	100.380.000	8.380.000	65.000.000	27.000.000	570	584	Mei
		Pengerasan jalan		1645 m2		58.500.000	8.500.000	25.000.000	25.000.000	570	584	
		Pengaspalan jalan	Rw. 5	975 m1								
Masalah Bila musim kemarau panjang, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari												
Target : Tersedianya air bersih yang layak konsumsi dan MCK.												
	Peningkatan mutu sarana prasarana air bersih.	Pengadaan sumur artesis	RW. 1-8	1 Unit	- Tenaga ahli / tukang batu dan bangunan di Kelurahan Simbangkulon - Motivasi dan kemauan yang tinggi warga dalam hal gotong royong - Swadaya masyarakat dan donatur - Dana APBN melalui PNPM - Lahan	370.000.000	100.000.000	250.000.000	20.000.000	1.300	1.213	
Masalah: Sarana saluran air hujan / drainase yang belum ada, tidak terawat dengan baik dan tidak teratur												
Target : Sarana saluran drainase perkampungan menjadi lebih baik di tahun 2010												

	Peningkatan mutu saluran air hujan / drainase di perkampungan	Membangun saluran drainase U20	RW. 3	111 m1	UPL	- Tenaga ahli / tukang batu dan bangunan di Kelurahan Simbangkulon - Motivasi dan kemauan yang tinggi warga dalam hal gotong royong. - Swadaya masyarakat dan donatur - Dana APBN melalui PNPM - Dana APBD melalui dinas-dinas terkait - Dana kegiatan sosial dari instansi maupun pihak swasta. - Menggunakan bahan / material yang ada di sekitarnya/ sungai desa - Lahan	50.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	300	275	
Masalah : Tidak tersedianya sarana MCK umum yang memadai bagi warga													
Target :													
Tersedianya MCK umum di tahun 2010													
	Penyediaan sarana MCK umum yang layak bagi warga	Pelaksanaan pembangunan MCK umum	RW 1, dan 3	2 Unit	UPL	- Semangat gotong royong warga masih tinggi - Banyak terdapat tenaga-tenaga tukang dan ahli - Swadaya masyarakat dan donatur - Dana APBN melalui PNPM - Masih tersedianya lahan.	10.000.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	146	156	Juni
PERMASALAHAN PENDIDIKAN													
Masalah : Banyak anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga Wajib Belajar 9 tahun/anak sekolah yang putus di tengah jalan/tidak sekolah dikarenakan kesulitan biaya													
Target :													
Meningkatkan angka siswa sekolah yang menyelesaikan Waajar 9 tahun menjadi 99% sampai tahun 2010													
	Peningkatan taraf pendidikan di masyarakat, dengan:	Pemberian program Beasiswa bagi anak yang tidak mampu	RW 1- RW 10	30 Orang	UPS	Tenaga pendidik Sarana sekolah yang tersedia Balai pelatihan Motivasi untuk belajar Swadaya, dan bantuan pemerintah seperti : PNPM, APBD, dana bantuan dari instansi pemerintah	5.000.000	5.000.000	0	0	15	15	Juni
PERMASALAHAN KESEHATAN													
Masalah : Masih rendahnya kesehatan balita, dan masih terdapatnya balita dan anak kurang gizi													
Target :													
Meningkatkan kualitas kesehatan balita dan anak kurang gizi sebanyak 100 %													

	Peningkatan kualitas kesehatan balita, dengan:	- Pemberian makanan tambahan bagi balita warga miskin	RW 1-10	62 balita	UPS	- Tenaga medis - Kader posyandu	3,000,000	3,000,000			29	33	Juni
Masalah : Masih rendahnya kesehatan ibu hamil dan masih terdapatnya ibu hamil kurang gizi													
Target : Meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil kurang gizi sebanyak 100 %													
	Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil,	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil warga miskin	RW 1-RW 10	105 orang	UPS	- Tenaga medis - Kader posyandu	2,500,000	500,000	2,000,000			105	
PERMASALAHAN EKONOMI													
Masalah : Masih kurangnya modal usaha bagi warga yang bekerja sebagai pedagang kecil													
Target : Meningkatkan modal usaha dengan pinjaman bergulir													
	Peningkatan modal usaha dengan Pinjaman Bergulir	Pengadaan pinjaman bergulir	Kelurahan Simbangulon	40 Orang	UPK	- Koperasi simpan pinjam - Adanya beberapa home industri - Swadaya masyarakat atau donatur/donatur - Dana APBN	20,000,000	0	15,000,000	5,000,000	30	10	Desember
INDONESIA													
Target : Tersedianya usaha sosial produktif bersama milik orang miskin													
	Peningkatan modal dan usaha produktif	Pengadaan layos/persewaan alat pesta	Kelurahan Simbangulon	925 orang	UPS	- Koperasi simpan pinjam - Adanya beberapa home industri - Swadaya masyarakat atau donatur/donatur - Dana APBN	30,000,000	2,000,000	25,000,000	3,000,000	450	550	Desember
INDONESIA													
						JUMLAH	508,500,000	127,000,000	395,000,000	58,000,000			

Sumber: PJM Pronangkis BKM Telaga Artha Simbang Kulon.

b. Program Pengentasan Kemiskinan BKM Telaga Artha Simbang Kulon

Menurut H. Makmun, secara umum masalah kemiskinan yang ada di wilayah Kelurahan Simbang Kulon adalah berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya (PS) adalah sebagai berikut:

1). Permasalahan Lingkungan

- Masih adanya rumah kurang layak huni
- Masih ada warga miskin yang belum memiliki MCK
- Masih banyaknya rumah yang belum memiliki saluran limbah rumah tangga
- Masih banyaknya jalan yang rusak
- Masih adanya warga miskin yang belum memiliki rumah tersendiri (satu rumah dihuni lebih dari satu KK).

2). Permasalahan Kesehatan

- Masih kurangnya pelayanan kesehatan untuk warga miskin.
- Balita kurang gizi
- Rendahnya kesehatan ibu hamil

3). Permasalahan Ekonomi

- Rendahnya pendapatan warga miskin
- Terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan usaha.

4). Permasalahan Pendidikan

- Banyaknya anak putus sekolah.
- Masih adanya warga yang buta huruf.
- Masih adanya anak yang pendidikan agamanya rendah.

Oleh karena penanggulangan kemiskinan menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pokok maupun sekunder, baik kebutuhan fisik maupun rohani., maka dibangunlah BKM Telaga Arta di Kelurahan Simbang Kulon. BKM yang berdiri pada tanggal 20 November 2007 ini diharapkan berperan sebagai wadah penggerak masyarakat untuk peduli dan menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayahnya.¹⁴

Dalam upaya untuk pembuatan perencanaan penanggulangan kemiskinan, BKM bersama dengan relawan dan pihak peduli yang tergabung dalam tim PP (Tim Perencanaan Partisipatif) telah menyusun PJM Pronangkis 2007-2010, yang kemudian pada tahun 2010 ini juga telah dilakukan review. Kegiatan dalam PJM Pronangkis tersebut terbagi dalam tiga kegiatan yaitu: *infrastruktur*, *ekonomi* dan *sosial* (kesehatan dan pendidikan). Perencanaan dalam ketiga kegiatan tersebut pada dasarnya adalah rumusan dari upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah ditemukan dalam kegiatan PS (Pemetaan Swadaya) di atas. Sehingga masuk dalam Tri Daya pembangunan dikategorikan ke dalam tiga aspek kegiatan yaitu;

1) Kegiatan Infrastruktur

PJM Pronangkis yang menjadi pedoman BKM dalam meralisasikan kegiatan, merupakan hasil dari rekapan perencanaan jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan, adalah program yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah setelah dilakukannya Pemetaan Swadaya diantaranya; Masih adanya rumah kurang layak

¹⁴ H. Makmun di Pekalongan, tanggal 16 April 2011.

huni, Masih ada warga miskin yang belum memiliki MCK, Masih banyaknya rumah yang belum memiliki saluran limbah rumah tangga, Masih banyaknya jalan yang rusak, Masih adanya warga miskin yang belum memiliki rumah tersendiri (satu rumah dihuni lebih dari satu KK).

Sehingga menurut kepala Kelurahan Simbang Kulon Muchsinun semua kegiatan infrastruktur mengacu pada hasil PS tersebut maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BKM dan dikawal oleh UPL (Unit Pengelola Lingkungan) dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dalam bidang sarana dan prasarana lingkungan,¹⁵ adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Implementasi BLM dalam Kegiatan Infrastruktur tahun 2008-2010

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	BLM	Swadaya	Total
Tahun 2008					
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	318 KK	90.000.000	27.000.000	117.000.000
2.	Pekeresan Jalan Paving	2088 m ²	114.000.000	51.000.000	165.000.000
Total			204.000.000	78.000.000	282.000.000
Tahun 2009					
1.	Jembatan	880 m ³	28.875.000	8.662.500	37.537.500
2.	Drainase	860 m	28.875.000	8.662.500	37.537.500
3.	MCK	1 unit	6.000.000	1.200.000	7.200.000
4.	Kluwungisasi	23 Unit	23.000.000	4.600.000	27.600.000
5.	Rehab rumah	10 unit	29.000.000	5.800.000	34.800.000
Total			115.750.000	28.925.000	144.675.000
Tahun 2010					
1.	Pekeresan Jalan Paving	1176 m ²	87.000.000	29.800.000	116.800.000
Total			87.000.000	29.800.000	116.800.000

Sumber Data: Sekretariat BKM Telaga Artha Simbang Kulon

Semua kegiatan tersebut implementasi di lapangan dilakukan oleh KSM yang telah membentuk kelompok.

¹⁵ Muchsinun (Kepala Kelurahan Simbang Kulon) di Pekalongan, tanggal 22 Juli 2011.

2) Kegiatan Sosial

Dari aspek kegiatan yang kedua adalah kegiatan sosial, untuk kegiatan sosial ini BKM Telaga Artha menerapkan kebijakan dengan kegiatan sosial yang terbagi dalam dua kategori yaitu sosial *carithy* dan sosial produktif, sedangkan yang dinamakan dengan kegiatan sosial produktif adalah kegiatan yang bisa berjalan secara *sustainable* atau berkelanjutan dengan harapan hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan dibagikan/di-*carithy* kan, seperti kegiatan sosial yang berupa persewaan kursi atau layos, perolehan hasil dari persewaan layos dan kursi tersebut akan dibagikan kepada jumbo, anak yatim, fakir miskin dan lansia.

Tabel 4.6. Implementasi BLM dalam Kegiatan Sosial tahun 2008-2010

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	BLM	Swadaya	Total
Tahun 2008					
1.	Sosial Produktif (sewa kursi)	1 set	6,250,000	1,875,000	8,125,000
2.	Pelatihan ketrampilan (servis HP)	10 orang	23.000.000	5.000.000	28.000.000
Total			23.000.000	5.000.000	28.000.000
Tahun 2009					
1.	Sosial produktif	2 unit	29.100.000	2.480.000	31,580,000
2.	Peningkatan kesehatan (perlengkapan pos yandu)	7 set.	4.575.000	1.200.000	5,775,000
3.	Peningkatan pendidikan(perlengkapan PAUD)	5 Unit	4.575.000	200.000	4,775,000
Total			38.250.000	3.880.000	42.130.000
Tahun 2010**					

Sumber Data: Sekretariat BKM Telaga Artha Simbang Kulon

******Untuk kegiatan sosial di tahun 2010 belum bisa dilaksanakan sebab dari PAGU BLM kelurahan Simbang Kulon yang berjumlah Rp. 150.000.000,- belum bisa teralisasiikan, sebab dana BLM dan kegiatan sisa dari PAGU akan cair dan dilaksanakan pada tahun 2011.¹⁶

¹⁶ Eva Shokhifatun Nisa' (Fasilitator Kelurahan) Simbang Kulon di Pekalongan, tanggal tgl. 12 April 2011

Pengalokasian dana sosial untuk ketrampilan-ketrampilan ini timbul karena data PS2 (KK Miskin) diperoleh informasi bahwa di kelurahan Simbang Kulon terdapat banyak sekali pengangguran baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diciptakan suatu pelatihan-pelatihan yang bisa menyentuh langsung terhadap orang-orang yang bersangkutan.

Sehingga pelatihan elektronik yang khususnya untuk teknisi telepon seluler (ponsel) menjadi sebuah pilihan untuk dilakukan. Ini ditunjukan bagi para pemuda atau remaja produktif yang putus sekolah akibat tidak ada biaya. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah mampu memberi bekal ketrampilan bagi pemuda yang tidak mampu, sehingga peserta diharapkan mampu mendirikan usaha servis ponsel.¹⁷

3) Kegiatan Ekonomi Perguliran

Sebelum kegiatan Ekonomi perguliran dari alokasi BLM digulirkan, para Ulama' dan tokoh masyarakat melakukan *Bathsul Masa'il* terkait dengan bunga yang akan diterapkan di UPK, sehingga nantinya hukum bunga atau jasa UPK tidak lagi diperdebatkan tentang halal dan haram hukumnya.¹⁸ BKM Telaga Artha lewat UPK yang berdiri sejak tanggal 16 April 2009 sampai Desember 2010 telah berhasil memberi pinjaman ke (miskin) masyarakat miskin sebesar RP.332.400.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terserap 124 KSM (361 peminjam laki-laki, 272 peminjam PR) dengan modal awal perguliran sebesar RP. 58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di tambah RP.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pada Desember 2010 UPK BKM Telaga Arta mencapai indikator yang memuaskan. Tingkat pengembalian

¹⁷ Media Warga Simbang Kulon Edisi 04 Juni 2008.

¹⁸ H. Makmun di Pekalongan, tanggal 16 April 2011.

(RR) mencapai 98,91%,LAR (Loans at Risk) 2,60%, PAR (Portfolio at Risk) 1,86% CCr (Cost Coverage Rasio) 335,03 dan ROI (Return on Investment) 19,92%.¹⁹

Adapun laba bersih Tahun 2010 sebesar RP. 19.762.235,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Kondisi demikian tentu berkat kerjasama yang baik dan kekompakan antara BKM dan UPK serta relawan.bahkan relawan yang dibentuk Tahun 2007 sampai sekarang masih eksis untuk selalu mengadakan pertemuan rutin bulanan. Pertemuan rutin bulanan relawan diawali dengan bacaan tahlil ringan dilanjut bacaan sholawat nariyah, kemudian diisi dengan info dan agenda PNPM.Wal hasil relawan PNPM Kelurahan Simbang Kulon yang tidak terpilih menjadi anggota BKM pun tetap bersemangat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PNPM MP.²⁰

Pinjaman yang diberikan UPK ke (*musaakin*) masyarakat miskin di harapkan bisa menggerakan usaha bagi pedagang kecil, meski nilainya tidak seberapa hanya sebesar RP.500.000,- (lima ratus ribu).bagi peminjam pertama dan peminjam kedua sekitar RP.750.000,-(tujuh lima ratus ribu rupiah). Di Tahun 2011 UPK berencana memberikan pinjaman sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi peminjam ketiga.

Dengan berbekal ekonomi perguliran yang menunjukan indikator memuaskan BKM Telaga Arta dipromosikan untuk berkompetisi mendapat dana ND (*Neightborhod Development*),sering diistilahkan dana *noto deso* bagi yang berprestasi dalam penanganan PNPM. Sejalan harapan masyarakat Simbang Kulon untuk mendapatkan dana ND, BKM pun mulai melakukan penataan UP UP yang kurang maksimal dengan di isi oleh relawan relawan yang handal.

¹⁹ Munir Al-Amin (Fasilitator Ekonomi) Simbang Kulon di Pekalongan, 20 Juli 2011

²⁰ Observasi pertemuan paguyuban relawan Simbang Kulon di Pekalongan, 17 April 2011

Ke depan BKM juga berencana mulai melakukan pembinaan terhadap KSM ekonomi perguliran agar usahanya bisa berkembang baik. Keinginan BKM untuk melakukan pembinaan terhadap anggota KSM perguliran tampaknya juga di suport dari harapan tokoh masyarakat Simbang kulon, K.H Imron (sekaligus ketua LPMK) ketika ada uji petik BAPEDDA beberapa waktu lalu, beliau berharap: masyarakat Simbang Kulon 5 tahun ke depan tidak ada yang menerima zakat. Harapan itu pasti terealisasi manakala terjadi kerjasama yang baik antara Pemerintahan Kelurahan, LPMK, BKM, dan seluruh komponen masyarakat Simbang Kulon.²¹

BKM : TELAGA ARTA
Kel/Desa : SIMBANG KULON

ISLAM
NERACA
Per 31 Desember 2010

Tabel 4.7. Neraca UPK BKM Telaga Artha

	AKTIVA :	Jumlah		PASSIVA :	Jumlah
11010	Kas UPK	625.800	21030	Aokasi laba untuk BKM (20%)	418.950
11022	Titipan dana di BKM	-	21020	Tabungan KSM	27.919.375
11030	Pinjaman KSM	97.515.000	21030	Aokasi laba untuk sosial (10%)	-
12010	Bank UPK	51.546.878		Modal PNPM	97.000.000
12010	Inventaris dan harta tetap			Aokasi laba untuk ling (10%)	-
12010	Cadangan Resiko Kredit	(2.397.200)	31010	Modal awal pinjaman bergulir	-
	Pinjaman lain	-		Modal hibah	100.000
			21030	Aokasi laba untuk TM	2.094.418
				Laba / Rugi tahun berjalan	19.757.735
	Jumlah :	147.290.478		Jumlah :	147.290.478

Sumber: Data UPK BKM Telaga Artha Simbang Kulon

²¹ Media Warga Simbang Kulon Edisi Januari 2011.

SKIM PINJAMAN BERGULIR

Semua kegiatan ekonomi perguliran di BKM Telaga Artha menganut pada Skim Pinjaman yang telah ditentukan oleh PNPM-MP²², yaitu disebut dengan ketentuan umum atau Skim Pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan 2008 ditentukan sebagai berikut :²³

a) Peminjam

Peminjam dalam Pinjaman Bergulir ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria minimal KSM diatas, *bukan individu* (perorangan). Adapun kriteria anggota KSM yang meminjam harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- Warga miskin yang tercatat dalam PS2
 - Mempunyai usaha atau akan memulai usaha
 - Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan
 - Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha
 - Memerlukan tambahan modal kerja
 - Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
 - Mendapat persetujuan keluarga
 - Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan
- Bagi anggota KSM yang telah menerima pinjaman sampai batas maksimal (Rp 2 juta atau 4 kali pinjaman) maka LKM/UPK :

(1) Memberikan rekomendasi anggota KSM tersebut ke Lembaga Keuangan Formal

²² Afan (UPK) di Pekalongan, tanggal 22 Juli 2011

²³ Departemen Pekerja Umum, Idem: *Pedoman Teknis Pinjaman Pergulira* (Jakarta: 2008), hal. 7.

(2) Mengupayakan channeling sebagai sumber dana pinjaman

b) Tujuan Penggunaan Pinjaman

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kesopanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.

Pinjaman untuk pembuatan sertifikat tanah dapat diberikan pada tahap terakhir kali pinjam dengan tujuan sertifikat yang dibiayai nantinya dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan lain.

c) Besar Pinjaman

Besar Pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,- perorang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 500.000,- apabila berdasarkan penilaian kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu.

Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinjaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu KSM yang lain (karena pembayaran

kembalinya lebih baik), atau diberi jumlah yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah. Kebijakan ini diatur lebih khusus oleh LKM.²⁴

d) Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman sebesar 1,5% sampai dengan 3% perbulan dihitung dari *pokok pinjaman mula-mula* (besar pinjaman yang diterima). Jasa pinjaman yang ditetapkan UPK dan disetujui Pengawas minimal *harus dapat* menutup semua biaya UPK yaitu biaya dana (kalau ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman, memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk : pemupukan modal, BOP LKM, Dana Lingkungan dan Dana Sosial dll.

• Contoh : Perhitungan untuk menentukan besarnya jasa pinjaman	
• Biaya dana (= suku bunga simpanan)	0% pertahun
• Biaya operasional UPK	6% pertahun
• Biaya resiko pinjaman macet	5% pertahun
• Keuntungan yang diharapkan	<u>10% pertahun</u>
• Jumlah	21%

Agar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harus ditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi

²⁴ *Ibid.*, hal.. 8.

tunggakan misalnya 10 %, maka jasa 24 % tersebut hanya akan diterima riil sebesar $90\% \times 24\% = 21,6\%$.²⁵

Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil yang kita peroleh. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadi dekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yang berarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustain). Demikian sebaliknya.

e) **Jangka waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman**

Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan *disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam*. Diharapkan dengan jangka waktu demikian pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan lebih cepat tercapai.

Frekuensi Pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal 4 kali yang bisa dibiayai dari dana BLM. Untuk selanjutnya diharapkan LKM bisa mengupayakan pinjaman untuk pensertifikatan tanah sehingga dapat untuk dijadikan jaminan ke Lembaga Keuangan lain. Disamping itu LKM diharapkan mengupayakan chaneling atau mencarikan pinjaman ke Lembaga Keuangan lainnya.

f) **Angsuran Pinjaman**

Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa adanya tenggang waktu (*grace period*). Setiap kali angsuran harus mencakup jasa dan pokok pinjaman. Apabila

²⁵ *Ibid.*, hal.. 9.

terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutan : Jasa Pinjaman, Pokok Pinjaman yang tertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.²⁶

Meskipun BKM Telaga Artha dalam penerapan kegiatan ekonomi perguliran menganut pada skim yang telah ditetapkan oleh PNPM-MP khususnya dalam masalah bunga jasa dari perguliran BKM bersama LPMK mengajak para ulama setempat melakukan *Bahtsul Masā'il* untuk menentukan mekanisme jasanya.²⁷ Melalui forum *Bahtsul Masā'il*, para ulama NU selalu aktif dan merespon segala permasalahan yang muncul di masyarakat untuk dibahas secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terhadap landasannya dalam Al-Qur'ān dan Hadist, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan masyarakat begitu cepat akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik aspek akidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama NU merasa bertanggungjawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui *Bahtsul Masā'il al-Diniyyah*, begitu juga dengan masalah bunga dari ekonomi bergulir yang telah diputuskan oleh BKM. Masalah bunga, baik bunga bank atau dari semua bentuk muamalah lainnya yang selama ini menjadi kontroversi dalam masalah kehalal dan keharamnya. Namun

²⁶ *Ibid.*, hal.. 10.

²⁷ Khairon Cs (Sekretaris BKM Telaga Artha) di Pekalongan, tanggal 25 April 2011.

masalah keharamnya tidak muncul begitu saja tetapi dilatarbelakangi dengan Fatwa fara Ulama'.

Dengan dihadiri oleh beberapa tokoh ulama' diantara yang hadir yaitu Bpk. KH. Mubalighodin, Bpk. Ky. Anwar Fathoni, Bpk. Ky. Irmis Qodim, Bpk Ustadz H. Drs. Amunuddin, Bpk. Ustadz Abdul Aziz Irfan, sedangkan dari pihak BKM yang hadir adalahh Bpk. H. Makmun selaku kordinator BKM Telaga Artha dan Bpk. Choiron cs selaku sekretaris. Kegiatan Bahtsul Masail ini yang diprakarsai secara langsung oleh Bpk KH. Imronuddin Sukri.

Di dalamnya dibahas tentang landasan-landasan hukum tentang kegiatan Ekonomi perguliran yang di motori oleh tim UPK, dintara keputusanya yaitu;

- Pinjaman dengan memperoleh jasa melalui penerapan biaya administrasi di muka (dibolehkan asal tidak dalam akad)
- Pinjaman 10 X dengan pengembalian angsuran 12 X (boleh asal di luar akad)
- Pinjaman dengan jaminan / agunan (boleh asal tidak di dalam akad)

Landasan ini diambil dari Kitab I'ANAH juz 3 juga di kutib dari hasil Mu'tamar NU disitu menerangkan bahwa menurut madzhab Syafi'I bahwa sekedar tulisan di semua transaksi surat pemberitahuan dan karangan tidak bias di jadikan hujjah syar'I (alasan yang mengandung hukum).²⁸

Sehingga dari keputusan tersebut maka para musywirin memberikan solusi BKM dan UPK membuat peraturan atau tata tertib dituangkan dalam brosur atau selebaran dan diberikan kepada masyarakat calon peminjam untuk di baca dan dipelajari yang diaktualisasikan dalam brosur, setelah itu sudah tidak ada transaksi lagi, apabila ada

²⁸ Dokumen SKIM UPK BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon, 2008

transaksi lagi antara masyarakat calon peminjam dengan petugas UPK maka hal yang tersebut di atas bersifat Haram. Semoga dengan hasil Kegiatan *Bahtsul Masā'il* ini dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Simbangkulon umumnya dan khususnya adalah warga miskin.

c. Paguyuban Relawan

Selain forum dalam bentuk BKM, Paguyuban relawan di Kelurahan Simbang Kulon juga masih aktif sampai hari ini. Relawan yang merupakan seorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan hati nuraninya memberikan apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan upah/imbalan apapun. Relawan berfungsi mempercepat terjadinya proses penanggulangan kemiskinan. Karena pentingnya peran relawan tersebut, maka keberadaan dan kebersamaan relawan perlu dipertahankan terus-menerus, yaitu dengan terus memelihara semangat dan jiwa kerelawanannya.

Di Kelurahan Simbang Kulon, kebersamaan relawan sampai sekarang masih terasa. Itu terbukti dengan adanya “Paguyuban Relawan”. Paguyuban ini tidak semata-mata sebagai wadah diskusi diantara para relawan. pihak-pihak lain yang peduli, baik dari kalangan pemerintahan kelurahan maupun lembaga sosial atau kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan. Pertemuan paguyuban relawan di Simbang Kulon, diadakan secara rutin sebulan sekali dengan melalui kegiatan pengajian. Dimana dalam kegiatan pengajian tersebut diikuti oleh semua relawan, BKM dan UP-UP, kalangan pemerintahan kelurahan maupun lembaga sosial dan kemasyarakatan yang ada. Dengan demikian, upaya kajian dan pembelajaran mengenai berbagai hal dalam pembangunan masyarakat, terutama penanggulangan

kemiskinan dapat terus dikomunikasikan yang dikemas dalam pertemuan rutin, yang akan selalu berarti di hati relawan.²⁹

C. Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Disamping LKM di lokasi yang telah menjalankan P2KP/PNPM P2KP juga sudah terbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat BLM PNPM Mandiri Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (*common bond*) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

Oleh sebab itu tugas pokok KSM adalah:

- Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangang kemiskinan.
- Megelola dana yang diperoleh untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan.
- Mencatat dan membuat laporan kegiatan pembangunan yang diusulkan.
- Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparan, demokrasi, membangun dengan mutu, dst.).

²⁹ Makalah Presentasi BKM Telaga Artha dalam Kunjungan Tim Penilai BKM Terbaik se- Provinsi Jawa Tengah , Pekalongan, 18 November 009. hal. 3.

- Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial (*control social*) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.³⁰

Pengorganisasian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seperti diuraikan di atas, digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi.

D. Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan

Penerima manfaat langsung dari dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya (*community self survey*) berorientasi IPM-MDGs.³¹

1. Bantuan Dana Masyarakat

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (dana bantuan langsung masyarakat). BLM ini bersifat stimulant dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan pada tahun pertama.

Subtansi dana BLM bersifat stimulant bagi masyarakat untuk lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keperpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin.

³⁰ Departemen Pekerjaan Umum, Idem: *Pedoman Pelaksanaan*., hal..36.

³¹ *Ibid.*, hal. 5

a. Alokasi Dana BLM

Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada table dibawah ini.

Tabel 4.8. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan

Kategori	Ukuran kelurahan		
	Kecil	Sedang	Besar
Jmlh penduduk kelurahan yg menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan	< 3.000 jiwa	3.000 s/d 10.000 jiwa	> 10.000
Pagu dana BLM Kelurahan Lanjutan PNPM Mandiri P2KP 2007	Rp. 200 jt	Rp. 300 jt	Rp. 500 jt
Pagu dana BLM (lokasi lama P2KP & Lokasi Baru	Rp. 150 jt	Rp. 200 jt	Rp. 350 jt
Tahapan pencairan (Lokasi Berjalan)	2007 : Tahap 1 = 20 %, 2008: Tahap 2 = 50%, Tahap 3 = 30%		
Tahapan pencairan (Lokasi lama)	2008 : Tahap 1 = 30 %, 2009: Tahap 2 = 50%, Tahap 3 = 20%		
Tahapan pencairan (Lokasi baru)	2008 : Tahap 1 = 20 %, 2009: Tahap 2 = 50%, Tahap 3 = 20%		

Sumber: Data Pedoman Pelaksanaan PNPM MP2008

Dana BLM ini adalah dana public yang disalurkan sebagai wakaf tunai seluruh warga kelurahan dengan peruntukannya diprioritaskan kepada warga miskin.

Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga kelurahan.

b Penggunaan Dana BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada aspek PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. Secara singkat ketentuan penggunaan BLM dapat diilustrasikan seperti table dibawah ini:

Tabel 4.9. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM

Komponen Kegiatan	Sifat Kemanfaatan Kegiatan	Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM	Status Pemanfaatan Dana BLM
Komponen Lingkungan	Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan & permukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur.	- Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan pemukiman, baik kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin (rumah kumuh, dll). - Pengelolaan kegiatan berguliran untuk peningkatan kualitas sarana & prasarana perumahan dan pemukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah dll.	Sebagai dana stimulan yang harus digunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dpt menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya.
Komponen Sosial	- Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, dll. - Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM	- Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga miskin yang belum produktif. - Program sosial yang sifatnya berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan wajib belajar 9 tahun, dll.	Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin.
Komponen Ekonomi	Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok	- Usaha ekonomi produktif. - Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.	Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak kersahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta

peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Kegiatan militer atau semi militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
3. Deposito atau berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
5. Pembebasan lahan;
6. Pembangunan rumah ibadah;
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam *safeguard*; dan
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi misi, tujuan dan nilai-nilai universal.³²

c. Dana Pinjaman Bergulir (Revolving Loan Fund)

LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP)

Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai criteria memuaskan (pinjaman beresiko < 10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >15%) dan bersedia melakukan

³² *Ibid.*, hal.. 11

perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operaional teknik. Lihat Tabel 4.

- Untuk kelurahan/desa baru

Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata beroerintasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin.

Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif, maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Peyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan.³³

Tabel 4.10. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir

Indikator	Penghitungan	Memuaskan	Memuaskan
Pinjaman beresiko	Jml # pinjaman yang menunggak ≥ 3 bulan/jml # pinjaman	< 10%	< 20%
Rasio pendapatan biaya	Jml pendapatan tunai/Jml pengeluaran tunai	> 25%	> 100%
Hasil investasi	Laba bersih/nilai modal yang diinvestasikan	> 10%	> 0 %

Sumber : Data Pedoman Pelaksanaan PNPM MP2008

2. Pengawasan dan Pemantuan

Agar terjadinya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM oleh LKM sehingga dapat diketahui oleh semua warga, BKM diwajibkan melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini

³³ Ibid.,12

harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebar luaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, BKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. Ada tiga jenis audit dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

a) Audit oleh Instansi Pemerintah

Audit ini akan dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM, BKM/UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindari duplikasi antara mereka.

Tujuan utama audit Pemerintah ini adalah untuk mendapatkan pandangan auditor tentang:

- 1) Efektifitas pengendalian internal proyek,
- 2) Ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan seperti pedoman, surat edaran, perjanjian pinjaman (credit agreements) dan peraturan terkait yang berlaku,
- 3) Kelayakan laporan keuangan,
- 4) Capaian indikator keberhasilan.³⁴

b) Audit oleh Audit Independen

Masyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagai pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan, LKM, dan para pihak terkait harus mengaudit diri kepada auditor independent. Biaya

³⁴ *Ibid.*, hal. 41

audit wajib dialokasikan oleh LKM sendiri sebagai bagian biaya operasional pelaksanaan (BOP).

c) Pemantuan Independen oleh Tim Supervisi

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervise di luar yang telah ada untuk melakukan pemantuan independent atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, terutama untuk memeriksa apakah proses pelebagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervise dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemebritahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.³⁵



E. Pandangan Masyarakat Terhadap PNPM-MP

Program PNPM-MP yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini di Kelurahan Simbang Kulon menurut pendapat masyarakat adalah sebagai berikut; menurut H. Halimi selaku relawan simbangkulon berpendapat bahwa PNPM-MP programnya lebih baik dibandingkan dengan program penanggulangan kemiskinan atau program yang untuk pengembangan kelurahan lainnya, sebab dari segi perencanaannya lebih bersifat mendasar dan berdasarkan partisipatif masyarakat. Namun dari segi kelemahannya masyarakat belum memahami sepenuhnya.

Kemudian dari segi pengentasan kemiskinannya menurutnya belum optimal, sebab PNPM-MP belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas,

³⁵ *Ibid.*, hal. 42-43

meskipun di pihak UPK sudah ada ekonomi perguliran namun dampaknya belum begitu masiv.³⁶

Sedangkan kalau menurut ibu Naisah Munawarah dia selaku anggota BKM Telaga Artha mengatakan kalau PNPM-MP menurut beliau adalah program yang lebih baik bila dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya, hal ini terbukti dengan adanya; jalan-jalan gang sekarang lebih baik dan tidak becek lagi bila musim hujan tiba, rumah yang tidak layak huni milik warga miskin sudah diperbaiki dengan program plesterisasi meskipun hal itu belum sempurna, terus adanya ekonomi perguliran sangat membantu warga miskin dalam perolehan modal yang selama ini mereka mengalami kesulitan jika berurusan dengan Bank. Sehingga manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Namun jika untuk penanggulangan kemiskinan belum bisa mengena, sebab PNPM-MP belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun kegiatan lingkungan atau infrastuktur yang dilakukan KSM selama ini dilakukan secara padat karya, sehingga penghasilan atau pendapatan masyarakat semakin bertambah namun itu pun bersifat temporal.

Kemudian untuk ekonomi perguliran dalam pinjaman permodalan *al-hamdulillah* ini dapat mengentaskan kemiskinan dari beberapa KSM ekonomi perguliran dengan hadirnya PNPM-MP sekarang sudah merangka menuju sejahtera yang sebelumnya adalah kategori warga miskin.³⁷

Di sisi lain H. Makmun selaku koordinator BKM berpendapat kalau PNPM-MP ini adalah program yang sangat Rasulullah banget (Islami) bahkan belui

³⁶ H. Halimi di Pekalongan, tanggal 23 Juni 2011

³⁷ Naisah Munawar di Pekalongan, tanggal 23 Juni 2011

mengutarakan hadist Rasul “*Khaoirun an-Nas anfauhu li an-Anas*” , dengan dijembatani oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat dididik dan diajak untuk berdaya, peduli, saling menolong, gotong royong di lingkungan masing-masing yang ada PNPM-MP nya.

Selalu mengedepankan musyawarah dalam segala keputusan atau kebijakan, kemudian dalam pengentasan kemiskinan meskipun belum memperoleh hasil yang banyak namun program ini sudah berhasil khususnya kegiatan ekonomi perguliran. Beliu memberikan contoh di RT 04 RW 03 saudara Nur Hamid dahulunya adalah kategori PS 2 (miskin) kemudian setelah memperoleh pinjaman modal dari UPK yang digunakan sebagai modal jualan sembako *alhamdulillah* dapat berkembang bahkan sekara saudara Nur Hamid sudah mulai jualan Batik ke kota Solo, kemudian di RT 10 RW 07 pak Abdur Rozak dia termasuk warga miskin yang memanfaatkan PNPM-MP dengan pinjam modal untuk jualan sandal keliling, satu lagi contoh di RT 16 RW 14 pak Selamat yang meminjam modal ke UPK untuk jualan Mei Pangsit keliling dan *alhamdulillah* sekarang mereka sudah sedikit *survive*. Nah inilah program ini sangat efektif dalam penanggulangan kemiskinan meskipun berjalan secara pelan-pelan namun pasti. Seperti hasil keuntungan UPK dari kegiatan ekonomi perguliran itu didistribusikan untuk tambah modal UPK, untuk kegiatan sosial seperti bedah rumah dan lingkungan.

Sedangkan hambatan dan Kelemahannya masih menurut H. Makmun adalah kebijakan dari menejemen atau konsultan selalu berubah-ubah sehingga kadang-

kadang menghamburkan program yang telah direncanakan secara matang oleh BKM dan masyarakat.³⁸

Kemudian menurut ust. Nur Hamid selaku KSM ekonomi perguliran mengatakan bahwa program ini sejujurnya dan demi Allah telah membantu perekonomian pribadi saya khususnya dalam bidang perekonomian, sehingga menurut saya program ini sangat baik dan efektif dalam pengentasan kemiskinan meskipun masih banyak kekurangannya.³⁹

Kemudian menurut bapak Yazid selaku warga miskin penerima program rehab rumah, mengatakan bahwa program PNPM-MP *al-hamdulillah* telah membantu saya pribadi khususnya warga miskin sebab rumahnya telah direhab, namun kalau ekonomi perguliran hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja belum mampu meningkatkan perekonomian.⁴⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁸ H. Makmun di Pekalongan, tanggal 26 Juni 2011.

³⁹ Ust. Nur Hamid di Pekalongan, tanggal 26 Juni 2011

⁴⁰ Yazid (penerima manfaat/warga miskin) di Pekalongan, tanggal 22 Juni 2011.

BAB V

ANALISI PNPM-MP DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Penanggulangan Kemiskinan dalam PNPM-MP.

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa PNPM-MP atau P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku, sikap atau cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ihlkas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemsyarakatan (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi, dll).¹

Dari sini dapat dipahami bahwa akar penyebab kemiskinan itu sendiri adalah berawal dari sifat manusia yang keluar dari *fitrahnya* sebagai manusia yaitu adil, jujur, amanah, adil dan seterusnya. Hal ini senada dengan pandangan Islam mengenai sebab-sebab timbulnya kemiskinan, Ali Yafie menguraikan dari kesimpulan Hadits Nabi, berupa doa, "...Aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, setindihan hutang dan diperas atau dikuasai semua manusia."²

Penyebab kemiskinan juga dapat disimpulkan dari beberapa anjuran, peringatan dan larangan Allah dalam al-Qur' ān dan sabda Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah seperti disimpulkan Jalaluddin

¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan*, al. 111

² Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", dalam *Pesantren*, (Jakarta: P3M, No.2/III/1986), hal.7.

Rahmat,³ bahwa Allah menyebutkan penyebab kemiskinan adalah karena kecenderungan untuk tidak memuliakan anak yatim, tidak adanya usaha bersama untuk membela orang miskin, kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber daya (*al—taurats*) secara rakus dan kecintaan yang berlebihan kepada harta benda. Lebih tegas Jalaluddin mengatakan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai akibat dari sistem sosial yang timpang, dari kekurangan solidaritas sosial dan dari *sunnah sayyiah* (kebiasaan buruk) di masyarakat. *Sunnah hasanah* ialah memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang pemecahannya harus dilakukan lewat aksi sosial. *Sunnah sayyiah* ialah memperlakukan kemiskinan sebagai masalah individu-individu yang bersangkutan.

Islam mengakui hak milik atas harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara-cara yang sah, tetapi itupun bukan dengan tidak bersyarat. Seseorang dapat membelanjakan harta kekayaan yang sah hanya dalam saluran-saluran yang sah dan dengan cara-cara yang sah pula.⁴ Di antara aturan-aturan dalam Islam yang berhubungan dengan masalah harta dan hak milik tersebut adalah sikap tidak adil terhadap diri sendiri maupun masyarakat dalam bentuk menumpuk-numpuk kekayaan (Q.S. 104:2-3), menimbun emas dan perak, dan tidak membelanjakannya demi Allah dan kebaikan (Q.S.9:34). Demikian juga dalam hal penggunaan atau pembelanjaan harta dilarang secara berlebihan dan bersikap boros (Q.S 17:26-29; 25:67) dan dianjurkan untuk

³ Jalaluddin Rahmat, "Kunci Surga yang terbuang", Pengantar dalam, Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1983), hal. 15.

⁴ Abul A'la Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 83.

mengambil jalan tengah dalam membelanjakan harta, yaitu tidak boros dan tidak pula kikir (Q.S. 30:67). Di antara ungkapan lain tentang cara membelanjakan harta tersebut, Al-Qur' ān mengatakan untuk tidak mengikatkan tangannya ke lehernya (kikir), tetapi juga tidak merentangkan selebar-lebarnya sedemikian rupa sehingga menjadi tercela dan miskin (Q.S. 17:29).

Demikian juga dalam hal cara memperoleh harta, Islam telah menetapkan aturan untuk melakukan semua itu dengan cara yang hak dan sah serta adil. Di antara larangan dalam cara mendapatkan harta, dijelaskan oleh Abul A'la Maududi, yaitu: mengambil milik orang lain tanpa seizinnya atau tanpa memberikan imbalan atau dengan cara memaksa; menyuap; menggelapkan; pencurian; menyelewengkan milik anak yatim; menimbang atau menakar dengan cara curang; jual beli yang membantu kemungkaran; pelacuran dan upahnya; judi dan sejenisnya yang hanya berdasarkan untung-untungan; riba dan dalam bentuk jual beli minuman keras.⁵

Dalam masyarakat yang adil, mungkin masih terdapat golongan kaya dan miskin, tetapi hal itu harus dalam batas-batas yang wajar, dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Usaha ke arah perbaikan dalam pembagian rezeki ke arah yang lebih merata harus dijalankan. Dalam hal ini Al-Qur' ān mengingatkan bahwa jika timbul jurang pemisah yang semakin dalam antara golongan kaya dan miskin, maka pada gilirannya akan terjadi pertentangan yang akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan

⁵ Abul A'la Maududi, "Ajaran-ajaran Al-Qur' ān Tentang Ekonomi dan Politik", dalam *Esensi Al-Qur' ān*, (Bandung: Mizan, 1984), hal. 74.

membinasakan kemanusiaan serta peradabannya.⁶ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur' ān, Surat Al-Isra, ayat 16:

وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah) tetapi mereka melakukan sedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Demikian juga dalam hal sikap hidup yang mewah akan berakibat sebagai bentuk provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat yang berakibat destruktif. Dan karena “perbedaan kaya dengan miskin selalu membawa kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal inilah maka ayat-ayat Al-Qur' ān mementingkan soal hubungan kaya dan miskin.”⁷ Di antara ayat-ayat tersebut adalah dalam hal upaya untuk mengatasi akibat negatif dan destruktif yang ditimbulkannya serta sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam Islam terdapat beberapa aturan yang berfungsi sebagai sumber penyediaan dana yang berfungsi sosial. Di antara aturan-aturan tersebut diterangkan oleh Ali Yafie,⁸ yaitu dalam bentuk: zakat (dana yang diambil dari mereka yang mempunyai harta melebihi kecukupan rata-rata tiap tahun); *waqaf*; *wasiat*; *ghanimah* (harta rampasan perang); *Rika* (hasil harta terpendam di perut bumi); *nuzur* (harta benda yang dinadzarkan); *kaffarat* (denda-denda tertentu dari akibat pelanggaran tertentu dalam beberapa ibadah); *udhiyah* (penyediaan daging hewan ternak yang disembelih untuk

⁶ Nilai Identitas Kader, PB HMI, 1986, hal. 25.

⁷ Harus Hasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1979), hal. 8-9.

⁸ Ali Yafie, *Islam dan Problema..*, hal. 8-9.

kurban dalam ibadah haji); *baitulmal* (tempat penampungan dana yang bersifat umum bagi kepentingan umum); *shadaqah* (sifatnya suka rela dari setiap orang yang ingin berbuat kebajikan dengan harta bendanya kepada sesama) dan *nafaqah* (untuk membiayai kebutuhan hidup bagi isteri, anak-anak, keluarga dekat yang lemah).

Dalam masalah penyantunan fakir miskin ini, al-Qur' ān mengingatkan bahwa pada hakikatnya seluruh harta kekayaan tersebut adalah milik Tuhan (Q.S. 10:55), dan pemilikan oleh seseorang hanyalah bersifat relatif sebagai amanah dari Tuhan dan penggunaan harta itu harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk kepentingan umum, sebagaimana firman-Nya:

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال الذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadid, ayat 7).

Juga dalam ayat lain Allah berfirman:

واتوهم من مال الله الذي اتاكم

...berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...(al-Nur, ayat 33).

Oleh karena itu, jika terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, karena sebenarnya dalam harta orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin. Firman Allah dalam Al-Qur' ān menegaskan:

والذين في اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. al-Ma'arij, ayat 24-25).⁹

Mengenai hak orang miskin pada harta orang-orang yang kaya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa Ali mengatakan, “Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di suatu negeri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang miskin di negeri tersebut. Yang berwenang di negeri tersebut harus memaksa orang-orang kaya jika dana-dana yang diperoleh melalui zakat ternyata tidak mencukupi.”¹⁰

Selanjutnya, juga tercatat dalam sejarah Khalifah Abu Bakar, bahwa dia pernah memerangi orang-orang murtad dalam permulaan memegang tampuk kekhalifahan, sehingga mereka menunaikan zakat.¹¹ Begitu pentingnya peran zakat dalam ajaran Islam, hingga kata zakat dalam Al-Qur' ān selalu dirangkaikan dengan shalat dan disebut sebanyak 83 kali.¹² Dalam Islam, perintah untuk bersikap dermawan dengan melakukan kebajikan dalam bidang ekonomi kepada orang yang membutuhkan didasarkan pada pemikiran bahwa tindakan itu untuk memenuhi hak orang lain, dan bukan hanya sebagai kedermawanan terhadap pengemis.¹³ Hal ini juga termasuk bagian dari ibadah,

⁹ Lihat juga, Q.S. 51:19.

¹⁰ Mauloud Kassim Nait-Belkacem, “Konsep Keadilan Sosial di dalam Islam”, dalam Altaf Gauhar, *Tantangan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 161.

¹¹ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, cet. II, (Jakarta: LSIK, 1978), hal. 79.

¹² Ahmad A. Saifuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1984), hal. 68.

¹³ Muhammad Fazlur Rahman Anshari, *Konsep Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1983), hal. 177-178.

dan Al-Qur' ān menyuruh untuk bersedekah dengan menyebut dalam lebih dari 73 ayat.¹⁴

Pemahaman mengenai akar penyebab dari persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip-prinsip kemsayarakatan (*good governance*) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.¹⁵

Kemandirian kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan public di tingkat local agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintah yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan pemukiman, maupun sosial.

¹⁴ Muhammad A. Al-Buraey,,*Islam Landasan Alternatif Adminitrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.181.

¹⁵ *Ibid*, hal. 114.

Yang dalam hal ini diejawantahkan dalam bentuk BKM, yang merupakan refresentatif dari nilai-nilai luhur atau nilai-nilai universal.

Badan Keswadayan Masyarakat(BKM)/LKM merupakan nama ‘generic’ dari suatu lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa, yang diprakrasi serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat warga dalam upaya memenuhi kebutuhan/kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama, dengan berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan (ikhlas, jujur, dan adil).

BKM/LKM bermakna sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat yang menjadi wadah masyarakat bersinergi dalam memenuhi kebutuhan bersama dan wadah menggalang segenap potensi kekuatan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama maupun mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar.¹⁶ Sehingga untuk mengentaskan kemiskinan langkah yang harus dilakukan adalah berangkat dari akar masalah penyebab kemiskinan itu sendiri yaitu kembalinya ke *fitrah* manusianya itu sendiri. Dengan membentuk lembaga yang berpijak dan menganut pada nilai-nilai luhur atau nilai-nilai universal, kemanusiaan.

B. Implementasi PNPM-MP di Kelurahan Simbang Kulon.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. *Pertama*, menyangkut materi yang akan dihasilkan dan yang akan dibagi. *Kedua*, menyangkut manusia yang menjadi pengambil inisiatif, dalam pengertian

¹⁶ Depertemen Pekerja Umum,Idem; *Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Membangun BKM/LKM*, (Jakarta: 2007), hal. i

manusia yang membangun. Para pemikir dan ahli ekonomi memang memang membahas tentang manusia dan lebih menekankan aspek keterampilan, artinya manusia disini masih dianggap sebagai faktor produksi, dan faktor manusia yang diperhatikan terkait erat dengan upaya peningkatan produksi. Dengan demikian manusia hanya dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan melalui diupayakannya berbagai macam sistem pendidikan.¹⁷

Yang kurang mendapat perhatian dalam pembangunan, selain yang telah dikritisi di atas juga menyangkut penciptaan terhadap lingkungan, baik lingkungan politik, maupun lingkungan budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif. Padahal komponen universal dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu dan seterusnya. Dan proses untuk menciptakan jati diri (*self-esteem*) dan manusia kreatif inilah yang kurang diperhatikan. Selebihnya bahwa dengan adanya kontak dengan masyarakat lain yang secara ekonomis atau teknologis lebih maju acapkali mengakibatkan definisi dan batasan mengenai baik-buruk atau benar-salah menjadi kabur. Hal ini dikarenakan kesejahteraan nasional (dalam hal pencapaian materi) muncul sebagai berhala baru. Kemakmuran material lambat laun dianggap sebagai suatu ukuran kelayakan yang universal, dan dinobatkan menjadi landasan penilaian atas segala sesuatu.¹⁸

¹⁷ Arief Budiman. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 14

¹⁸ Todaro P. Michael. *Pembangunan...* hal. 20

Pada titik ini pembahasan menyangkut faktor-faktor non-material seperti adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan dan sebagainya menjadi sangat diperlukan. Hanya dengan menciptakan suasana yang merangsang kreatifitas dan menumbuhkembangkan jati diri yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki inisiatif dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan dapat terselenggara. Dengan demikian pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, namun selain itu pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia dapat mengembangkan kreativitas dan menjalankan keyakinannya.

Untuk dapat membentuk manusia semacam ini, berbagai aspek dalam pembangunan harus dibicarakan, tidak hanya melulu menyangkut pertumbuhan material. Diperlukan studi dan pendekatan psikologi, kewiraswastaan, menyangkut bagaimana kreativitas dapat terbentuk dan tumbuh dalam diri manusia? Dibutuhkan studi tentang kebudayaan menyangkut bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat terbentuk dan tumbuh dalam suatu kelompok manusia? Bagaimana peran agama dalam pembangunan? Kondisi politik dan hukum yang bagaimana yang harus dikembangkan dalam sebuah masyarakat, agar memungkinkan jiwa kewiraswastaan berkembang?. Hal-hal inilah yang penting dilihat agar pembangunan masyarakat mampu, berjalan secara terus menerus dan mempunyai dampak yang positif.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan berkelanjutan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep *Tridaya*. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan P2KP adalah melalui penerapan konsep *Tridaya*.¹⁹

Kemudian PNPM-MP yang terjadi di Kelurahan Simbang Kulon, yang dimotori oleh BKM Telaga Artha ada tiga aspek yaitu;

1. Kegiatan Fisik atau Lingkungan (Environmental);

Berawal dari data Pemetaan Swadaya (PS) yang dilakukan oleh masyarakat bersama relawan kemudian masuk dalam Perencanaan Jangka Menengah (PJM) *Pronangkis* yang menjadi pedoman BKM dalam meralisasikan kegiatan, merupakan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan, diantara kegiatan fisiknya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK umum, pembangunan jalan-jalan gang baik dengan pekerasan jalan paving maupun aspal, dan air bersih.

Dengan kebijakan BKM kemudian dikawal dengan Unit Pengelola Lingkungan maka, setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan

¹⁹ Departemen Pekerjaan Umum, Idem: *Pedoman Pelaksanaa.*, hal. 118

kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan pemukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.²⁰

Untuk kegiatan lingkungan ini diselenggarakan oleh KSM, kemudian untuk pekerjaannya adalah dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga secara tidak langsung ini merupakan kegiatan proyek yang bersifat padat karya, jadi bila dilakukan secara massif dapat mengurangi angka pengangguran.

Dari hasil pengamatan tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya sehingga sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi yang tak terkendali tidak sampai terjadi. Dalam situasi di mana terjadi gerak gelombang naik turunnya kegiatan ekonomi, pemerintah dapat

²⁰*Ibid.*, hal. 119.

menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk “kontra-siklis” atau “anti-siklis”.²¹

Dari berbagai kebijaksanaan yang bisa diambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyutikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Terutama dalam situasi di mana sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh, kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran.²² Sehingga bisa disimpulkan PNPM-MP yang terjadi di Kelurahan Simbang Kulon untuk kegiatan sarana dan prasarana dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

2. Kegiatan Sosial

Dalam kegiatan ini BKM mempunyai misi untuk *Pengembangan Masyarakat (Social Development)*; Tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya meningkatkan potensi segenap unsure masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang atau akses dalam program/kegiatan setempat.

²¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 168

²² *Ibid.*,

Sedangkan dari kumpulan kegiatan-kegiatan sosial yang telah ada adalah, pelatihan servis Hand Phoen, persewaan kursi, pengadaan alat-alat kesehatan untuk pos yandu, pengadaan alat-alat pendidikan untuk PAUD, dan persewaan mobil pick-up. Untuk kegiatan sosial ini terbagi menjadi dua kategori yaitu; sosial produktif dan sosial non-produktif, seperti layos tersebut diharapkan hasil dari persewaan akan dibagikan pada orang miskin atau warga miskin.

3. Pengembangan Ekonomi (Economic Development);

Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan ketrampilan masyarakat miskin dan atau pengangguran perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk peningktan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.²³

Di kelurahan Simbang Kulon untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah Pinjaman yang diberikan UPK ke (*masaakin*) masyarakat miskin di harapkan bisa menggerakan usaha bagi pedagang kecil, meski nilainya tidak seberapa hanya sebesar RP.500.000,- (lima ratus ribu).bagi peminjam pertama dan peminjam kedua sekitar RP.750.000,-(tujuh lima ratus ribu rupiah). Di Tahun 2011 UPK berencana memberikan pinjaman sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi peminjam ketiga. Dan ada pinjaman keempat. Kemudian khusus untuk kegiatan ekonomi perguliran BKM menggunakan skim pinjaman yang

²³ *Ibid.*, hlm, 118

telah ditetapkan oleh PNPM-MP dengan menganut bunga atau jasa atara batasan 1,5 % sampai 3 % bagi setiap KSM.

BKM Telaga Artha Kelurahan Simbang Kulon dengan berpijak dari hasil *Bahtsul Masā'il* dengan membuat peraturan atau tata tertib dituangkan dalam brosur atau selebaran dan diberikan kepada masyarakat calon peminjam untuk dibaca dan dipelajari yang diaktualisasikan dalam brosur, setelah itu sudah tidak ada transaksi lagi, apabila ada transaksi lagi antara masyarakat calon peminjam dengan petugas UPK maka hal yang tersebut di atas bersifat Haram.

Solusi brosur atau leflet yang tercatat di dalam aturan prosentase dari ketentuan jasa atau bunga yang merupakan strategi untuk menghindari (bunga) dari pinjaman dengan memperoleh jasa melalui penerapan biaya administrasi di muka (dibolehkan asal tidak dalam akad), pinjaman 10 X dengan pengembalian angsuran 12 X (boleh asal di luar akad), pinjaman dengan jaminan / agunan (boleh asal tidak di dalam akad), atau bayaran tambahan dari yang diberikan debitur kepada UPK tidak masuk dalam akad itu memang. Sehingga pertanyaanya mungkinkah semua calon peminjam UPK akan membaca brosur ?, atau mereka paham dengan isi brosur ?, kemudian bukankah sudah seharusnya setiap transaksi transparan dan jelas baik diawal aqad maupun di akhir aqad ?.

Sehingga kesimpulannya kegiatan ekonomi perguliran untuk Jasa pinjaman dalam parktenya tidak bisa lepas dari skim PNPM-MP yang menentukan bunga sebesar 1,5% sampai dengan 3% perbulan dihitung dari *pokok pinjaman mula-mula* (besar pinjaman yang diterima).

Agar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harus ditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi tunggakan misalnya 10 %, maka jasa 24 % tersebut hanya akan diterima riil sebesar $90\% \times 24\% = 21,6\%$.²⁴

Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil yang kita peroleh. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadi dekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yang berarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustain).

C. PNPM-MP dalam Pandangan Ekonomi Islam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNMP-MP) atau yang semula dinamai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu “proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada “program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya proyek yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi “program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakasa masyarakat

²⁴ *Ibid.*, hal. 9.

sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Pemerintah Indonesia, menawarkan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dan tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Dan meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. sehingga arah tujuan dari PNPM-MP adalah dari masyarakat yang tidak berdaya kemudian menjadi berdaya, lalu menjadi mandiri dan endingnya adalah masyarakat madani.

Tumpuhan pokok dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat yang mengandung arti upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang

lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.²⁵

beberapa model pemberdayaan masyarakat :²⁶

1. Pengembangan masyarakat lokal
2. Perencanaan Sosial
3. Aksi sosial

Selain itu, ada beberapa model pemberdayaan yang digunakan dalam pemberdayaan semisal untuk masyarakat miskin perkotaan. Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan meliputi :²⁷

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pembentukan unit Pembinaan Keluarga Miskin
3. Pengembangan Usaha Kecil Menengah
4. Perbaikan Rumah
5. Perbaikan Prasarana Lingkungan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang termasuk pada model pengembangan sumber daya manusia, karena pelaksanaannya berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini ada teori yang dijadikan

²⁵Tim Pengendali PNPM Mandiri, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, (Jakarta: 2007), hal. 11.

²⁶ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hal. 42.

²⁷ Rr. Suharatini, dkk. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), hal. 12.

landasan penelitian ini yaitu : Teori Sumber Daya Manusia, karena pemberdayaan yang dilakukan oleh program PNPM terkait dengan masalah sumber daya manusia yang ada di masyarakat khususnya yang di motori oleh lembaga yang generic dari masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat.

Teori sumber daya manusia menyediakan bermacam-macam *Tools* yang dapat digunakan untuk, antara lain :²⁸

1. Mengidentifikasi masalah sumber daya manusia, mengetahui masalah sumber daya manusia yang terjadi di masyarakat sebelum di laksanakan aksi social yaitu aksi pendampingan.
2. Menerangkan gejala sumber daya manusia , menjelaskan tentang gejalagejala yang terjadi di masyarakat tersebut.
3. Meramalkan hal-hal yang dapat atau akan terjadi dibidang sumber daya manusia, membuat kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi di masyarakat tersebut.
4. Memberikan solusi terhadap masalah sumber daya manusia , mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada di masyarakat tadi. Sehingga dari kegiatan aksi tadi membuahkan hasil.

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berfikir, sikap, tindakan, yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara

²⁸ Taliziduhu Ndraha. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 5.

leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *Interchangeable* atau dapat dipertukarkan.²⁹ Kartasasmita mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Selain itu, Kartasasmita juga menyimpulkan bahwa upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti : modal, teknologi, informasi dan pasar. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektifis dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main) dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

²⁹ Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 41.

Proses pemberdayaan yang dilakukan harus memuat dua unsur, meningkatkan kesadaran kritis dan upaya menstranformasikan struktur sosial yang menindas. Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendamping sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.³⁰

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dimana indikator pemberdayaan telah dijelaskan sebelumnya. Dan pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dijadikan

³⁰ Edi Suharto. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. <http://www.policy.hu/suharto/modul/a/makindo>

salah satu tolehan solusi. Dalam bahasa yang lebih gamblang pengembangan *civil society* merupakan kondisi niscaya yang perlu dibumikan secara kukuh di negeri ini.³¹

Dalam PNPM-MP konsep dan modelnya mengacu pada pembangunan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep *Tridaya*. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan P2KP adalah melalui penerapan konsep *Tridaya* adalah.³²

Pertama, Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection), *Kedua*, Pengembangan Masyarakat (Social Development), dan *Ketiga*, Pengembangan Ekonomi (Economic Development);

Dari yang telah dilakukan dalam PNPM-MP khususnya di Kelurahan Simbang Kulon tiga aspek telah tercakupi, sehingga secara umum konsep pemberdayaan masarakat yang dilakukan dalam PNPM-MP ini tidak jauh berbeda atau sama dengan konsep pemberdayaan dalam Islam. Dengan tujuan utamanya adalah agar bisa mencipata *al-falāh* dan kesejahteraan di dunia,

³¹ Abd A'la. *Pembaruan Pesantren*. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006),. hal. 43.

³² Tim Pengendali PNPM Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan*., hal. 118.

sebab dari bagian tugas pokok kekhalifahan manusia yang baku adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (Q.S. 6: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (Q.S. 51:56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberikan dua anugrah nikmat yaitu *manhaj al hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al hayat* (sarana kehidupan), sebagaimana firman-Nya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan” (Q.S. Luqman: 20)

Manhaj al hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur’ ān dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk *keharusan melakukan* atau sebaliknya *melakukan sesuatu*, juga dalam bentuk *larangan melakukan* atau sebaliknya *meninggalkan sesuatu*. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (*hukum taklif*), yakni *wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram*.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama; keselamatan diri (jiwa raga); keselamatan akal; keselamatan harta benda; serta keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al hājat al- dlaruriyyah*).³³

³³ Antonio, Idem: *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal. 41.

Dalam sistem ekonomi Islam yang terletak di antara sistem kapitalis dan sistem sosialis,³⁴ karena bagian perilaku seseorang yang dituntut oleh nurani manusia dalam kegiatan ekonomi itu sudah Islami. Sistem ekonomi Islam lebih berkaitan membentuk masyarakat bukan negara.³⁵ Sistem ekonomi Islam merupakan implementasi dari tanggung jawab pribadi manusia di hadapan Allah sebagai seseorang hamba. Sistem ekonomi Islam dimetamorfosiskan masyarakat Madani, dalam terminology masyarakat modern disebut *civilized society*.³⁶ Kehidupan Madani mengadopsi tata kemasyarakatan masyarakat Madinah ketika Rasulullah saw masih hidup. Dengan sikap tegas dan bijaksana telah menimbulkan perubahan yang revolusioner bagi kehidupan masyarakat Madinah dan kota-kota sekitarnya. Walaupun Rasulullah saw sudah wafat ajaran beliau tetap menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai kemanusiaan di luar Jazirah Arab.³⁷

Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia ini pada prinsipnya akan lebih baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami, banyak ayat Al-Qur' ān yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya;

³⁴ Kaum muslim diberi ciri khusus dalam al-Qur' ān sebagai umat pertengahan lihat QS al-baqarah (2): 143, "*Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat adil dan pilihan...*"

³⁵ Qamaruddin Khan. *Al Mawardi's Theori of State*, Bazm al-Iqbal, Lahore, hal. 4 dalam Asghar Ali Engineer (2000), *Devolusi Negara Islam (terj)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 58

³⁶ Anthony Giddens, *The Third Way; Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi (terj)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 90-98.

³⁷ Pada abad 7-8 Masehi di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah pengaruh Islam merembes samapai ke Uzbekistan negara di kawasan Asia tengah melalui proses *futuhat*. Uzbekistan juga terkenal tempat kemunculan berbagai ahli hadis dan *fuqaha*, ahli filsafat, fisika matematika dan astronomi, seperti Al-Khawarizmi, Al-Bituni, Ibnu Farabi, Ibnu Sina dan Imam Bukhari adalah keturunan bangsa Uzbek.

"Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan." (Q.S. Al Baqarah: 60)

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu (bagimu) adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 87-88).

Semua ayat itu merupakan penentu dasar pikiran dari pesan Al-Qur' ān dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non-materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hadist Rasulullah SAW menegaskan:

Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (At-Tirmidzi)³⁸

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bathil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizhalimi; menjauhkan diri dari unsure riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidak-jelasan dan manipulatif), serta tidak

³⁸ Kitab *Al-Ahkam* nomor 1272

melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar konsepnya.³⁹

Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita.

"Dan tidak Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Q.S. Al-Anbiya: 107)

Allah juga berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 185)

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalakan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsure material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.⁴⁰

Bertitik tolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam maka dapat disimpulkan, bahwa prakteknya kegiatan PNPM-MP khususnya di Kelurahan Simbang Kulon dan umumnya PNPM secara keseluruhan (Nasional) dipastikan menyangkut tiga aspek *Pertama*, Kegiatan Lingkungan atau Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection), *Kedua*, Pengembangan Masyarakat (Social Development), dan *Ketiga*, Pengembangan

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 46

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 48

Ekonomi (Economic Development). Dapat disimpulkan bahwa praktek dan konsep PNPM-MP untuk *Tri Daya* tersebut kegiatan yang *Pertama*, yaitu Kegiatan Lingkungan atau Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection), dan *Kedua*, Pengembangan Masyarakat (Social Development) atau prakteknya adalah kegiatan sosial, kedua sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak keluar dari larangan Syari'ah (*Maqosidus As-Syari'ah*).

Dalam kegiatan ekonomi perguliran memang untuk pengentasan kemiskinan ini bisa dikatakan lebih efektif dan efisien, bila dibandingkan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya, hal tersebut bisa dibuktikan di lapangan bahwa berawal dari pinjam modal usaha di UPK dapat menjadi berkembang. Namun bila melihat dari bentuk kegiatan menurut penulis dalam prakteknya ternyata masih keluar dari rambu-rambu hukum Islam, yaitu masih adanya unsur *gharar* dan *riba* hal ini bisa dibuktikan dari Skim Pedoman Pelaksanaan Ekonomi Perguliran yaitu; untuk Jasa pinjaman dalam prakteknya tidak bisa lepas dari skim PNPM-MP yang menentukan bunga sebesar 1,5% sampai dengan 3% perbulan dihitung dari *pokok pinjaman mula-mula* (besar pinjaman yang diterima).

Agar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harus ditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi tunggakan misalnya 10 %, maka jasa 24 % tersebut hanya akan diterima riil sebesar $90\% \times 24\% = 21,6\%$.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hal. 9.

Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil yang kita peroleh. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadi dekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yang berarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustain).

Sehingga dalam kegiatan simpan pinjam UPK dalam praktiknya belum menggunakan sistem ekonomi Islam yaitu; kegiatan muamalah yang diperbolehkan seperti model;

a. Bagi hasil (Profit-Sharing)

- 1) Al-Musarakah (Kerjasama Modal Usaha)
- 2) Al-Mudharabah (Kerjasama Mitra Usaha dan Investasi)
- 3) Al-Muzara'ah (Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Pertanian)
- 4) Al-Musaqah (Kerjasama Pemeliharaan Pertanian)

b. Jual-Beli (Sale and Purchase)

- 1) Al-Murabahah (Jual-Beli dengan Pembayaran Tangguh)
- 2) Bai' as Salam (Jual-Beli dengan Pembayaran di Muka)
- 3) Bai' al-Istishna' (Jual-Beli Berdasarkan Pesenan)

c. Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

- 1) Al-Ijarah (Sewa)
- 2) Al-Ijarah al Muntahia Bittamlik (Sewa-Beli)
- 3) Jasa (Fee-Based Services)

- 4) Al-Kafalah (Jasa Penjaminan)
- 5) Al-Hawalah (Jasa Transfer, Pengalihan Hak dan Tanggungjawab)
- 6) Ar-Rahn (Gadai)
- 7) Al- Qradh (Pijaman Kebaikan)

Jadi untuk kegiatan ekonomi perguliran, bila menganut skim yang di PNPM-MP, jelas bahwa yang diterapkan adalah model sistem bunga. Yaitu sistem yang mengandung riba, meskipun dari segi *dhahir* dan fakta program ini memang bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat miskin, namun sistemnya perlu diperbaiki.

Kemiskinan, dengan beragam tipologinya (kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural)⁴² hingga saat ini, masih menjadi tanda Tanya besar, bagaimanakah startegi perekonomian yang tepat untuk mengurangi bahkan menghapus kemiskinan ini. Karena masalah dibalik kemiskinan adalah bukan hanya menyangkut persoalan kemiskinan dan pembagian “kue” pendapatan yang sebagian besar bersumber dari masalah politik dan birokrasi kelembagaan, namun juga diakibatkan oleh faktor-faktor penentu distribusi pendapatan yang secara teoritis kurang dipahami oleh negara-negara berkembang dan banyak menganut teori-teori Barat yang kurang sesuai bagi negara-negara berkembang.

Pembangunan dengan demikian tidak bebas nilai dan ia kental dengan perspektif dan pandangan masyarakat Barat menyangkut nilai-nilai

⁴² Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktisi Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), hal. 17

kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat mendasar. Sadar atau tidak konsepsi pembangunan yang dicetuskan Barat acapkali dipaksakan pada negara-negara berkembang (non-Barat). Dengan memprioritaskan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Atas dasar hal tersebut maka terdapat kesepakatan umum disementara kalangan ekonom bahwa tidak terdapat konsepsi pembangunan yang benar-benar baku dan universal, disamping itu pola-pola dan model serta konsep-konsep pembangunan tidak dapat dengan serta merta dipaksakan atas negara yang satu kepada negara yang lain, karena hal ini berangkat dari corak dan ragamnya berbagai perbedaan yang terdapat dalam suatu negara.⁴³

Pemaksaan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan ala Barat dengan demikian dapat menimbulkan konsekuensi yang merusak, namun kenyataan ini terkadang tidak diindahkan oleh negara-negara dunia ketiga, bahkan seringkali mereka menerapkan berbagai model dan konsep-konsep pembangunan dengan penyesuaian-penyesuaian yang terkadang sangat tidak sesuai dengan kondisi sosial historis masyarakat setempat.

Pendekatan yang etnosentris ini oleh beberapa ahli ekonomi Islam seperti Chapra dilihat sebagai sebuah pendekatan yang menanamkan rasa pesimisme dalam literature pembangunan dengan mengaitkan kemiskinan, keterbelakangan dan penaklukan politik atas negara miskin, yang kebanyakan terjadi pada bangsa-bangsa non-Eropa dan institusi yang sama yang ada di negara-negara Barat, sebagaimana hal ini juga berlaku cukup

⁴³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi VI. Terj. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 88

dominan dalam pandangan para ahli dan ekonom Bank Dunia yang memiliki keyakinan bahwa satu-satunya jalan bagi negara-negara miskin-berkembang guna meningkatkan formasi modal, produktivitas dan konsumsi yang sebanding dengan negara-negara maju adalah dengan meniru institusi-institusi sosial, ekonomi dan system politik yang ada di negara-negara maju tersebut.⁴⁴

D. Refleksi

Penanggulangan masalah kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan mencanangkan dua kebijakan pokok pembangunan yaitu:

- (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; dan
- (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.⁴⁵

Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan masalah semakin deras mencuat ke permukaan.

⁴⁴ M. Umer Chapra. *Islam...* hal. 162

⁴⁵ Suyanto Usman, *ibid.*, hal. 130.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNMP-MP) atau yang semula dinamai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu “proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada “program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya proyek yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi “program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakasa masyarakat sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai 2007, PNPM Mandiri diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % di tahun 2015.⁴⁶

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang termasuk pada model pengembangan sumber daya manusia, karena pelaksanaannya berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang

⁴⁶ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta Selatan, hal. 3.

penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini ada teori yang dijadikan landasan penelitian ini yaitu : Teori Sumber Daya Manusia, karena pemberdayaan yang dilakukan oleh program PNPM terkait dengan masalah sumber daya manusia yang ada di masyarakat khususnya yang di motori oleh lembaga yang generic dari masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan yang bisa dikatakan berhasil ada memangkas kemiskinan itu dari akar penyebab kemiskinan itu sendiri, dalam konsep PNPM-MP menggaris bawahi bahwa akar kemiskinan terletak pada hilangnya nilai-nilai universal kemanusiaan. Pemahaman mengenai akar penyebab dari persoalan kemiskinan tersebut telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip-prinsip kemsayarakatan (*good governance*) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.⁴⁷ Sehingga melalui Tri Daya Pembangunan (*aspek lingkungan, aspek sosial dan*

⁴⁷ *Ibid*, hal. 114.

aspek ekonomi) PNPM-Mandiri untuk sementara waktu telah menunjukan keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, namun hal tersebut belum bisa secara massif, dan meskipun secara konsep sudah dikatakan lebih baik namun secara praktek jelas masih perlu dikaji ulang kembali.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Sehingga pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat bermanfaat dan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya ?.

Sehingga kritik yang patut diutarakan pada persoalan mendasar dalam implementasi PNPM-MP ini diantaranya *pertama*; dalam pelaksanaan dari tri daya pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi perguliran adalah menggunakan skim perekonomian sistem konvensional, dan yang *kedua* adalah perlu disadari bahwa pelaksanaan PNPM-Mandiri yang telah menghabiskan dana triliunan tersebut adalah bahwa sumber dana utamanya adalah dana *Loan Bank Dunia* atau sumbernya adalah Utang terhadap negara-negara maju yang menganut sistem kapitalis, sehingga konsep pembangunan (*development*) yang berasal dari Barat yang kemudian serta merta dipaksakan pada hampir semua rakyat yang hidup di negara-negara berkembang, lebih merupakan refleksi paradigma positivisme dan post-positivisme tentang pembangunan yang bersifat reduksionis. Ilmu pengetahuan yang memuat konsep pembangunan yang diproduksi di negara Barat dan dikirimkan

kenegara-negara berkembang, bukanlah pengetahuan yang netral, melainkan sarat dengan ideologi Barat, selain mengandung nafsu untuk menguasai.⁴⁸ Sehingga utang ke pada Bank Dunia tidak bisa lepas dari sistem bunga.

Sistem finansial yang berbasiskan bunga merupakan halangan utama dalam pencapaian keadilan distributif. Ia menciptakan utang yang dapat dibayar kembali-yang membuat sebagian orang bertambah kaya sedangkan yang lain menjadi miskin dan tertindas.

Utang berlebihan dan turunannya adalah ciri-ciri yang mencolok dari mekanisme berbasis bunga; utang kemarin dapat dibayar kembali dengan mengmabil lebih banyak utang hari ini. Ia tidak hanya menahan pertumbuhan perekonomian, tapi juga melumpuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Dunia, IMF, dan para pendonor lain yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di negara-negara miskin. Ia juga mendistorsikan sistem pembayaran karena perhatian akan penghasilan dan pendapatan yang adil dan sewajarnya disesuaikan dengan hanya sedikit pertimbangan. Tiada yang peduli siapa yang akan membayar utang: generasi mendatang yang manakah dan yang dari manakah?. Perilaku seperti ini-penghindaran pembayaran utang yang sedang berjalan-tidak dapat diterima dalam agama mana pun. Dalam Syariah Islam, kewajiban utang dikenakan pertanggungjawaban yang ketat pada Hari Penentuan (akhirat) nanti.⁴⁹

Permasalahan-permasalahan perekonomian di negara-negara yang belum berkembang (*underdeveloped countries*= UDCs) sebagian besar muncul

⁴⁸ Agus Salim. *Perubahan*.....hal. 266

⁴⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 6

dikarenakan akumulasi utang mereka yang berlebihan. Biaya yang timbul dalam bentuk bunga yang harus dibayar oleh pemerintah penerusnya melalui kenaikan tingkat suku bunga, pajak, dan biaya-biaya atas barang-barang konsumsi sarana dan prasarana. Guna membayar utang-utang tersebut, pemerintah menaikan pajak tanpa menyediakan fasilitas sosio-ekonomi atau kompensasi apa pun. Penghasilan valuta asing mereka, termasuk di dalamnya hasil ekspor dan pengiriman uang dari tenaga kerja di luar negeri, juga termakan untuk pembayaran utang-utang tersebut.⁵⁰

Sistem finansial yang berbasis bunga terus menciptakan utang yang tidak dapat terlunasi-menjadikan sebagian golongan kaya semakin kaya sedangkan golongan miskin menjadi semakin miskin dan tertekan. Dewasa ini, semua negara berkembang masih terjebak dalam perangkap utang canggih yang berkat karakteristik yang mencolok dari mekanisme berbasis bunga; utang kemarin dapat dilunasi dengan mengambil utang lebih banyak hari ini.⁵¹

Mohsin S. Khan (1986) telah menunjukkan bahwa kredit yang berbasis bunga meningkatkan risiko terjadinya krisis perbankan . Jika jaminannya mencukupi, perbankan modern akan membiayai proyek, walaupun tingkat kelayakannya sangat rendah. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan dalam bisnis.

Telah terbukti dan juga merupakan kenyataan bahwa pada tingkatan global, utang digunakan oleh negara kapitalis dan institusi multilateral sebagai alat kendali. Kerajaan Ottoman terkena pengaruh Eropa melalui kebiasaan utang

⁵⁰ Muhammad Ayub, *Understanding*, hal. 6

⁵¹ *Ibid.*, hal. 88

yang berbasis bunga.⁵² Peran IMF dan Bank Dunia adalah juga untuk menaklukkan negara-negara yang berhutang terhadap kehendak dari negara-negara kaya. *The Economist*, yang menentang latar belakang peperangan Amerika terhadap terorisme setelah strategi 11 September 2001, memasang judul: "IMF dan Bank Dunia: Sekutu Penyogok" dan berpendapat bahwa kedua institusi tersebut, yang digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, telah menjadi senjata bagi Amerika.⁵³

Pendapat Mohsin S. Khan tersebut tidak jauh berbeda dengan pengakuan John Perkins yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar mulai dari Asia Tenggara hingga Australia. Tigaratus etnis di sana menggunakan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa. Populasi Muslimnya terbesar jika dibandingkan negara lainnya. Kami tahu, menjelang penghujung dasawarsa 1960-an, negara ini bergelimang minyak.⁵⁴

Ketika aku tiba di Indonesia pada 1971, tujuan kebijakan asing AS sudah jelas, yaitu menghentikan komunisme dan mendukung sang presiden. Kami berharap Soeharto melayani Washington seperti halnya Shah Iran. Kedua orang itu serupa: tamak, angkuh, dan bengis. Selain mendambakan minyaknya, kami ingin menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara Asia lainnya, juga dunia Islam, khususnya Timur Tengah.

⁵² Zaman dan Zaman, 2001, hal. 71 (seperti dikutip dari Blaisdell, 1929)

⁵³ Muhammad Ayub, *Understanding*, hal. 89

⁵⁴ John Perkins, *Pengakuan Bandit Ekonomi; Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia & Negara Dunia Ketiga*, Penerjemah, Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, Cet. 1 (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2007), hal. 5.

Perusahaanku, MAIN, bertugas mengembangkan sistem kelistrikan terpadu yang mungkin Soeharto dan kroni-kroninya menggerakkan industrialisasi, menambah kekayaan, dan memastikan dominasi Amerika dalam jangka panjang. Sedangkan tugasku adalah melakukan kajian perekonomian yang diperlukan untuk mendapatkan pendanaan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).⁵⁵ Secara tidak langsung dibalik dana PNPM-MP adalah ada dana BLM yang merupakan dana *loan World Bank* sehingga jelas sistem yang dianut sistem Bank Dunia selaku kreditur.

Berpijak dari persolan tersebut peneliti juga memandang perlu mengkaitkan implementasi PNPM-Mandiri dalam pengentasan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi Islam sebab dalam ajaran Islam, masalah kemiskinan memang diakui. Menurut ajaran Islam⁵⁶ yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendungnya, serta mengawasinya kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.⁵⁷

⁵⁵ John Perkins, *Pengakuan*, hal. 6.

⁵⁶ Zainal Abidin Ahmad, *dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 128.

⁵⁷ Muhammad Yusuf al-Qardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, judul asli (*Muskilatul Wa-Kaifa 'Alajahal Islam*) penerjemah: Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1996), hal. 51.

Selanjutnya, peran agama dalam menghadapi kemiskinan juga dapat dilihat dari perannya dalam proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berarti menanggulangi masalah kemiskinan. Di antara peran agama dalam pembangunan, menurut Mukti Ali adalah sebagai: faktor motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif.⁵⁸ Faktor motivatif adalah yang mendorong, mendasari, dan melandasi cita-cita serta amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia merupakan syarat mutlak untuk tiap usaha yang ingin dilakukan secara bertanggung jawab. Tanpa motivasi yang jelas orang akan bekerja untung-untungan, asal jadi dan tak bergairah serta akan mudah menjadi oportunis. Dan faktor kreatif adalah yang mendorong dan menghasung manusia, bukan hanya untuk melakukan kerja produktif saja, melainkan juga karya kreatif dan baru.

Menurut Arkham Khan, ekonomi Islam berarti juga metode mengakomodasi berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan sumber daya ekonomi yang ada di bumi.

⁵⁹ Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan (*falāh*) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya atas dasar kerjasama dan partisipasi.⁶⁰ Sehingga alternatif yang ditawarkan guna menuju *falāh* sudah seharusnya dalam praktek *Tri Daya* Pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi perguliran menggunakan sistem ekonomi

⁵⁸ *Ulama dan Pembangunan*, (Jakarta,: Panitia Musyawara Nasional I, Majelis Ulama Seluruh Indonesia, 1976), hal. 85-86.

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), hal. 14-15.

⁶⁰ Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 121.

Islam yaitu; Bagi hasil (Profit-Sharing), Jual-Beli (Sale and Purchase), dan Sewa (Operational Lease and Financial Lease). Dan modal untuk mendanai PNPM-MP yang wujudnya adalah BLM bukan berasal dari utang lagi namun dari sumber-sumber yang halal lainnya seperti; pajak, BUMN, BUMD, zakat, infaq, sodaqoh dan lainnya bukan dari utang Bank Dunia atau IMF.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal:

1. Penanggulangan kemiskinan harus bertitik tolak dari penanganan akar penyebab kemiskinan itu sendiri terlebih dahulu, konsepsi PNPM-Mandiri atau P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang keluar dari *fitrah* manusia atau masyarakat belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku atau sikap atau cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, inhlkas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi, dll), sehingga Perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.
2. Implementasi PNPM-Mandiri mendasarkan pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan

baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep *Tridaya*. (a). *Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection)*; diejawantahkan dalam kegiatan sarana dan prasana fisik, (b) *Pengembangan Masyarakat (Social Development)*; yaitu kegiatan sosial dan terakhir adalah (c) *Pengembangan Ekonomi (Economic Development)*; direalisasikan dengan kegiatan ekonomi perguliran.

3. Ekonomi Islam merupakan representatif *al-Qur' ān* dan Hadist yang membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun, Islam sebagai *the holistic way of life*, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian pada aspek humanis (kemanusiaan). Namun perlu dikritisi bahwa pelaksanaan PNPM-Mandiri dari sisi implementasi dalam hal ekonomi perguliran masih menggunakan skim yang menganut sistem ekonomi konvensional yang masih mengandung *riba* dan *gharar*, baik dilihat dari praktek UPK maupun fakta dana BLM yang merupakan dana *Loan Bank Dunia*, sehingga mungkin kemiskinan dapat ditanggulangi dengan PNPM-Mandiri pada masa sekarang namun dimasa yang akan mendatang akan menciptakan kemiskinan yang baru dan lebih masiv.

B. Saran-saran

Berikut akan dikemukakan beberapa sarana dan cacatan sebagai bentuk implikasi dari kajian ini. Sebagai sebuah kajian kritis terhadap implementasi PNPM-Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan refleksi kepada kita semua untuk tidak mengulangi atau mengekalkan kesalahan-kelasahan yang telah diperbuat sebelumnya, dengan menerapkan praktek atau impelmentasi pengentasan kemiskinan dan menilai keberhasilan suatu pembangunan model tersebut yang telah gagal tersebut, terlebih karena ia jauh dari semangat keislaman.

Disisi lain, meskipun perubahan kearah yang dicita-citakan bukanlah tugas yang ringan, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk meghentikan langkah dalam merumuskan dan mencapai terwujudnya tujuan dalam pembangunan (yakni *maqasid al-syariah*). Karena bagaimanapun kegagalan-kegagalan negara-negara berkembang dalam menangani distribusi pendapatan dan keadilan selama ini dapat dikatakan merupakan dampak dari tidakadanya Islam secara nyata dinegara-negara berkembang tersebut (terlebih yang mayoritas penduduknya adalah muslim, seperti Indonesia), terutama dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Sehingga meskipun secara konsep dalam memahami akar penyebab kemiskinan dan penanggulangannya sudah baik, namun bila dalam prakteknya masih menganut sistem kapitalis (utang/bunga), maka akan serta merta menciptakan kemiskinan yang lebih masif, jadi solusi yang bisa ditawarkan

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abdul, 2006. *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Abdurrahman, Jamaluddin bin Abi Basar Ash-Shuyuti, *Al-Jamiush shaghir*, Jilid II , Beirut: Darul Qutub.
- Abdurrahman, Moeslim, 1980. (ed), *Agama Budaya dan Masyarakat*, Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Litbang Depag RI, 1979/1980. Jakarta.
- Adam, L., 1952. *Methods and Forms of Investigation and Recording of Native Costumary Law in The Netherlands East Indies before the War* Oxford: Oxford University Press.
- Ahmad, Khurshid, 2004. *Pesan Islam*, Bandung: Pustaka.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1979. *dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Buraey, Muhammad A. 1986. *Islam, Landasan Alternatif, Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali.
- Ali, Fachry, 1984. *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*, Bandung: Mizan, 1984.
- al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, judul asli (*Muskilatul Wa-Kaifa 'Alajahal Islam*) penerjemah: Umar Fanany Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- _____, Muhammad Yusuf, 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan Didin Hafidhudiin, Jakarta: Rabbani Press.
- Anshari, Muhammad Fazlur Rahman, 1983. *Konsep Masyarakat Islam Modern*, Bandung: Risalah, 1983.
- Antonio, M. Syaifi'i, 1999. *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Cet. ke-1, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____, 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.
- Arief, Sritua, *Indonesia*, 1981. *Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, cet. II Jakarta: LSP.

- Assiba'i, Musthafa Husni, 1981. *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: Diponegoro.
- Asy'ari, S. Imam, 1983. *Pengantar Sosiologi*, Surabaya : Usaha Nasional.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa, tt. *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* Kairo: Mustafa Muhammad.
- Ath-Thawali, Nabil Subhi, 1985. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Terjemahan Muhammad Bagir, cet. I. Bandung: Mizan.
- Ayub, Muhammad, 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bakri, Asafri Jaya, 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- BAPPENAS, 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan; Laporan Penelitian di Daerah-daerah*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Belkacem, Mauloud Kassim Nait-1983. "Konsep Keadilan Sosial di dalam Islam", dalam Altaf Gauhar, *Tantangan Islam*, Bandung: Pustaka.
- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris Jerman*, Jakarta: Gramedia.
- Bogdan, Robert & Stevan J Taylor, 1975 *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomological Approach to Social Science*, Jonh Willey & Son, 1975. New York.
- Budiman, Arief, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Chapra, M. Umer, 2001. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Choiri, Miftakhul, 2002. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Aset".
- Clelland, David C. Mc, 1980. "Dorongan Hati Menuju Modernisasi", dalam Myron Weiner (ed.), *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Gajah Mada University Press, 1980. Yogyakarta.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 168

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, , 2009. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, edisi revisi, Jakarta.
- _____, 2009. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta Selatan.
- _____, 2007. *Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Membangun BKM/LKM*, Jakarta.
- _____, 2007. *Mengenal BKM/LKM*, Jakarta
- _____, 2007. *Modul Tugas dan Fungsi BKM*, Jakarta
- _____, 2008: *Pedoman Teknis Pinjaman Pergulira*, Jakarta: 2008.
- Faisal, Sanapiah, 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Galbraith, John Kenneth, 1983. *Hakikat Kemiskinan Masa*, terjemahan Tom Anwar, Sinar Harapan, Jakarta.
- Giddens, Anthony, 2007. *The Third Way; Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi (terj)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, Didin, 1998. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendrie Anto, 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, Angga, 2010. "Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)"
- Hasution, Harus, 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: UI Press.
- Hatta, Muhammad, 1983. *Ilmu dan Agama*, Jakarta; Yayasan Idayu.
- Iqbal, Muhammad, 1966. *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, Jakarta: Tintamas.
- Kamali, Muhammad Hashim, 1989. *Principles of Islamic Yurisprudence*, Selangor, Pelanduk Publication.
- Karim, Adiwarman Azwar, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Khalaf, Abdul Wahab, 1986. *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dakwah Islamiyah Syabab al-Azhar.
- Khan, Qamaruddin, 2000. *Al Mawardi's Theori of State*, Bazm al-Iqbal, Lahore, hal. 4 dalam Asghar Ali Engineer (2000), *Devolusi Negara Islam (terj)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khobir, Bakhtiar, 2002. "Petani Dan Kemiskinan; studi Mengenai Upaya Petani dalam meningkatkan Kesejahteraan keluarga di kecamatan Singaparna, kabupaten Tasikmalaya)".
- Kitab *Al-Ahkam* nomor 1272
- Kleden, Ignas, 1978. "Dialog Anta Agama: Kemungkinan dan Batas-batasnya", dalam *Prisma*, LP3ES, No. 5/VII/Juni, 1978. Jakarta
- Koentjoroningrat, 1977. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Kuntowidjojo, 1985. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Machendrawaty, Nani dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madjid, Nurcholish, 1986. "Pembinaan Generasi Muda Melalui Pendekatan Agama", dalam *Dialog*, Badan Litbang Agama, Departemen Agama, No. 20/X/Maret, 1986. Jakarta.
- Magnis, Franz von, 1978. "Menuju Etos Pekerjaan yang Bagaimana", dalam *Prisma*, LP3ES, No. 11/VII/Desember 1978, Jakarta.
- Maududi, Abul A'la, 1979. *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, cet. III Jakarta: Bulan Bintang.
- Maududi, Abul A'la, 1984. "Ajaran-ajaran Al-Qur'an Tentang Ekonomi dan Politik", dalam *Esensi Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Media Warga Simbang Kulon Edisi Juni 2008. Pekalongan
- Media Warga Simbang Kulon Edisi Januari 2011. Pekalongan
- Media Warga Simbang Kulon Edisi Perdana, 2008. Pekalongan
- Miles dan Huberman, 1994. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*, Sage Publication.

- Modul Pelatihan Dasar Fasilitator Kelurahan PNPM-P2KP, 2004. *Konsep PNPM-P2KP*, KMW SWK-VI Jawa Tengah.
- Moleong, Lexy, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rposdakarya.
- Moore, Kingsley Davis and Wilbert, 1945. "Some Principles of Stratification," *American Sociologi Review* 10 (2), 1945; Talcott Parson, *The Social System*. IL: Free Press, 1951. Glencoe.
- Muhammad, 2008. *Paradigma, metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Sahri, 1982. *Pengembangan zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Yayasan Pusat Studi" Avicenna".
- Murdel, Neils, 1984. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, cet. V ,Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mursito, S. Sunato Ndaru, 2007 "Meningkatkan Pendapatan Sektor Pertanian di Indonesia", dalam *Analisis*, CSIS, No.7/VII/Juli, Jakarta.
- Mutahhari, Murtadha, 1984. *Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan.
- Myrdal, Gunnar, 1980. *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, terjemahan Paul Sihotang, cet. II, Jakarta: PT Gramedia.
- Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 41.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, judul asli *Islam, Economics, and Society*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoiruddin, 2010. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakaarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Nataatmaja, Hidayat, 1985. *Masalah Kemiskinan Ditinjau dari Ajaran Islam*, dalam Amrullah Ahmad *et. Al. I(eds)*, *Islamisasi Ekonomi*, PLP2M, 1985, Yoyagkarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1999 *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:: PT Rineka Cipta.
- Nilai Identitas Kader*, PB HMI, 1986.

- Noerhadi, Toeti Heraty, 1981 " Agama dan Masalah Kemiskinan", paper dalam *Kollokium Agama dan Pembangunan IV*, tentang "Agama Menangani Masalah Kemiskinan", Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama, 11 Maret 1981. Jakarta.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali.
- O'Dea , Thomas F., 1985. *Sosiologi Agama*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Perkins, John, 2007. *Pengakuan Bandit Ekonomi; Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia & Negara Dunia Ketiga*, Penerjemah, Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, Cet. 1, Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci.
- Permana, Bayu Trianggara, 2008, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo"
- PJM Pronangkis Simbang Kulon BKM Telaga Artha Tahun 2008-2010, Simbang Kulon Pekalongan.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. IX .Jakarta: Balai Pustaka.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama R.I. 1984. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid IV, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 1985. "Kekerasan, Agama dan Gerakan Perdamaian", Pengantar dalam, Kelompok Studi Proklamasi, *Agama dan Kekerasan*, KSP, 1985.
- Rahardjo, M. Dawam, 1983. *Esei-esai Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Rahmat, Jalaluddin, 1985. "Kunci Surga yang Terbuang", Kata Pengantar, dalam, Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, terjemahan Muhammad Bagir, Bandung: Mizan.

- Rais, M. Amin, 1985. "Arti Fungsi Tauhid", dalam, *Menelan Cakrawala*, Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Riberu, J. 1987. "Agama dan Pembangunan Masyarakat Pancasila", dalam, TB, Simatupang, *et.al.*, *Peranan Agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Dalam Negara Pancasila yang Membangun, BPK Gunung Mulia, 1987. Jakarta
- Rr. Suharatini, dkk. 2005. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Saifuddin, Ahmad A. 1984. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Da'wah.
- Sanusi, Ahmad, 1999. *Agama di tengah Kemiskinan; Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama*, Jakarta: Logos.
- Sayogjo, "Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan", dalam *Prisma*, LP3ES, No.3/VI/Maret 1977. Jakarta.
- Sherraden, Michael, 2006. *Aset untuk Orang Miskin; Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish, 1994. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Cet. Ke-14, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 166.
- Soedjatmoko, 1984. *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Xviii, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri, 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktisi Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Al-Fabeta.
- _____, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.
<http://www.policy.hu/suharto/modul/a/makindo>

- _____, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sumarjan, Selo, 1980. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan", dalam Alfian, *et.al.*(eds), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Suparlan, Parsudi (ed.) 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*, cet. I, Jakarta: Sinar Harapan.
- Supriyadi, "Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Upaya Pngetasannya dalam Pespektif Islam (Studi Kasus di Daerah Lembah Code Yogyakarta).
- Suseno, F. Magnis, 1987. "Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis", dalam J.B. Banawiratman, S.J. (ed.) *Kemiskinan dan Pembebasan*, cet. I, Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, Igit, 2007. "Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarkat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarkat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang"
- Taliziduhu Ndraha. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, , 1999, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2008. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Jakarta.
- Todaro, Michael P.1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi VI. Terj. Haris Munandar ,Jakarta: Erlangga
- Ulama dan Pembangunan*, Panitia Musyawara Nasional I, Majelis Ulama Seluruh Indonesia, 1976. Jakarta.
- Usman, Suyanto,2003. *Pembangnunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. II Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yafie, Ali, 1986. "Islam dan Problema Kemiskinan", dalam *Pesantren*, P3M,No.2/III/1986, Jakarta.
- Yahya, Muhyiddin Abi Zakariya, tt. *Risyadush Shalihin*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Yamani, Ahmad Zaki,1978. *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, cet. II, Jakarta, :LSIK.

- Zadjuli, Suroso Imam, 2008. *SIZ Model Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia*, Program Doktorat Studi Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1958. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al_fikr al-‘Araby.
- Zaman dan Zaman, 2001, (seperti dikutip dari Blaisdell, 1929)
- Zubaedi, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhdi, Masfuk, 1993. *Masail Fiqiyah*, cet. IV. Jakarta: Haji Mas Agung.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FOTO - FOTO KEGIATAN BKM TELAGA ARTHA SIMBANGKULON BUARAN PKL



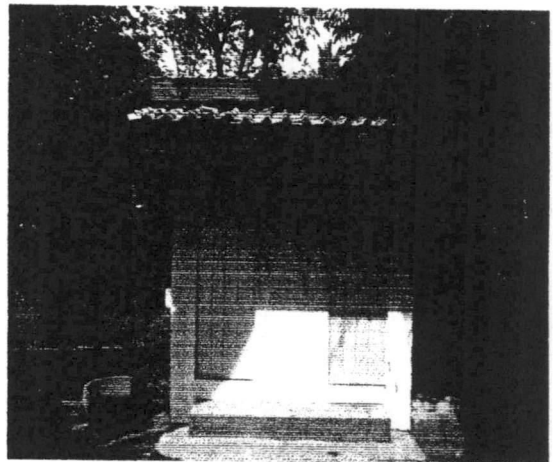
Kegiatan Paguyuban Relawan



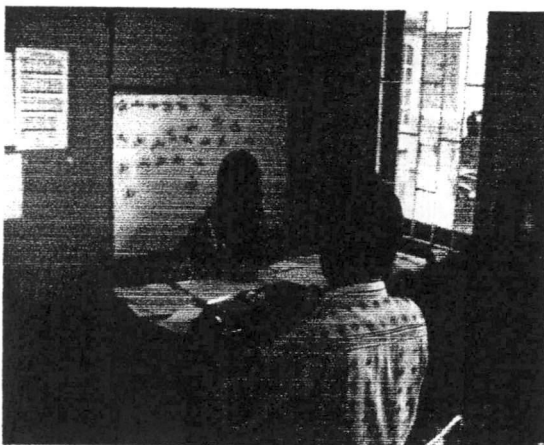
Kunjungan BAPPEDA Prov. Jateng



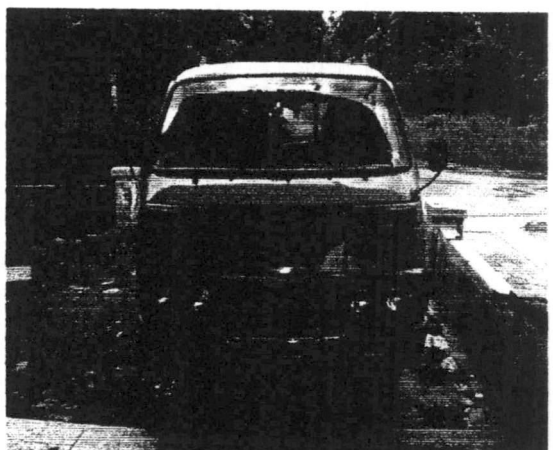
Kegiatan Sanitasi Lingkungan



WC Umum

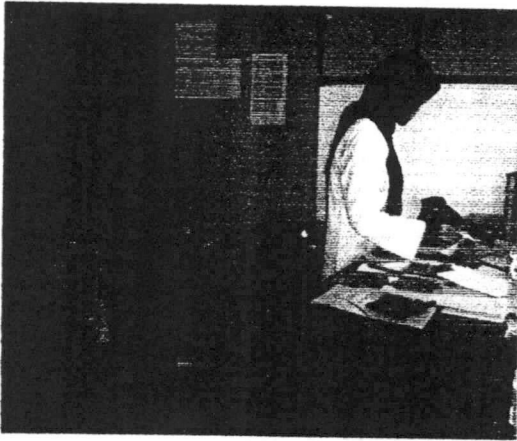


Kegiatan UPK (Ekonomi Perguliran)



Kegiatan Sosial Produktif (Sewa)

FOTO - FOTO KEGIATAN BKM TELAGA ARTHA SIMBANGKULON BUARAN PKL



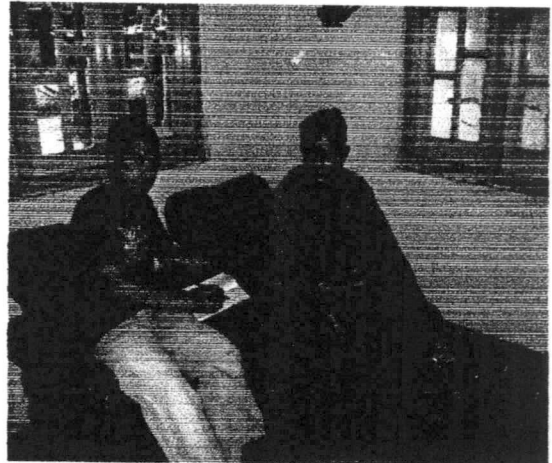
Kantor UPK BKM Telaga Artha



Wawancara Dg Kepala Kelurahan



Kantor Kelurahan Simbang kulon



Wawancara dg Koordinator BKM

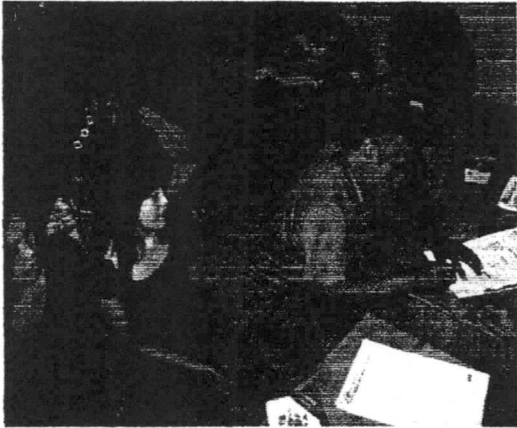


Sekretariat BKM Telaga Artha

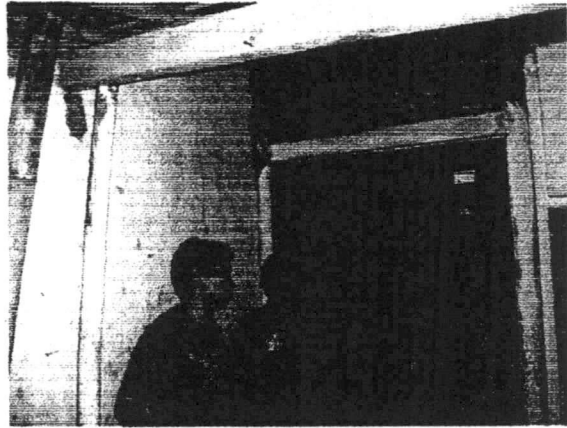


Wawancara dg UPK

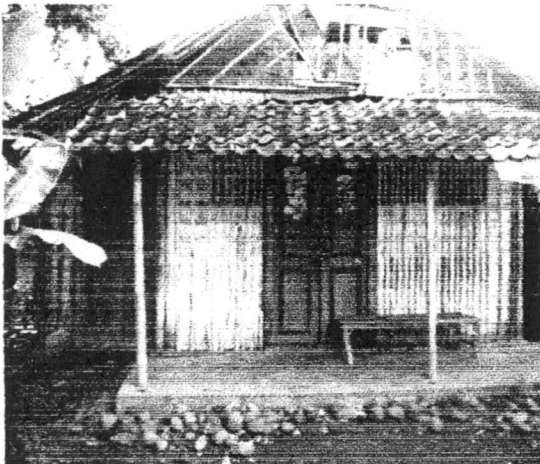
FOTO - FOTO KEGIATAN BKM TELAGA ARTHA SIMBANGKULON BUARAN PKL



Pendaftaran SPP KSM Ekonomi



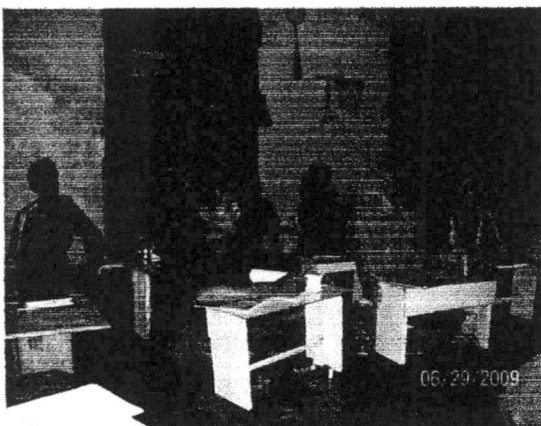
Wawancara dg Warga Miskin



Rumah Tdk Layak Huni



Musyawaharah MP2K KSM



Pelatihan Servis HP bg Warga Miskin



Verifikasi Tim POKJA PAKET

DAFTAR PERTANYAAN	
1.	Apakah bapak/Ibu/Sdr. mengetahui tentang PNPM –Mandiri Perkotaan, bagaimana PNPM-Mandiri menurut anda ?
2.	Apakah PNPM-Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan lebih baik dibandingkan dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya atau program terdahulu ?
3.	Apakah PNPM-Mandiri menurut bapak/Ibu/Sdr. Sangat bermanfaat dalam pembangunan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ?
4.	Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PNPM Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan ?
5.	Apakah bapak/Ibu/Sdr. Sudah merasakan manfaat dari PNPM-Mandiri ?
6.	Apakah implementasi PNPM-Mandiri dalam ekonomi perguliran sudah sesuai dengan <i>syar'at</i> hukum Islam ?

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURICULLUM VITAE (CV)

IDENTITAS DIRI

- ☐ Nama : Tarmidzi, S.H.I
- ☐ Jenis Kelamin : Laki-laki
- ☐ Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Februari 1978
- ☐ Agama : Islam
- ☐ Alamat : Larikan RT 06/03 Kec. Doro Pekalongan 51191
- ☐ Telpon/Hp : 081.802.867.119
- ☐ Gol. Darah : A
- ☐ Tinggi Badan : 160 Cm
- ☐ Berat Badan : 59 Kg
- ☐ Pend. Terakhir : SI Syari'ah STAIN Pekalongan
- ☐ : Akta IV STAIN Pekalongan

ORANG TUA

- ☐ Nama Bapak : Damin (Alm)
- ☐ Nama Ibu : Warjiyah (Alm)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- ☐ Sekolah Dasar : SD Negeri 01 Larikan, Tahun lulus
- ☐ Sekolah Menengah Pertama: SMP Negeri 01 Doro, Tahun lulus
- ☐ Sekolah Menengah Atas : MA AL-ISHLAH Lamongan Jatim, Tahun lulus 2000
- ☐ Perguruan Tinggi : STAIN PEKALONGAN, Tahun lulus 2005

PENGALAMAN PELATIHAN, SEMINAR DAN KURSUS

- ☐ Peserta Raimuna X Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jatim, Tahun 1999.
- ☐ Diklat Jurnalistik Mahasiswa oleh LPM STAIN Pekalongan, tahun 2001
- ☐ Pelatihan Dasar Metode Penelitian STAIN Pekalongan, tahun 2003
- ☐ Workshop dan Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional, (Depag RI & STAIN Purwokerto Jateng), tahun 2003.
- ☐ Pelatihan Islam Emansipatoris (JIE P3M&RFDC), tahun 2004
- ☐ Pelatihan Advokasi bagi Sarjana Syariah (STAIN Pekalongan), tahun 2005.
- ☐ Pelatihan Orientasi Koperasi Pesantren Jawa Tengah (Depag Jateng), tahun 2005.
- ☐ Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (Dinaskertrans Kab. Pekalongan), tahun 2005.
- ☐ Pelatihan Dasar ToT (Trainer of Training) Desa Siaga (REACI), tahun 2006
- ☐ Pelatihan Dasar Praturgas Senior Fasilitator P2KP KMW Jateng, tahun 2007.
- ☐ Pelatihan Dasar ToT (Trainer of Training) P2KP KMW Jateng, tahun 2008.
- ☐ Sebagai Pemandu Pelatihan Dasar Relawan P2KP, tahun 2008.
- ☐ Pelatihan Anti Mafia Peradilan (KP2KKN Semarang&TIFA), tahun 2008.
- ☐ Pelatihan Membaca, Menganalisis & Mengkritisi APBD, (KP2KKN Semarang), tahun 2008.
- ☐ Workshop Program Madrasah Education Development Program, (Depag RI&ADB 2008).
- ☐ Pelatihan Fasilitator Madrasah Education Development Program, (Depag RI&ADB 2008).
- ☐ Seminar Nasional Suku', Malaysian Experience and Its Relevance for Indonesia, MSI UII Yogyakarta, tahun 2008.
- ☐ Seminar Kajian Intensif Ekonomi Sayri'ah; Landasan Operasional Bank Syariah, MSI UII Yogyakarta 2009.

PENGALAMAN ORGANISASI

- ❑ Ikatan Santri Doro, Jabatan Humas tahun 1997-1999.
- ❑ Lembaga Dakwa Kampus (LDK) STAIN Pekalongan, Jabatan Wakil Ketua tahun 2000-2001.
- ❑ Himpunan Jurusan Syari'ah (HMJ) STAIN Pekalongan, Jabatan Ketua tahun 2002-2004.
- ❑ Jama'ah Insan Kamil Larikan, Jabatan Ketua tahun 2004-2005.
- ❑ Anggota ORI Kabupaten Pekalongan, Anggota tahun 2007.

PENGALAMAN KERJA.

- | | |
|---|---|
| ☐ Tahun 2000 | : Pengajar MTS Darul Ulum Donowangun Talun. |
| ☐ Tahun 2001-2004 | : Pengajar Pondok Modern Ulujami Pemalang. |
| ☐ Tahun 2006-2007 | : Fasilitator Pengembangan Model dan Sistem Kesehatan Dasar Terpadu di Perdesaan (RAECI & Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah). |
| ☐ Tahun 2007 | : Panitia Pilkada (Kepala Desa Larikan). |
| ☐ Tahun 2007-2010 | : Fasilitator Madrasah Education Development Program (MEDP) Kementrian Agama RI dgn ADB. |
| ☐ Tahun 2007- Sekarang | : Senior Fasilitator PNPM-P2KP Kab. Pekalongan. |
| ☐ Tahun 2011- Sekarang | : Mengajar di UNWANHAS Semarang. |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Fakta kondisi nasional saat krisis moneter dan ekonomi (1998-1999), telah berdampak semakin memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk pada umumnya. Sekitar 150 (50%) Daerah Tingkat II (kota/kabupaten) pada waktu itu dilaporkan juga terjadi kasus-kasus rawan gizi, angka pengangguran meningkat hingga 13,8 juta jiwa, dan semua ini sangat dirasakan dampaknya yang terjadi (terutama) di wilayah perkotaan.

Tidak hanya secara nasional saja persoalan ini terjadi, namun secara global (terutama wilayah Asia Pasifik) seperti dilaporkan ILO: 1999, bahwa 2/3 penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan; 53 % nya tinggal di wilayah perdesaan dan 39 % nya tinggal di wilayah perkotaan.

Pada tingkat komunitas, persoalan kemiskinan tercermin dengan lahirnya budaya kemiskinan yang justru sering merusak kualitas manusia masyarakat miskin dan tata nilai dominan yang berlaku seperti; rendahnya etos kerja, berfikir pendek, dan fatalisme. Sayangnya di dalam perkembangan situasi kemiskinan seperti itu tidak ada suatu gerakan bersama komunitas di tingkat komunitas untuk suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan-pilihan mereka untuk tetap dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin perkotaan.⁴

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNMP-MP) atau yang semula dinamai dengan Program Penanggulaangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu “proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada “program” penanggulangan

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya proyek yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi “program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakasa masyarakat sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai 2007, PNPM Mandiri diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % di tahun 2015.⁵

Kesejahteraan manusia sangat terkait dengan perkembangan hasil pembangunan masyarakat yang bisa diukur berdasarkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit berdasarkan tiga unsur indikator yang meliputi: rata-rata lama sekolah atau pendidikan, harapan hidup pada saat bayi dilahirkan (*expectation of life at birth*) atau usia hidup dan terakhir adalah

⁵ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta Selatan, 2009, hal. 3.

rata-rata potensi daya beli masyarakat.⁶ Sehingga mengenai kesejahteraan masyarakat atau rakyat tidak bisa terlepas dari persoalan kemiskinan dan sistem perkonomian serta kebijakan suatu negara tersebut.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan, begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Pada tahun 2009, terdapat penguatan-pengutan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta pemda dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing.⁷ Hal ini dilakukan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategi, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Sehingga terkait dengan hal tersebut sangatlah penting jika konsep PNPM Mandiri Perkotaan itu dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan

⁶ Suroso Imam Zadjuli, *SIZ Model Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia*, Program Doktorat Studi Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya 2008, hal. 2

⁷ *Ibid*, hal. 4.

Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *Subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepicangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.⁸

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah Swt. diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan didunia, yakni melaksanakan tugas kekhilafahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.⁹ Dengan memperdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk *rahmatan lil 'lamīn*.

Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah Swt. berfirman;

Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar (QS Al-Hajj [22]: 41)

Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik dengan Allah Swt., menunaikan zakat merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, sedangkan *ma'rūf*

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 3.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 37.

berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal, serta budaya, dan *munkar* adalah sebaliknya. Dengan demikian, sebagai seorang khalifah Allah di muak bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan dengan masyarakatnya harmonis serta agama, akal, dan budayanya terpelihara.¹⁰

Untuk mencapai tujuan suci tersebut, Allah Swt. menurunkan Al-Quran sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan akidah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan akidah dan akhlak yang merupakan dua komponen ajaran Islam yang bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun seiring dengan perbedaan tempat dan waktu, syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf perbedaan umat.

Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (mu'malah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum al-hisab* nanti.¹¹

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur' ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Cet. Ke-14, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 166.

¹¹ Antonio, Idem: *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 38.

kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, dengan bertopang pada “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam menanggulangi kemiskinan” yang mengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut (secara generic disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat

untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakasa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.¹²

PNPM-Mandiri adalah program nasional yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat sehingga mencakup semua provinsi, kabupaten dan kecamatan tak terkecuali di kabupaten Pekalongan semua kecamatan dan seluruh desa atau kelurahan masuk dalam PNPM-Mandiri, dengan dibawah dua menejemen kalau wilayah perkotaan maka masuk pada PNPM-Mandiri Perkotaan yang dibawah kendali Pekerja Umum Cipta Karya, sedangkan yang masuk wilayah perdesaan masuk pada PNPM-Mandiri Perdesaan yang dibawah Menteri Dalam Negeri, kemudian untuk membatasi penelitian agar lebih fokus dan terarah maka peneliti sangat perlu untuk mengambil obyek penelitian yaitu BKM Telaga Artha, ketertarikan penulis untuk meneliti di kelurahan Simbangkulon BKM Telaga Artha bukan tanpa alasan, hal ini dilatarbelakangi karena beberapa factor, *Pertama*, secara geografis kelurahan Simabngkulon yang terletak di kecamatan Buaran merupakan perbatasan kabupaten serta kota madia Pekalongan dan pintu masuk kabupaten. *Kedua*, masyarakat kelurahan Simbangkulon lebih relegius bila dibanding kelurahan atau desa lainnya, terbukti dengan mayoritas agama penduduknya beragama Islam, dan adanya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal yang berbasis Islam;

¹² Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman.*, hal. 3.

Tabel.1.1 Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal¹³

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	RA Muslimat	1	
2.	MI/SD	2	
3.	MTs Salafiyah	1	
4.	MA Salafiyah	1	
5.	Pondok Pesantren	2	
6.	TPQ/Madin	8	

Sumber: Data Monografi Kelurahan Simbangkulon, tahun 2010.

Dan *Ketiga*, sebagai sentral industri batik Pekalongan, mata pencaharian masyarakat sangat beragam namun lebih dominan pada pengrajin batik.

BKM Telaga Artha di kelurahan Simbangkulon berdiri pada tanggal 20 November 2007, terdiri dari 9 orang dan salah satunya sebagai koordinator, merupakan lembaga kepemimpinan masyarakat yang berasal dari proses pemilihan dengan mengacu pada nilai-nilai luhur kepemimpinan sebagai montor penggerak masyarakat untuk peduli dan menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayahnya.

BKM Telaga Artha merupakan organisasi sosial masyarakat dengan model kepemimpinan kolektif kolegeal serta mendasarkan pada prinsip kerelawanan, sehingga dalam kerjanya BKM Telaga Artha dibantu oleh Unit-unit yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 2 orang, Unit Pengelola Sosial (UPS) 2 orang, Unit Pengelola Ekonomi (UPK) 3 orang, dan Sekretaris 2 orang. Dengan visi dan misi sebagai berikut, visi: *Mewujudkan kebrsamaan dalam membangun Kelurahan Simbangkulon di segala bidang dengan bergotong royong dan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.* Sedangkan misinya adalah: 1). Memberdayakan masyarakat, peningkatan peran BKM

¹³ Data Monografi Kelurahan Simbangkulon, tahun 2010.

untuk menanggulangi kemiskinan, 2). Melibatkan masyarakat secara langsung dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kelurahan, 3). Menumbuhkan kesadaran masyarakat membangun lingkungan yang sehat, 4). Menumbuhkan kesadaran masyarakat membangun sosial kemasyarakatan, 5). Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan ekonomi, dan 6). Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan.¹⁴

Sampai tahun 2011 ini BKM Telaga Artha telah mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sumbernya berasal dari APBN pusat merupakan dana *loan World Bank* dan pinjaman Bank Dunia, selama tiga kali yaitu tahun 2008 sebanyak Rp. 300.000.000,-, tahun 2009 sebanyak Rp. 200.000.000,- dan tahun 2010 sebanyak Rp. 150.000.000,- yang dari semua itu telah diimplementasikan pada tiga aspek kegiatan yaitu; untuk kegiatan lingkungan, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial. Namun khusus pagu BLM tahun 2010 dari Rp. 150.000.000,- baru terserap Rp. 90.000.000,-, sedangkan dalam rincian kegiatan-kegiatan yang telah dilaporkan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT) sebagai berikut;

Tabel 1.2. Implementasi BLM BKM/LKM Telaga Artha

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah KSM	Sumber Dana		
				BLM	Swadaya	Total
1.	2007-2008	Lingkungan	9	204.750.000,-	79.160.000,-	285.175.000,-
		Ekonomi	22	58.500.000,-	0,-	58.500.000,-
		Sosial	2	29.750.000,-	4.000.000,-	33.750.000,-
		BOP		7.500.000,-		7.500.000,-
2.	2009	Lingkungan	5	115.750.000,-	28.990.000,-	144.740.000,-
		Ekonomi	18	38.500.000,-		
		Sosial	4	38.250.000,-	3.880.000,-	42.130.000,-
		BOP		7.500.000,-		7.500.000,-

¹⁴ PJM Pronangis Kelurahan Simbangkulon, 2007, hal. 5.

3.	2010	Lingkungan	2	87.000.000,-	30.300.000,-	117.300.000,-
		BOP		3.000.000,-		3.000.000,-

Sumber: Data Laporan RWT BKM Telaga Artha 2010 Kel. Simbang Kulon

Dari semua implementasi BLM tersebut difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, seperti dalam kegiatan lingkungan tahun 2007-2010 untuk beberapa kegiatan diantaranya; rehab rumah tidak layak huni bagi warga miskin, pavingisasi jalan becek, pembuatan MCK umum dan pembuatan serta rehab drainase atau saluran air. Sedangkan kegiatan ekonomi produktif digulirkan pada KK miskin yang masuk dalam Pemetaan Swadaya (PS 2) dengan tujuan agar dijadikan sebagai modal usaha, dan untuk kegiatan sosial diantaranya; pelatihan teknis *Hand Phoen* (HP), pengadaan layos, persewaan kursi, persewaan mobil, pengadaan mainan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pengadaan persewaan mobil. Untuk kegiatan sosial BKM Telaga Artha telah menentukan dua kategori yaitu sosial produktif dan sosial *carithy* (pemberian). Dari hasil sosial produktif tersebut nantinya baru akan didistribusikan pada orang-orang yang masuk daftar PS 2 (KK miskin), seperti orang jompo, yatim piatu, lansia, cacat dan lain-lain.

Program PNPM-Mandiri Perkotaan yang dengan tujuan utamanya adalah untuk memperdayakan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mampu menemukan masalah serta potensi lokalnya, BKM Telaga Artha Simbang Kulon mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor penggerak bagi upaya

penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dengan mengerakakan kelompok peduli.

Berangkat dari fenomena gaungnya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diejawantahkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) khususnya penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dan di pihak lain Islam adalah sebagai ajaran yang *syamil* (mencakup) dan *kāmil* (sempurna) serta *mutakāmil* (saling melengkapi dan terkait) yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT, tentu ajaran Islam mengandung pula ajaran yang berkaitan dengan praktik-praktik ekonomi yang akan membawa kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia (QS 21:107). Dalam terminologi syariat, ekonomi termasuk ke dalam kelompok muamalah, dan muamalah termasuk pada bagian syariat yang terkait dengan akidah dan akhlak (perhatikan QS 14: 24-26). Atas dasar itu, maka kekhususan-kekhususan ekonomi Islam terletak pada karakteristik dan wataknya yang berbeda dengan individualisme dan kapitalisme serta berbeda pula dengan sosialisme-komunisme.¹⁵ maka peneliti tertarik dengan dua persoalan tersebut sehingga ingin meneliti sejauhmana pandangan ekonomi Islam terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam pengetasan kemiskinan.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 231

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaiman konsep dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam penanggulangan kemiskinan ?
2. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di kabupaten Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam penanggulangan kemiskinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang konsep dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam penanggulangan kemiskinan ?
2. Untuk menjelaskan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di kabupaten Pekalongan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ?
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pekalongan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian diharapkan memberi informasi kepada masyarakat Indonesia agar dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan menurut sistem ekonomi yang berbasis syariah. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh para akademisi atau cendekiawan bahkan masyarakat umum yang mengkaji mengenai efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kebijakan pemerintah yang memberi makna strategis dan praktis. Selain itu implementasinya juga diharapkan dapat menjadi contoh karena mengingat kebanyakan program-program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masih kurang efektif dan efisien atau jauh panggang dari api.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis akan diurai dalam susunan bab per bab, kemudian dijabarkan melalui beberapa sub bab, yaitu:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan menjelaskan perihal telaah pustaka dan penelitian terdahulu serta tindak lanjut penelitian, tentang deskripsi gambaran umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Pada bab ini akan membahas gambaran umum PNPM Kabupaten Pekalongan, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, dan karakteristik ekonomi Islam.

Bab *ketiga*, berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, triangulasi, metode analisis data dan pendekatan penelitian.

Bab *keempat*, akan membahas hasil penelitian yang bersisi perihal gambaran umum kelurahan Simbang Kulon, konsep dan bentuk PNPM-Mandiri berdasarkan teori, bentuk-bentuk PNPM-Mandiri berdasarkan kelurahan Simbang Kulon, pembentukan KSM, penerima manfaat dana BLM PNPM-Mandiri Perkotaan, dan pandangan masyarakat terhadap PNPM-MP.

Bab *kelima*, merupakan analisis PNPM-Mandiri dalam Ekonomi Islam, membahas tentang konsep penanggulangan kemiskinan dalam PNPM-MP, implemnetasi PNPM-Mandiri di Kelurahan Simbang Kulon, PNPM-Mandiri dalam pandangan ekonomi Islam, dan refleksi.

Bab *keenam*, berisi penutup yang terdiri simpulan dan saran.